Penyusunan
Proyeksi Pembangunan Kependudukan

Heru Santoso Wahito Nugroho
Achmad Gatot Sunariyanto
Suparji

ISBN 978-623-97678-2-2

Aliansi Aktivis Kesehatan /
Alliance of Health Activists (AloHA)
2020

Penyusunan Proyeksi Pembangunan Kependudukan

Pengarang:
1. Heru Santoso Wahito Nugroho
2. Achmad Gatot Sunariyanto
3. Suparji

Aliansi Aktivis Kesehatan /
Alliance of Health Activists (AloHA)
2020

Penyusunan Proyeksi Pembangunan Kependudukan

Pengarang:
1. Heru Santoso Wahito Nugroho
2. Achmad Gatot Sunariyanto
3. Suparji

ISBN 978-623-97678-2-2

Penerbit:
Aliansi Aktivis Kesehatan /
Alliance of Health Activists (AloHA)

2020

Alamat:
Ngurah Rai Street 18, Bangli, Bali, Indonesia
E-mail:
Alohaacademy2018@gmail.com
Phone:
+6282142259360 (Indonesia)
+639173045312 (Philippines)

Editor:
Wiwin Martiningsih

Pemegang Hak Cipta: Penulis

PENGANTAR

Buku ini menjelaskan tentang cara penyusunan proyeksi pembangunan kependudukan, yang bisa digunakan sebagai dasar langkah antisipatif dan solutif untuk program tahun berikutnya. Metode ini bisa digunakan bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan seperti dinas PPKBPPPA dan BPS.

Metode ini sangat sederhana sehingga besar harapan kami agar metode ini bisa diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut, khususnya oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian.

Masukan yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan metode ini pada masa yang akan datang, terimakasih.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul 1-----i
Halaman Judul 2-----ii
Pengantar-----iii
Daftar Isi-----iv

Bab 1 Masalah Kependudukan (1)
A. Latar Belakang (1)
B. Tujuan (4)
C. Manfaat Kegiatan (5)
D. Luaran Kegiatan (5)

Bab 2 Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (6)
A. Masalah Kependudukan di Indonesia (6)
B. Latar Belakang Program KKBPK (11)
C. Manfaat Program KKBPK (13)
D. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (15)
E. Pengelolaan Kependudukan (16)

Bab 3 Metode Pelaksanaan Kegiatan (19)
A. Rancangan Bangun (19)
B. Waktu dan Tempat (19)
C. Target Generalisasi (19)
D. Variabel (19)
E. Teknik Pengumpulan Data (20)

Bab 4 Hasil dan Pembahasan (24)
A. Kejadian Pernikahan Dini (25)
B. Peserta KB Baru (48)
C. Peserta KB Aktif (71)
D. Kejadian *Drop Out* Kepesertaan KB (95)

Bab 5 Penutup (118)
A. Kesimpulan (118)
B. Rekomendasi (118)

Referensi (119)

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, tepatnya pada urutan keempat (Gambar 1) (Jayani, 2019). Namun demikian dalam bidang kependudukan, kemajuan yang dicapai oleh Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Indikator yang mudah dikenal yaitu angka kemiskinan absolut, peringkat kejadian korupsi, serta modal sosial dan budaya yang relatif masih lemah. Kemajuan bidang kependudukan di Indonesia berada pada peringkat 71. Posisi ini lebih rendah daripada negara-negara Asia Selatan lainnya, seperti Filipina pada peringkat 44, Sri Langka pada peringkat 43, dan Vietnam pada peringkat 61 (Pranadji, 2007).

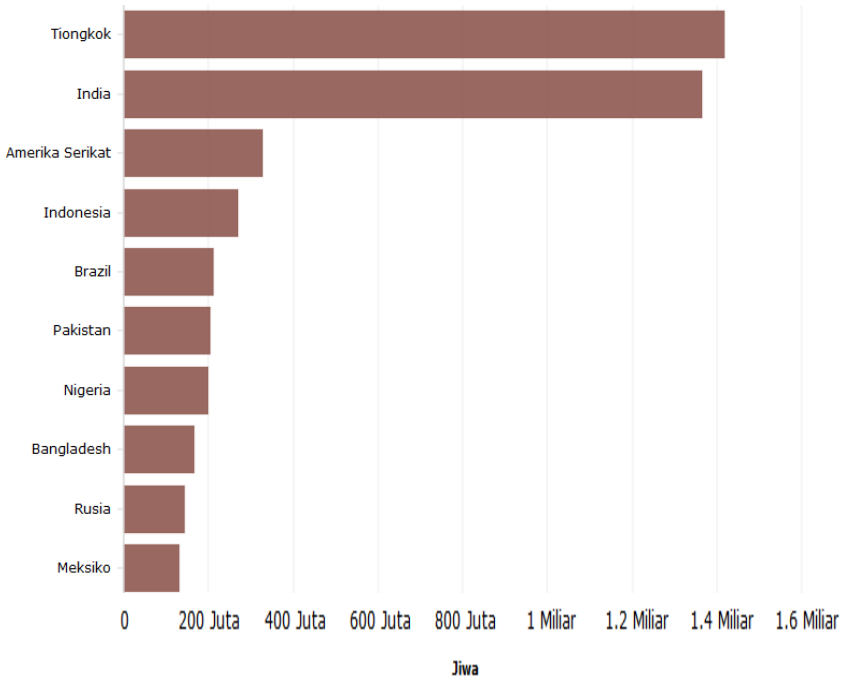

Gambar 1. Sepuluh negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia

Masalah-masalah di dalam negeri juga berdampak negatif terhadap kondisi kependudukan di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir sejak era reformasi hingga era otonomi daerah yang belum stabil, tampak bahwa *Total Fertility Rate* (TFR) belum mengalami penurunan yang signifikan, sementara itu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih fluktuatif sampai saat ini (Witono, 2018). Lebih detail, Sudarmi (2015) menyatakan bahwa ada lima masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia antara lain: 1) jumlah penduduk yang besar (berada pada urutan keempat di dunia), 2) laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, 3) jumlah kematian penduduk yang tinggi, terutama angka kematian ibu, 4) jumlah kelahiran penduduk, dan 5) mutasi penduduk, khususnya urbanisasi.

Masalah-masalah kependudukan seperti diuraikan di atas bisa menimbulkan dampak yang buruk jika tidak mendapatkan penanganan dengan baik, seperti: terjadinya masalah-masalah kesehatan, penurunan ketahanan ekonomi rakyat, pendidikan yang kurang merata, masalah-masalah sosial, penaggaran hukum dan sebagainya. Dengan demikian, kelima masalah kependudukan sebagaimana dijelaskan di atas mengilhami pemerintah untuk menyenggarakan program yang bisa memecahkan permasalahan kependudukan di tanah air, yakni Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Sudarmi, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada bagian lampiran dinyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dibagi menjadi tiga sub urusan yaitu: 1) sub urusan pengendalian penduduk, 2) sub urusan keluarga berencana dan 3) sub urusan keluarga sejahtera. Berkaitan dengan upaya pengendalian penduduk, pemerintah pusat melalui BKKBN dan Perwakilan BKKBN di provinsi melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dan penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. Upaya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, di tingkat provinsi perkiraan pengendalian penduduk tidak diberikan kewenangannya, melainkan menjadi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota juga hanya melakukan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk selain pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan (Sari, 2015).

Berkenaan dengan program keluarga berencana, melalui BKKBN pemerintah pusat menangani lima urusan yang berkaitan dengan: 1) penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi-KIE pengendalian

penduduk; 2) pengelolaan tenaga penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB; 3) pengelolaan dan penyediaan alat kontrasepsi bagi PUS; 4) pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga; dan 5) pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Di antara lima urusan yang dijalankan oleh pemerintah pusat tersebut, ada dua urusan yang diserahkan kewenangannya kepada pemerintah provinsi yaitu: 1) pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, KIE dan 2) pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota diserahi kewenangan yang mencakup empat urusan yaitu: 1) pelaksanaan advokasi-KIE pengendalian kependudukan; 2) pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana; 3) pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan 4) pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan (Sari, 2015).

Berkenaan dengan keluarga sejahtera, kewenangan pemerintah pusat adalah tentang pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga, kewenangan pemerintah provinsi adalah melakukan pengelolaan pelaksanaan desain tersebut, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah melakukan pelaksanaan desain (Sari, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, terlihat dengan jelas jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai peran yang sangat besar dalam implementasi program KKBPK dalam upaya memecahkan masalah kependudukan di kabupaten/kota setempat pada khususnya, dan masalah kependudukan di tingkat provinsi dan nasional pada umumnya. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) atau dinas lain yang terkait harus melaksanakan program KKBPK yang menjadi kewenangannya secara maksimal dan berkelanjutan, karena keberhasilan program KKBPK di tingkat kabupaten/kota merupakan landasan bagi keberhasilan program KKBPK pada tingkat provinsi dan tingkat nasional.

Merujuk kepada masalah-masalah sebagaimana diuraikan di atas serta mempertimbangkan kewenangan Dinas PPKBPPPA Kabupaten/Kota, maka Dinas PPKBPPPA Kabupaten Blitar memandang bahwa implementasi program KKBPK di Kapupaten Blitar harus selalu mengalami *improvement* (peningkatan) dari masa ke masa, baik yang berkaitan *input* (sumberdaya

manusia, sarana dan parasarana, sumber data, dan sebagainya), *proses* (pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan sebagainya), maupun *output* (informasi yang dihasilkan dari analisis data). Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa, *improvement* harus dilandasi oleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukti-bukti empiris dari data terdahulu juga harus menjadi perhatian penting sebagai dasar untuk peningkatan kualitas program kependudukan. Data pencapaian program kependudukan pada tahun-tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun prediksi pencapaian program kependudukan pada masa yang akan datang, jika dilakukan analisis secara tepat. Analisis prediktif seperti ini sering dikenal sebagai proyeksi data. Dengan proyeksi data kependudukan untuk tahun yang akan datang, maka upaya peningkatan program kependudukan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, termasuk sub-sub program dan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas.

Informasi prediktif yang dihasilkan dari proyeksi data kependudukan akan menjadi pertimbangan utama bagi pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan upaya pembangunan kependudukan. Dengan informasi yang berkualitas, maka bisa diambil keputusan yang akurat, dalam arti keputusan yang logis dan ilmiah sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, selanjutnya diputuskan bahwa Dinas PPKBPPPA Kabupaten Blitar perlu bekerjasama dengan lembaga ilmiah yang kredibel dalam rangka menyusun proyeksi pembangunan kependudukan Kabupaten Blitar tahun 2019.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari kegiatan ilmiah ini adalah menyusun proyeksi pembangunan kependudukan di Kabupaten Blitar pada tahun 2019.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan kegiatan ilmiah ini adalah:

a. Menyusun proyeksi pernikahan dini dengan usia pasangan wanita <20 tahun di kabupaten Blitar pada tahun 2019.
b. Menyusun proyeksi pasangan usia subur (PUS) yang baru menjadi peserta keluarga berencana di kabupaten Blitar pada tahun 2019.
c. Menyusun proyeksi pasangan usia subur (PUS) yang masih aktif sebagai peserta keluarga berencana di kabupaten Blitar pada tahun 2019.

d. Menyusun proyeksi wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan (*unmet need*) di kabupaten Blitar pada tahun 2019.
e. Menyusun proyeksi kejadian *drop out* kepesertaan keluarga berencana di kabupaten Blitar pada tahun 2019.

C. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai spektrum prediktif dari pencapaian pembangunan kependudukan di Kabupaten Blitar pada tahun 2019.
2. Memberikan acuan bagi Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Blitar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas program pembangunan kependudukan di wilayah kerja Dinas PPKBPPPA Kabupaten Blitar tahun 2019.
3. Memberikan tambahan rujukan bagi usaha pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan.

D. Luaran Kegiatan

Adapun luaran dari kegiatan ini antara lain:

1. Laporan proyeksi pembangunan kependudukan Kabupaten Blitar tahun 2019.
2. Naskah publikasi ilmiah dalam bentuk buku atau artikel, dalam skala nasional atau internasional (berdasarkan pertimbangan lebih lanjut).

BAB 2 KEBIJAKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

A. Masalah Kependudukan di Indonesia

Sumber: Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sehat (Siregar, 2016)

Gambar 2.A.1. Waktu yang Diperlukan untuk Peningkatan Jumlah Penduduk Dunia Per-Miliar dari Masa ke Masa

Saat ini, dunia telah mengalami permasalahan kependudukan dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pada masa yang lalu, diperlukan waktu sekitar 130 tahun (tahun 1800 hingga tahun 1930) untuk meningkatkan jumlah penduduk menjadi 1 miliar lebih banyak, tetapi sekitar 20 tahun yang lalu, hanya diperlukan waktu kira-kira 12 tahun (tahun 1999 hingga tahun 2011) untuk meningkatkan jumlah penduduk dengan kelipatan yang sama (Siregar, 2016), yang secara lebih jelas dapat dilihat dalam tampilan grafik pada Gambar 2.A.1.

Sampai dengan saat ini, Indonesia masih memiliki masalah kependudukan yang perlu mendapatkan penanganan secara serius. Lebih lanjut, Siregar (2016) dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2016 menjelaskan bahwa terdapat 5 permasalahan utama kependudukan di Indonesia yaitu:

2) Jumlah penduduk yang relatif besar namun dengan kualitas yang relatif rendah

Tabel 2.A.1. Negara-Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia

Peringkat	Negara (atau wilayah dependen)	Populasi	Tanggal	% dari penduduk dunia
1	Republik Rakyat Tiongkok[catatan 1]	1.396.790.000	Mei 31, 2019	18.5%
2	India[catatan 2]	1.342.480.000	Mei 31, 2019	17.8%
3	Amerika Serikat[catatan 3]	330.929.000	Mei 31, 2019	4.38%
4	Indonesia	265.015.300	1 Juli 2018	3.51%
5	Pakistan	215.767.000	Mei 31, 2019	2.85%
6	Brasil	211.401.000	Mei 31, 2019	2.8%
7	Nigeria	193.392.517	July 1, 2016	2.56%
8	Bangladesh	166.645.000	Mei 31, 2019	2.2%
9	Rusia[catatan 4]	146.877.088	January 1, 2018	1.94%
10	Meksiko	126.577.691	January 1, 2019	1.67%

Sumber: Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sehat (Wikipedia, 2019)

Besarnya jumlah penduduk Indonesia ditandai dengan posisi urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, sebagaimana tertera pada Tabel 2.A.1 (Wikipedia, 2019).

3) Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi

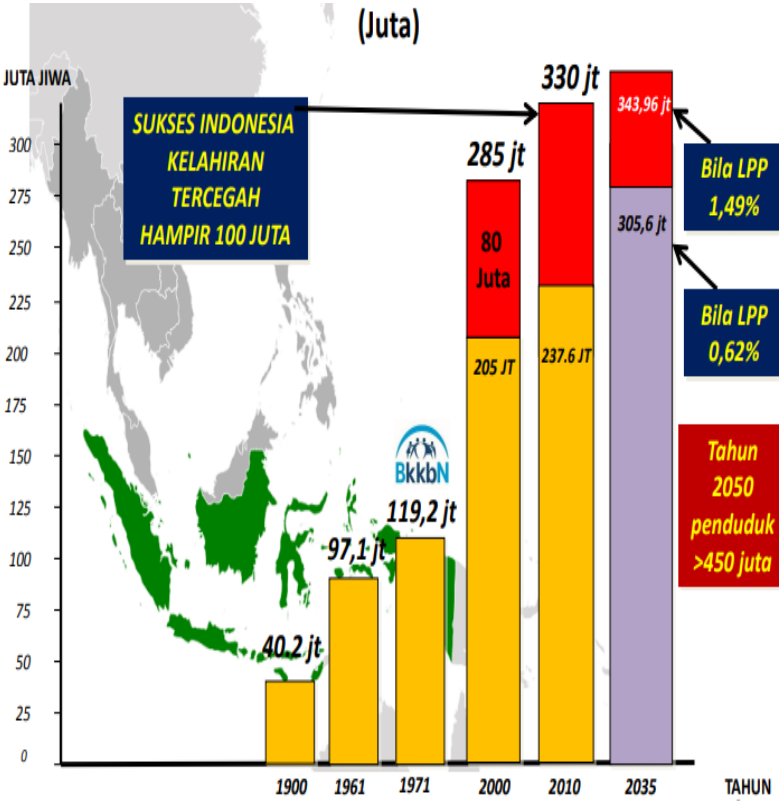

Sumber: Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sehat (Siregar, 2016)

Gambar 2.A.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 1990-2010 adalah 30,1% dan menempati urutan kelima setelah Nigeria (62,4%), Pakistan (55,3%), India (40,2%) dan Brazil (30,3%). Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa Indonesia akan menggeser posisi Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar pada urutan ketiga. Dengan laju pertumbuhan 30,1% tersebut, diperkirakan bahwa pada tahun 2050, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 400 juta orang (Siregar, 2016).

Meskipun pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan, namun masih tergolong tinggi. Pertumbuhan penduduk pada tahun 1961-1971 adalah 2,1%, pada 1971-1980 adalah 2,32%, pada tahun 1980-1990 adalah 1,98%, dan pada tahun 1990-2000 adalah 1,6% per tahun. Penurunan laju pertumbuhan penduduk nasional merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Ini berbeda dengan negara-negara sedang berkembang yang lain. Prestasi ini merupakan hasil dari suksesnya implementasi program Keluarga Berencana secara berkesinambungan (Wijayanti, 2017).

Gambar 2.A.2 menunjukkan pesatnya perkembangan jumlah penduduk Indonesia sejak tahun 1900-an sampai dengan prediksi hingga tahun 2035. Tampak bahwa sesungguhnya Indonesia melalui program Keluarga Berencana, telah berhasil menekan jumlah penduduk dari perkiraan 330 juta orang yang diperkirakan menjadi 237,6 juta orang. Jika Indonesia berada pada laju pertumbuhan penduduk 1,49%, maka pada tahun 2035 jumlah penduduk diperkirakan 343,96 juta orang dan jika laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan menjadi 0,62%, maka jumlah penduduk pada tahun yang sama diperkirakan hanya 305,6 juta orang (Siregar, 2016).

4) Fertilitas penduduk yang relatif masih tinggi dengan penyebaran yang tidak merata

Fertilitas total di Indonesia mengalami stagnasi dalam 10 tahun terakhir, yang ditunjukkan oleh hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003, tahun 2007, dan tahun 2012 yaitu 2,6 anak, dan tidak berhasil mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan target 2,1 pada tahun 2015. Sementara itu, penggunaan kontrasepsi hanya meningkat secara perlahan dari 60,3 (SDKI tahun 2002/03), 61,0 (SDKI tahun 2007), dan 61,9 (SDKI tahun 2012). Keadaan ini kemungkinan disebabkan karena Program

Kependudukan dan Keluarga Berencana belum menjadi prioritas bagi kebijakan pemerintah kabupaten/kota (Arsyad & Nurhayati, 2016).
Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Madura, yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 7% dari wilayah daratan di Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 60% dari total penduduk Indonesia, sehingga jumlah penduduk di luar Jawa dan Madura hanya sekitar 40%, padahal total luas wilayah yang bisa ditempati adalah lebih dari 90%. Persebaran penduduk yang tidak merata ini berdampak pada tingkat hunian atau kepadatan penduduk. Kondisi ini berdampak pada terjadinya masalah kependudukan, sosial dan ekonomi, sebagai contoh adalah area lahan pertanian yang semakin sempit di Pulau Jawa sebagai akibat dari perluasan pemukiman juga industri. Sebaliknya, di luar Jawa banyak lahan kosong yang belum termanfaatkan untuk lahan pertanian atau perkebunan, karena kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia (Wijayanti, 2017).

5) Mortalitas penduduk yang tinggi dan angka harapan hidup yang rendah
Beberapa masalah yang berkaitan dengan hal ini adalah angka kematian bayi (AKB) yang masih tinggi, angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi, dan angka harapan hidup yang relatif rendah (Siregar, 2016). Angka-angka tersebut selain menjadi indikator kesehatan, juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di suatu negara (Razif & Tantoro, 2012).

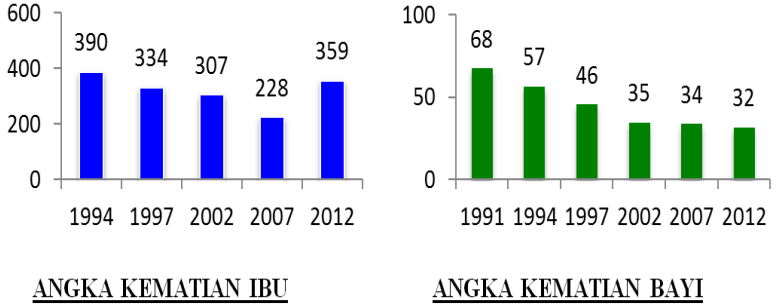

Sumber: BPS, BKKBN, Kemenkes RI, & ICF International, 2012

Gambar 2.A.3. *Trend* AKI dan AKB di Indonesia Menurut SDKI 2012

Mengacu kepada data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI pada tahun 2012 melonjak tinggi kembali, padahal pada tahun-tahun sebelumnya sudah menurun. Sementara itu, penurunan AKB semakin berjalan lambat dan menuju kepada kecenderungan untuk berhenti, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.A.3. (BPS, BKKBN, Kemenkes RI, 2012).

Dalam beberapa tahun terakhir, angka harapan hidup di Indonesia masih rendah (Siregar, 2016). Namun kini, angka harapan hidup kecenderungan mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ini merupakan dampak dari perbaikan sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ardhiantie dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sesungguhnya angka harapan hidup bagi penduduk Indonesia pada tahun 2016 (70,90 tahun) meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2010 (69,81 tahun). Dapat dimaknai bahwa bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2016 dapat hidup sampai usia 70 tahun. Kondisi ini merupakan hasil dari peningkatan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, juga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Sulaiman, 2018).

6) Mobilitas penduduk yang tidak ideal, antara lain persebaran penduduk yang timpang di berbagai wilayah di Indonesia, urbanisasi yang tinggi sehingga penduduk perkotaan semakin padat, transmigrasi yang belum efektif sehingga belum bisa menjadi pemecahan upaya penyebaran penduduk, juga permasalahan permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) / tenaga kerja wanita (TKW).

B. Latar Belakang Program KKBPK

Latar belakang lahirnya KKBPK di Indonesia adalah adanya permasalahan-permasalahan kependudukan (Sudarmi, 2015), yang bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang besar

   Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 juta jiwa, yang terdiri atas penduduk laki-laki sejumlah 119.630.913 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 118.010.413 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar pada urutan keempat

di dunia, setelah China (1,346 milyar), India (1,198 milyar) dan Amerika Serikat (315 juta) (Sudarmi, 2015).

2. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
   Mengacu hasil Sensus Penduduk 2010, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Indonesia adalah 1,49 persen per tahun atau dengan kata lain telah terjadi penambahan 3-3,5 juta jiwa di Indonesia setiap tahun. Jika LPP tetap dalam besaran 1,49 persen per tahun, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan meningkat menjadi sekitar 450 juta jiwa. Dengan demikian, pada saat itu satu dari 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia (Sudarmi, 2015).

3. Jumlah kematian penduduk yang tinggi
   Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama derajat kesehatan masyarakat dan ditetapkan sebagai salah satu tujuan Millenium Development Goals (MDGs) (kini menjadi Sustainable Development Goals / SDGs). AKI Indonesia tidak dapat mencapai target MDG yang ditetapkan yaitu 102 per 100 000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (BPS, BKKBN, Kemenkes RI, 2012).
   Berdasarkan SDKI 2012 diketahui bahwa angka AKI sebanyak 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari hasil SDKI 2007 yang besarnya hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup (BPS, BKKBN, Kemenkes RI, 2012).

4. Jumlah kelahiran penduduk
   Jumlah kelahiran di Indonesia pada saat ini adalah antara 3 sampai dengan 3,5 juta per tahun atau setara dengan jumlah penduduk negara Singapura. Angka kelahiran penduduk diukur menggunakan Total Fertility Rate (TFR), yaitu jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama mengalami masa subur. Dalam satu dasawarsa terakhir, TFR di Indonesia mengalami kondisi stagnan, dengan kisaran angka 2,6 anak per Wanita Usia Subur (WUS). Hal ini menandakan bahwa upaya pengendalian penduduk di Indonesia melalui Program KKBPK akhir-akhir ini belum bisa meraih hasil yang optimal (Sudarmi, 2015).

5. Mutasi penduduk
   Mutasi penduduk di Indonesia didominasi oleh urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sampai saat ini, arus urbanisasi dari desa ke kota masih tetap berlangsung. Kota-kota besar di Indonesia

seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, Banjarmasin, dan lain-lain menjadi tujuan penduduk desa untuk mengadu nasib, sehingga di kota-kota besar tersebut permasalahan sebagai dampak dari urbanisasi semakin bertumpuk. Tidak hanya masalah kepadatan penduduk dan pengangguran saja, tetapi juga timbulnya bermacam-macam permasalahan sosial, lingkungan hidup dan masalah-masalah lainnya (Sudarmi, 2015).

C. Manfaat Program KKBPK

Program KKBPK memberikan banyak manfaat bagi keluarga, yang tidak hanya bermanfaat dari segi kesehatan saja, tetapi juga bermanfaat dari segi ekonomi, sosial dan budaya (Sudarmi, 2015).

1. Manfaat Program KKBPK dari Segi Kesehatan

Dalam segi kesehatan, program KKBPK bermanfaat bagi ibu maupun anak (Sudarmi, 2015), yang diuraikan sebagai berikut.

a. Bagi ibu, program KKBPK bisa memberikan banyak manfaat sebagai berikut:
   2) Mencegah kejadian anemia (kurang darah)
   3) KB dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi ibu lebih optimal
   4) Mencegah perdarahan yang terlalu banyak sesudah persalinan dan mempercepat pemulihan keadaan rahim
   5) Mencegah kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)
   6) Lebih mendekatkan ibu kepada pelayanan kesehatan
   7) Memperbaiki keharmonisan keluarga
b. Bagi anak, program KKBPK bisa memberikan banyak manfaat sebagai berikut:
   1) Mencegah terjadinya kekurangan gizi pada anak
   2) Menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak
   3) Menjamin terpenuhinya kebutuhan akan ASI Ekslusif selama 6 bulan.

2. Manfaat Program KKBPK dari Segi Ekonomi

Dalam segi ekonomi, program KKBPK dapat membawa beberapa manfaat (Sudarmi, 2015) yaitu:

1) Mengurangi kebutuhan rumah tangga
2) Meningkatkan pendapatan/ekonomi keluarga

3. Manfaat Program KKBPK dari Segi Sosial Budaya

Dalam segi sosial budaya, program KKBPK dapat membawa banyak manfaat (Sudarmi, 2015), sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesempatan untuk bermasyarakat
2) Meningkatkan peran ibu dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di dalam keluarga
3) Mendukung Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), khususnya bagi sasaran remaja yang belum menikah. Dalam hal ini, usia ideal bagi remaja untuk menikah adalah 20-30 tahun bagi perempuan dan minimal 25 tahun bagi laki-laki. Kegiatan program KKBPK terkait PUP antara lain adalah: Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Saka Kencana, dan sebagainya.
4) Pengaturan kelahiran, khususnya untuk sasaran Pasangan Usia Subur (PUS). Dalam hal ini, tujuan dari program KKBPK adalah mengatur jarak kelahiran yang ideal yaitu 3-4 tahun, dan jumlah anak yaitu jumlah 2 anak adalah lebih baik. Kegiatan program KKBPK yang berkaitan dengan pengaturan kelahiran adalah pelayanan KB (Rutin, TMKK-KB-Kes, PKK-KB-Kes), jaminan pasca pelayanan, dan sebagainya.
5) Pembinaan Ketahanan Keluarga, khususnya untuk sasaran keluarga yang memiliki anak balita, remaja dan lansia. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketahanan dan keharmonisan keluarga. Kegiatan dari program KKBPK yang berkaitan dengan Pembinaan Ketahanan Keluarga adalah: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
6) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, dengan sasaran keluarga secara keseluruhan. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga yang diukur dengan pelaksanaan 8 fungsi keluarga. Kegiatan dari program KKBPK yang berkaitan dengan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga adalah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
7) Pengelolaan Kependudukan, dengan sasaran seluruh penduduk. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Kegiatan dari Program KKBPK yang berkaitan dengan pengelolaan kependudukan antara lain sosialisasi dampak kependudukan, pendidikan kependudukan, dan penyusunan *grand design* pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk. Usaha pengendalian penduduk khususnya dalam hal pengaturan kelahiran, yang dilaksanakan di Indonesia adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan yang

bersifat sementara (menunda/menjarangkan) atau bersifat permanen (tidak ingin mengalami kehamilan lagi). Metode kontrasepsi modern terdiri atas 7 macam yaitu:

a) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD)
b) Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK)
c) Metode Operasi Pria (MOP)/ Vasektomi
d) Metode Operasi Wanita (MOW)/ Tubektomi
e) Suntik
f) Pil
g) Kondom

D. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga adalah sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa:

1) Banyak keluarga akseptor KB lestari yang memiliki kehidupan kurang sejahtera
2) Banyak keluarga akseptor KB lestari yang belum mempunyai usaha
3) Banyak keluarga akseptor KB lestari yang tidak mempunyai keterampilan dan modal untuk berusaha
4) Bila keluarga-keluarga tersebut tidak diberdayakan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap eksistensi KB, sehingga anggapan bahwa dengan menjadi peserta KB keluarga akan hidup lebih sejahtera menjadi semakin luntur.

Kegiatan pokok dalam program KB-KS untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Tujuan umum dibentuknya UPPKS adalah untuk mengembangkan potensi peserta KB dan calon peserta KB dalam rangka memantapkan diri dan keluarganya agar mampu hidup mandiri untuk mempercepat proses pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Sedangkan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesertaan KB di masyarakat
2) Meningkatkan pendapatan keluarga
3) Mengembangkan ketahanan dan ketahanan keluarga
4) Memantapkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga yaitu: keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan.

Berikut ini adalah karakteristik dari kegiatan UPPKS (Sudarmi, 2015).

1) Sasaran: Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
2) Jumlah anggota: 10-30 keluarga
3) Pertemuan Penyuluhan: Sebulan sekali
4) Materi:
   a) Evaluasi usaha kelompok
   b) Pengelolaan usaha
   c) Peningkatan kualitas produk
   d) Pemasaran
   e) Kemitraan
5) Jenis usaha: Bersifat kolektif dan individu
6) Bentuk-bentuk usaha kelompok UPPKS:
   a) Usaha makanan dan minuman (membuat telur asin, emping melinjo, enting-enting jahe, sirup jahe, dan sebagainya)
   b) Usaha kerajinan (membuat alat-alat rumah tangga dari bahan lokal, membuat tas, topi, vas bunga dari enceng gondok, dan sebagainya
   c) Usaha jasa (membuka warung kelontong, menjual sayuran, menjahit, usaha catering dan sebagainya).

   Produk dari kelompok yang memiliki standar kualitas/mutu yang baik akan mendapatkan Sertifikasi Penyuluhan (SP) Makanan dan Minuman.

E. Pengelolaan Kependudukan

Pengelolaan kependudukan penting dilakukan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan dalam rangka menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) melalui pengaturan kelahiran dan pendewasaan usia perkawinan. Dalam rangka pengaturan kelahiran, program KKBPK menggunakan konsep "Dua Anak Cukup" sementara dalam rangka pendewasaan usia perkawinan menggunakan konsep "Pernikahan ideal" yakni 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dalam program KKBPK dikembangkan program Generasi Berencana atau lebih dikenal sebagai program "GenRe". Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Program GenRe ini diarahkan untuk

meningkatkan usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, menurunkan kasus perilaku seks pra nikah, HIV-AIDS dan penyalahgunaan napza di kalangan remaja/mahasiswa (Sudarmi, 2015).

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain juga melalui peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan dan kesehatan pada umumnya. Kegiatan dalam rangka pengelolaan kependudukan antara lain berupa analisis dan sosialisasi dampak kependudukan, pendidikan kependudukan, dan penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk dan grand design peningkatan kualitas penduduk. Analisis dampak kependudukan mencakup dampak kependudukan terhadap ketenagakerjaan, dampak kependudukan terhadap lingkungan hidup, dampak kependudukan terhadap pendidikan, dampak kependudukan terhadap kesehatan, dampak kependudukan terhadap ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Pendidikan kependudukan lebih difokuskan pada siswa di sekolah mulai SD, SLTP hingga SLTA yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan penduduk dan perkembangannya di Indonesia serta bagaimana mengelola penduduk agar dapat mendukung pembangunan. Sementara penyusunan grand design pengendalian kuantitas penduduk di fokuskan pada rekayasa jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk melalui : pengendalian kelahiran, kematian dan pengarahan mobilitas. Sedangkan grand design peningkatan kualitas penduduk difokuskan pada rekayasa peningkatan kualitas penduduk baik fisik maupun mental melalui pendekatan life cycle. Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini belum berjalan optimal baik dalam aspek garapan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan Pengelolaan Kependudukan yang ditandai dengan masih tingginya angka Laju Pertumbuhan Penduduk, pernikahan usia dini, tidak terpenuhinya target capaian akseptor baru, rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Sudarmi, 2015).

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan program KKBPK di lapangan Sudarmi (2015), antara lain:

1) Terus berkurangnya penyuluh KKBPK di lapangan karena mutasi, promosi dan pensiun
2) Masih rendahnya kemandirian ber-KB

3) Belum optimalnya peran kader kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) dalam mensukseskan kesetaraan ber-KB bagi anggotanya yang masih PUS. Begitu juga peran toga, toma, kader IMP serta organisasi profesi
4) Belum optimalnya peran Kepala Desa dalam program KKBPK baik dalam memotivasi kepada masyarakat maupun dalam memberikan dukungan anggaran untuk program KB-KS.

Upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi program KKBPK adalah dengan pemberdayaan kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB-KS untuk mengurangi beban Penyuluh KB yang jumlahnya makin terbatas. Kemudian juga menggerakkan Tim MUPEN KB untuk melakukan Advokasi dan KIE pada masyarakat luas tentang KB Mandiri. Juga menggiatkan kader kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang terdiri dari kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) maupun UPPKS untuk mensukseskan program KKBPK di lingkungan kegiatannya. Serta meningkatkan pengetahuan para motivator KB maupun kader KB lainnyal tentang program KKBPK melalui kegiatan orientasi dan pemberian Buku Pegangan Program KKBPK yang digunakan sebagai panduan penyuluhan kepada masyarakat luas. Dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan para motivator KB maupun kader KB lainnya tentang Program KKBPK diharapkan para motivator KB sebagai penggerak dalam program KKBPK di wilayahnya. Upaya optimalisasi program KKBPK akan lebih efektif apabila pihak pemerintah desa juga menganggarkan kegiatan melalui anggaran desa. Program KKBPK yang diharapkan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan peran tokoh formal dan tokoh non formal adalah menyampaikan program 4T yaitu terlalu muda menikah, terlalu sering melahirkan, terlalu tua untuk melahirkan dan terlalu banyak anak. 4T tersebut kalau bisa ditekan maka akan menurunkan angka kelahiran sehingga kualitas keluarga akan meningkat sehingga menjadi keluarga yang sejahtera sesuai dengan amanah UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Sudarmi, 2015).

BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rancangan Bangun

Kegiatan ini tergolong sebagai penelitian survei deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada lapangan apa adanya, yaitu deskripsi tentang pencapaian program pembangunan kependudukan di Kabupaten Blitar dalam 5 tahun terakhir, yang dilengkapi dengan prediksi pencapaian pada tahun 2019.

B. Waktu dan Tempat

Penyusunan proyeksi pembangunan kependudukan di Kabupaten Blitar ini diselenggaran dalam waktu 4 bulan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 12 Juni 2019. Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Blitar.

C. Target Generalisasi

Target umum dari proyeksi pembangunan kependudukan di Kabupaten Blitar ini adalah seluruh penduduk di Kabupaten Blitar. Selain target general, juga ada target-target klaster yang dalam hal ini adalah klaster berbasis kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

D. Variabel

Ada beberapa variabel yang akan diproyeksikan untuk mendapatkan informasi prediktif dalam studi ini yaitu:

1) Usia Perkawinan
   Secara operasional, variabel ini difokuskan kepada proporsi pernikahan dini dengan usia pasangan wanita <20 tahun.
2) Peserta Keluarga Berencana Baru
   Secara operasional, variabel ini difokuskan kepada proporsi pasangan usia subur (PUS) yang baru menjadi peserta keluarga berencana, dalam satu tahun berjalan.
3) Peserta Keluarga Berencana Aktif

Secara operasional, variabel ini difokuskan kepada proporsi pasangan usia subur (PUS) yang masih aktif sebagai peserta keluarga berencana, dalam satu tahun berjalan.

4) *Unmet Need*

Secara operasional, variabel ini difokuskan kepada proporsi wanita usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan (Bradley, Croft, Fishel, & Westoff, 2012).

E. Teknik Pengumpulan Data

Data tentang seluruh variabel (usia perkawinan, peserta KB baru, peserta KB aktif dan *unmet need*) dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa data mentah yang sudah tersedia di Dinas PPKBBPPPA Kabupaten Blitar dalam 5 tahun terakhir. Data tersebut merupakan bagian dari dokumen hasil pengumpulan data kependudukan yang dilakukan secara rutin oleh Dinas PPKBBPPPA Kabupaten Blitar.

Tahapan yang dilakukan dalam proses ini antara lain:

1. Pertemuan persiapan yang melibatkan pihak Dinas PPKBBPPPA Kabupaten Blitar dan Forum Ilmiah Kesehatan sebagai pelaksana penyusunan proyeksi pembangunan kependudukan
2. Penyusunan instrumen pengumpulan data berupa *checklist* yang mencakup variabel-variabel yang dibutuhkan serta elemen-elemen pelengkapnya, mengacu kepada tujuan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, *checklist* mencakup usia perkawinan, peserta keluarga berencana baru, peserta keluarga berencana aktif, dan unmet need untuk 5 tahun terakhir.
3. Pertemuan koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi para personil yang terlibat dalam kegiatan analisis data, baik dari pihak PPKBBPPPA Kabupaten Blitar maupun pihak Forum Ilmiah Kesehatan. Kegiatan ini diperlukan agar proses pengumpulan data dapat dilakukan sesuai dengan standar yang diharapkan bersama, sekaligus terwujudnya standar yang sama bagi masing-masing personil yang terlibat.
4. Proses pengumpulan data di lapangan yaitu studi dokumentasi yang dilakukan oleh para personil dari Forum Ilmiah Kesehatan, yang difasilitasi oleh personil dari Dinas PPKBBPPPA, dengan pengawasan supervisor setempat.

5. Proses pengolahan data yang meliputi: 1) penyuntingan yaitu memastikan bahwa data yang diperoleh sudah benar dan lengkap, 2) pemberian kode dari data kualitatif menjadi angka sesuai dengan pedoman koding (khusus untuk data yang memerlukan koding), 3) tabulasi, yaitu memasukkan kode-kode ke dalam tabel yang telah tersedia dalam menggunakan *statistical software*. Tahap pengolahan data ini dilakukan oleh tim pakar dari Forum Ilmiah Kesehatan, dan proses ini difasilitasi oleh personal dari Dinas PPKBBPPPA Kabupaten Blitar, dengan pengawasan supervisor.
6. Proses analisis dan penyajian data yaitu melakukan analisis data menggunakan metode statistika deskriptif sebagai berikut:
    a. Analisis data kejadian pernikahan dini, yang terdiri atas:
        1) Proporsi kejadian pernikahan dini di setiap klaster berbasis kecamatan, menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *line diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
        2) Proyeksi proporsi kejadian pernikahan dini di setiap klaster berbasis kecamatan untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram.*
        3) Proporsi kejadian pernikahan dini di Kabupaten Blitar menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
        4) Proyeksi proporsi kejadian pernikahan dini di Kabupaten Blitar untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
    b. Analisis data peserta KB baru
        1) Proporsi peserta KB baru di setiap klaster berbasis kecamatan, menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *line diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
        2) Proyeksi proporsi peserta KB baru di setiap klaster berbasis kecamatan untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
        3) Proporsi peserta KB baru di Kabupaten Blitar menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.

4) Proyeksi proporsi peserta KB baru dini di Kabupaten Blitar untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
5) Proporsi peserta MKJP baru di setiap klaster berbasis kecamatan, menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *line diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
6) Proyeksi proporsi peserta MKJP baru di setiap klaster berbasis kecamatan untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
7) Proporsi peserta MKJP baru di Kabupaten Blitar menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
8) Proyeksi proporsi peserta MKJP baru dini di Kabupaten Blitar untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.

c. Analisis data peserta KB aktif
1) Proporsi peserta KB baru di setiap klaster berbasis kecamatan, menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *line diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
2) Proyeksi proporsi peserta KB baru di setiap klaster berbasis kecamatan untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
3) Proporsi peserta KB baru di Kabupaten Blitar menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
4) Proyeksi proporsi peserta KB baru dini di Kabupaten Blitar untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
5) Proporsi peserta MKJP baru di setiap klaster berbasis kecamatan, menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *line diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
6) Proyeksi proporsi peserta MKJP baru di setiap klaster berbasis kecamatan untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.

7) Proporsi peserta MKJP baru di Kabupaten Blitar menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
8) Proyeksi proporsi peserta MKJP baru dini di Kabupaten Blitar untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.

d. Analisis data *unmet need*

1) Proporsi kejadian *unmet need* di setiap klaster berbasis kecamatan, menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *line diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
2) Proyeksi proporsi kejadian *unmet need* di setiap klaster berbasis kecamatan untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.
3) Proporsi kejadian *unmet need* di Kabupaten Blitar menurut waktu dalam 12 bulan terakhir, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram* yang dilengkapi dengan *linear trendline* untuk kepentingan prediksi.
4) Proyeksi proporsi kejadian *unmet need* di Kabupaten Blitar untuk 13 bulan berikutnya, dengan penyajian data menggunakan *bar diagram*.

7. Penyusunan draft laporan secara lengkap.
8. Penyajian draft laporan kepada Kepala Dinas PPKBPPPPA Kabupaten Blitar dan pemberian masukan
9. Penyusunan laporan secara lengkap dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
10. Diseminasi dan publikasi laporan

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, data yang berkaitan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berhasil dikumpulkan secara lengkap. Data tersebut mencakup kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2018. Berdasarkan data tersebut disusun persamaan linier yang bisa digunakan untuk memprediksikan data pembangunan kependudukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020.

Data berhasil dikumpulkan dari seluruh klaster di Wilayah Kabupaten Blitar, yang diwakili oleh wilayah administratif pemerintahan yakni 22 kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Wonodadi, 2) Kecamatan Udanawu, 3) Kecamatan Srengat, 4) Kecamatan Kademangan, 5) Kecamatan Bakung, 6) Kecamatan Ponggok, 7) Kecamatan Sanankulon, 8) Kecamatan Wonotirto, 9) Kecamatan Nglegok, 10) Kecamatan Kanigoro, 11) Kecamatan Garum, 12) Kecamatan Sutojayan, 13) Kecamatan Panggungrejo, 14) Kecamatan Talun, 15) Kecamatan Gandusari, 16) Kecamatan Binangun, 17) Kecamatan Wlingi, 18) Kecamatan Doko, 19) Kecamatan Kesamben, 20) Kecamatan Wates, 21) Kecamatan Selorejo, 22) Kecamatan Selopuro.

E. Kejadian Pernikahan Dini

A.1. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wonodadi

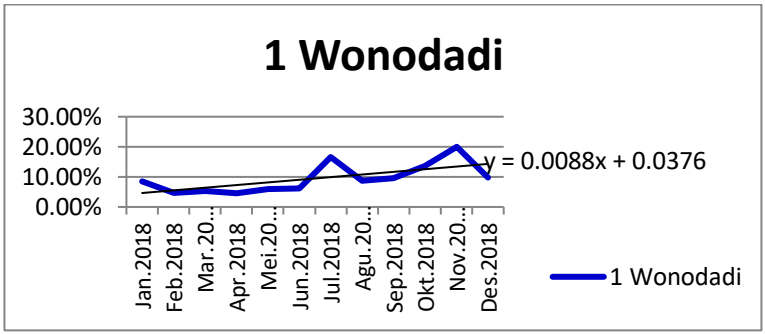

Gambar 4A1a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada tahun 2018

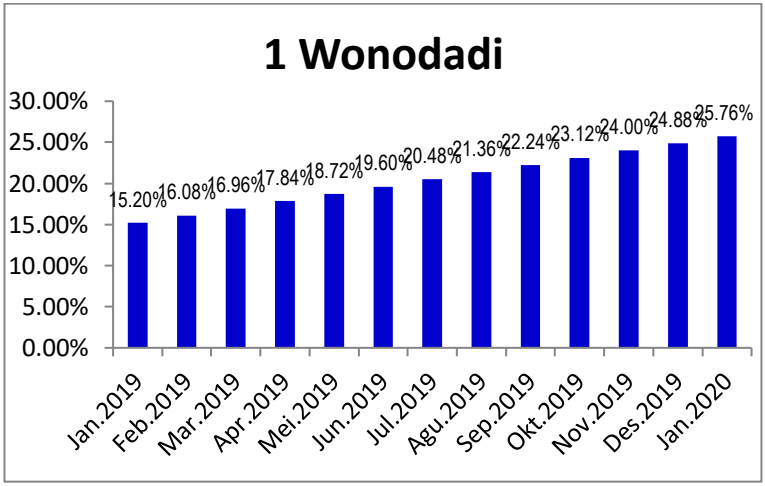

Gambar 4A1b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Wonodadi selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.2. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Udanawu

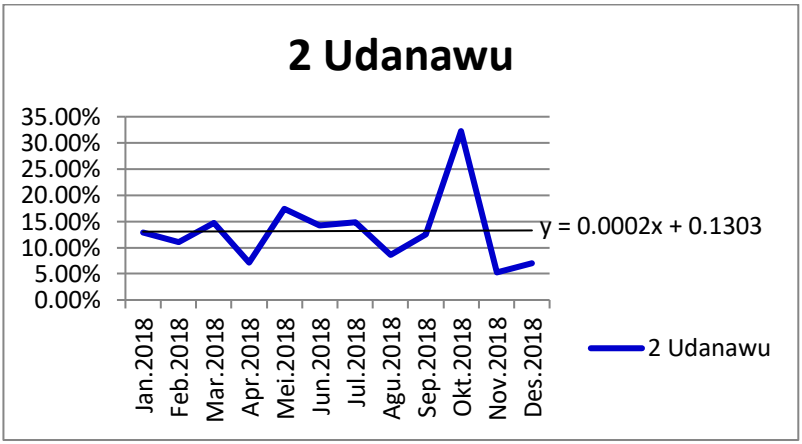

Gambar 4A2a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada tahun 2018

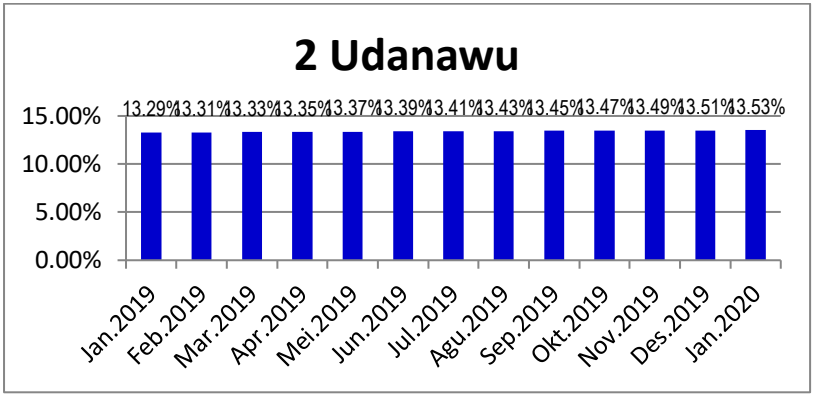

Gambar 4A2b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Udanawu selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.3. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Srengat

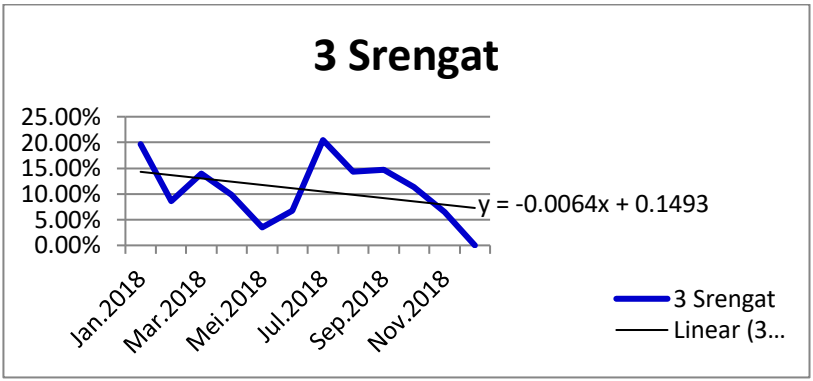

Gambar 4A3a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada tahun 2018

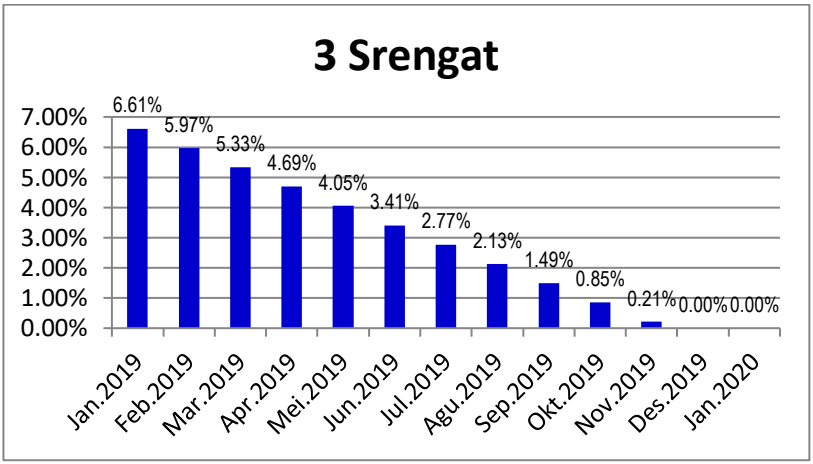

Gambar 4A3b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Srengat selama tahun 2019 hingga awal 2020, hingga pada angka 0.

A.4. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kademangan

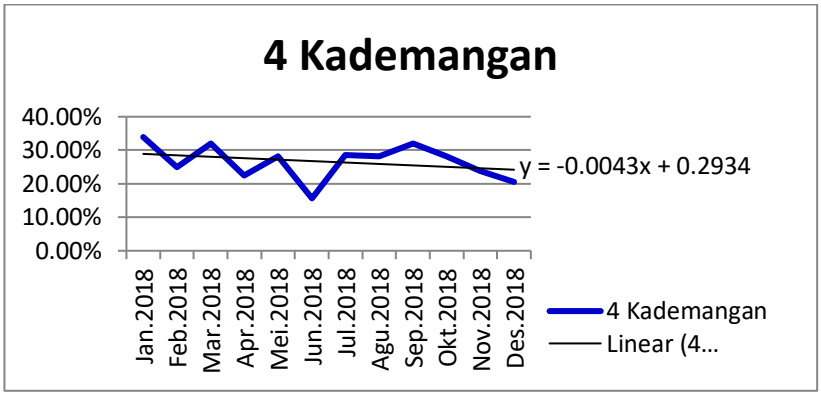

Gambar 4A4a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada tahun 2018

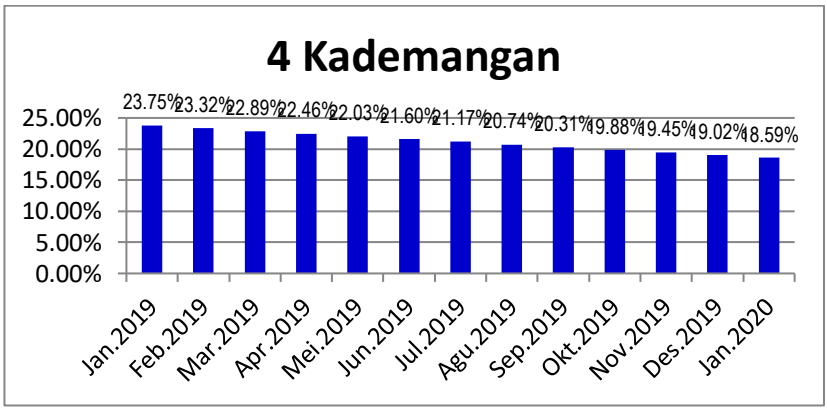

Gambar 4A4b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit penurunan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Kademangan selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.5. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Bakung

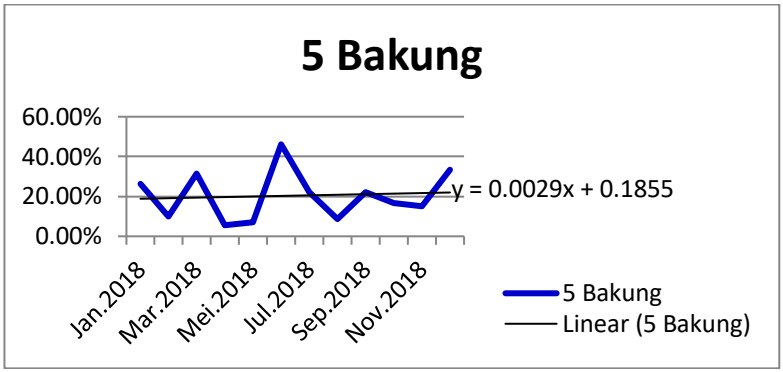

Gambar 4A5a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada tahun 2018

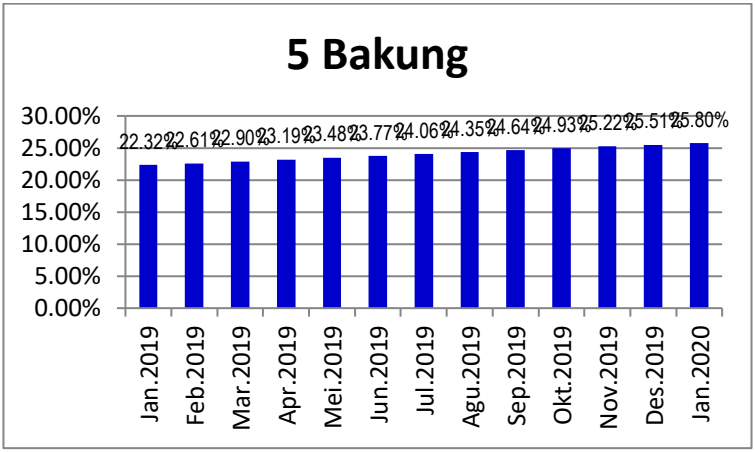

Gambar 4A5b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Bakung selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.6. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Ponggok

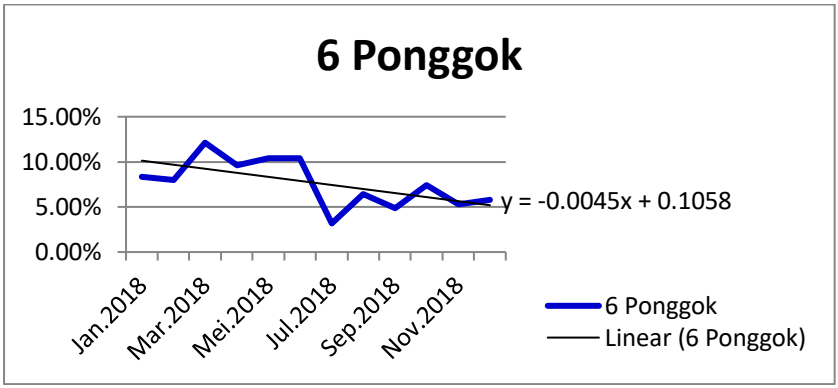

Gambar 4A6a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada tahun 2018

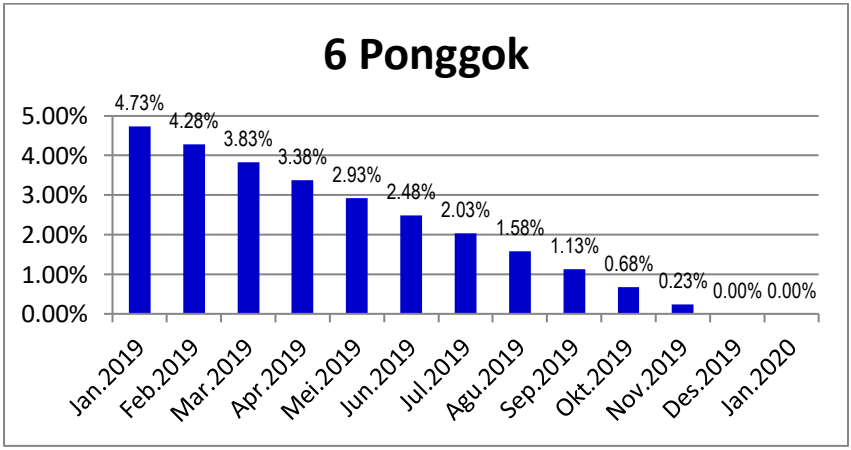

Gambar 4A6b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Ponggok selama tahun 2019 hingga awal 2020, hingga mencapai angka 0.

A.7. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sanan Kulon

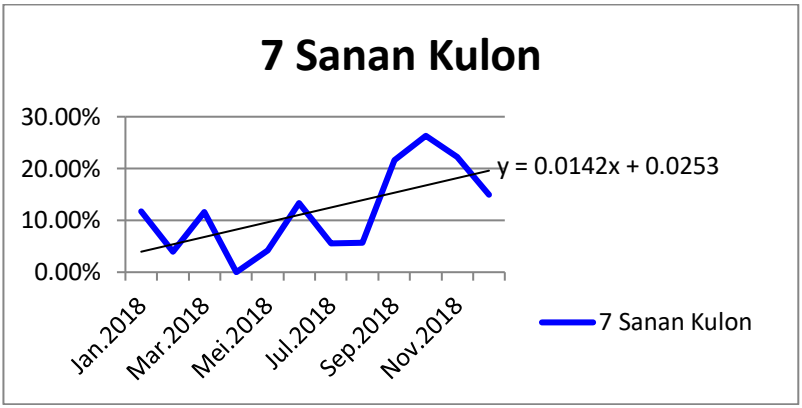

Gambar 4A7a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada tahun 2018

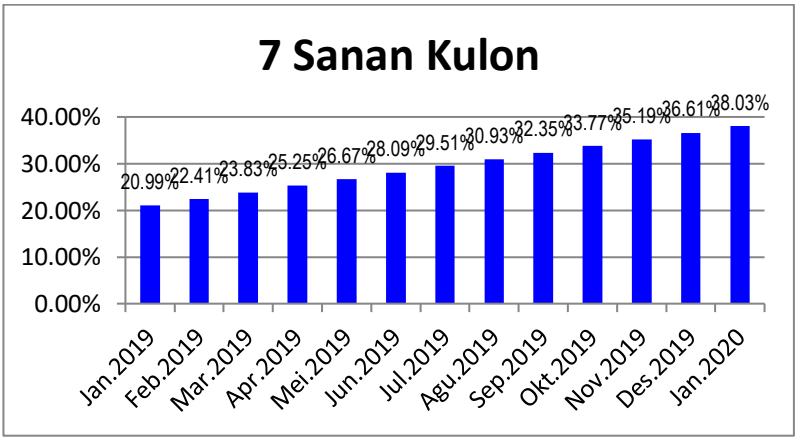

Gambar 4A7b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sanan Kulon selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.8. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wonotirto

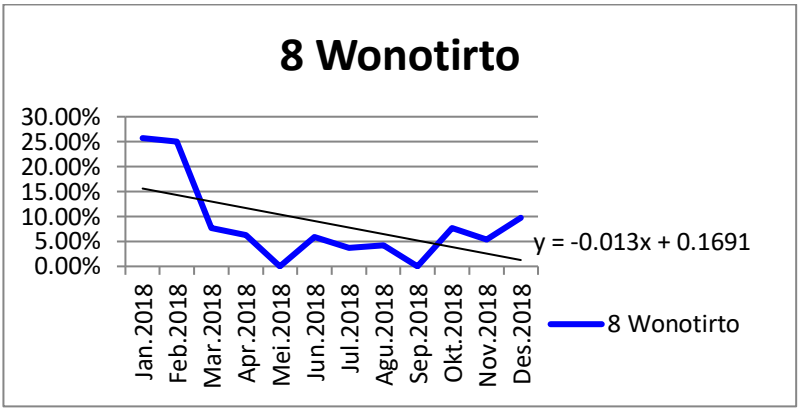

Gambar 4A8a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada tahun 2018

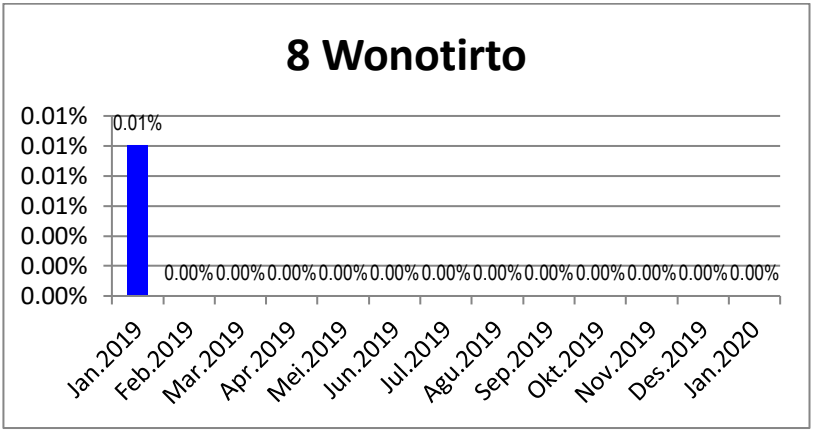

Gambar 4A8b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sanan Kulon selama tahun 2019 hingga awal 2020, hingga mencapai angka 0.

A.9. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Nglegok

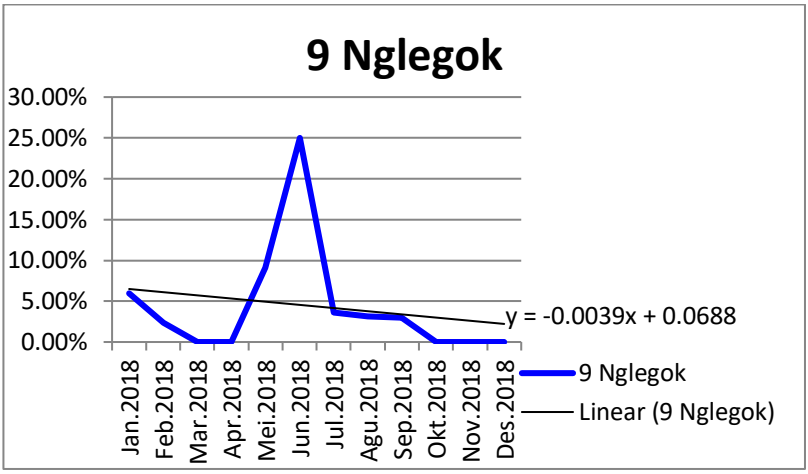

Gambar 4A9a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tahun 2018

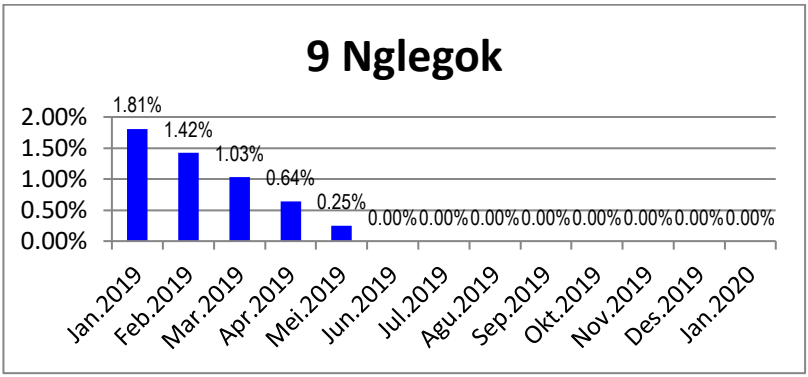

Gambar 4A9b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Nglegok selama tahun 2019 hingga awal 2020, hingga mencapai angka 0.

A.10. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kanigoro

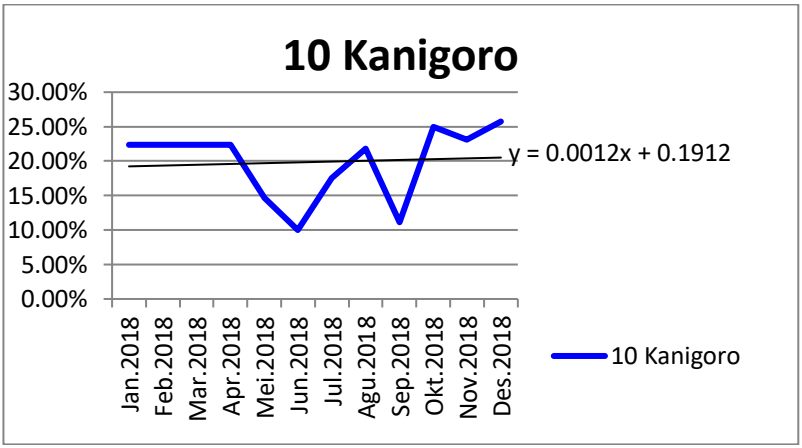

Gambar 4A10a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada tahun 2018

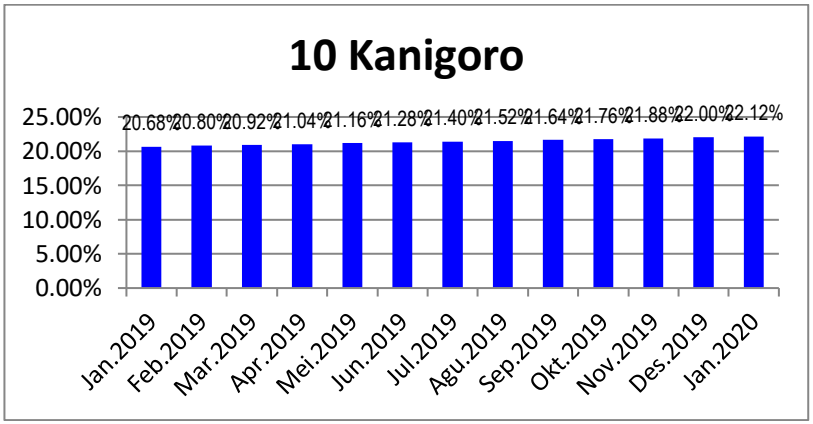

Gambar 4A10b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Kanigoro selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.11. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Garum

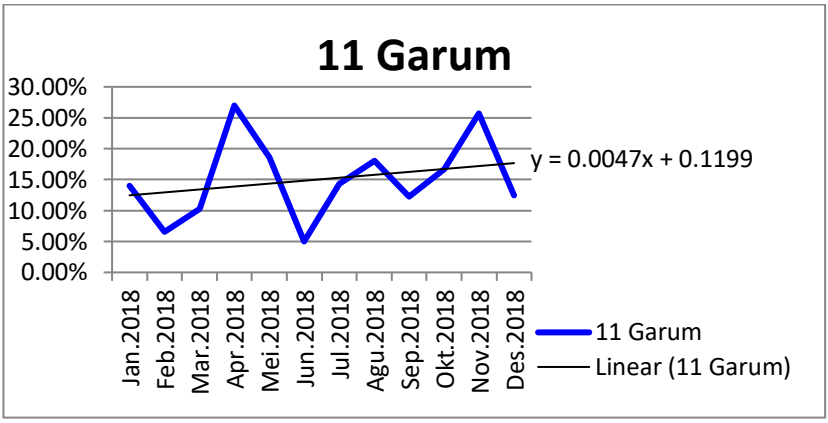

Gambar 4A11a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tahun 2018

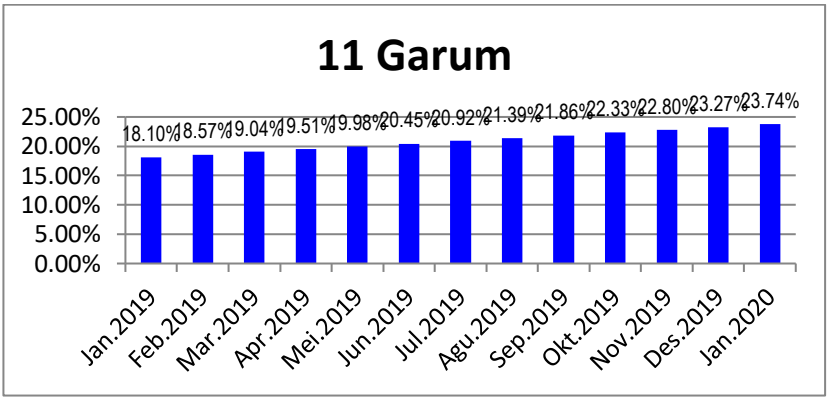

Gambar 4A11b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Garum selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.12. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sutojayan

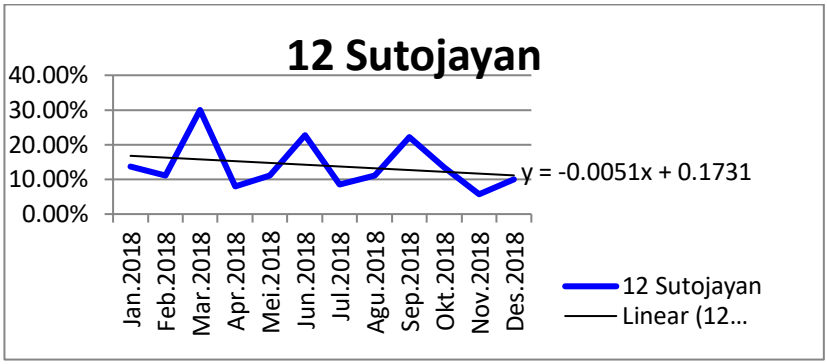

Gambar 4A12a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada tahun 2018

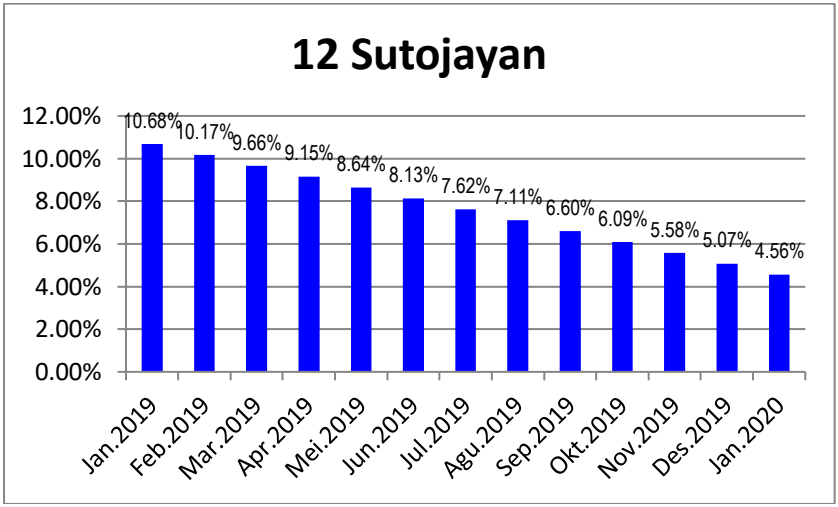

Gambar 4A12b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sutojayan selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.13. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Panggungrejo

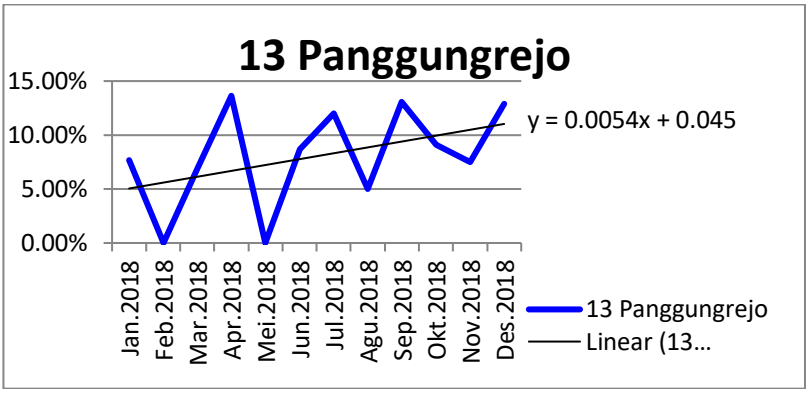

Gambar 4A13a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada tahun 2018

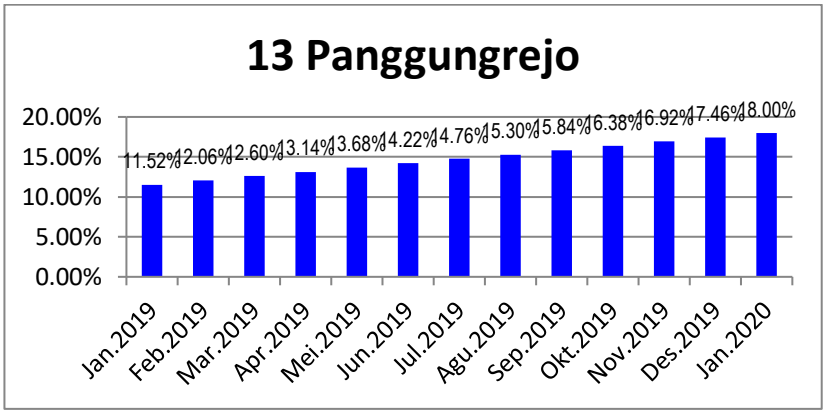

Gambar 4A13b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Panggungrejo selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.14. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Talun

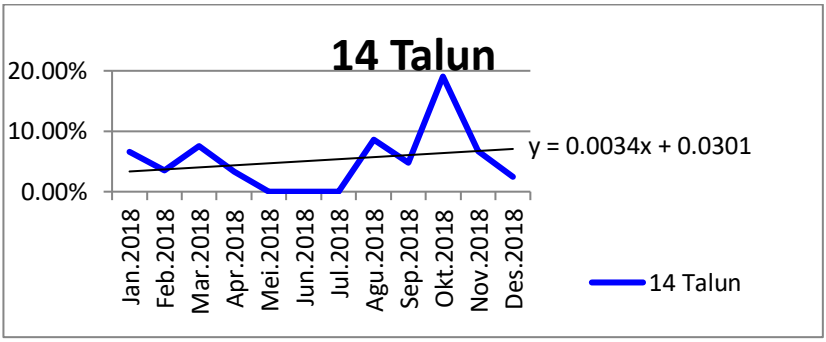

Gambar 4A14a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun 2018

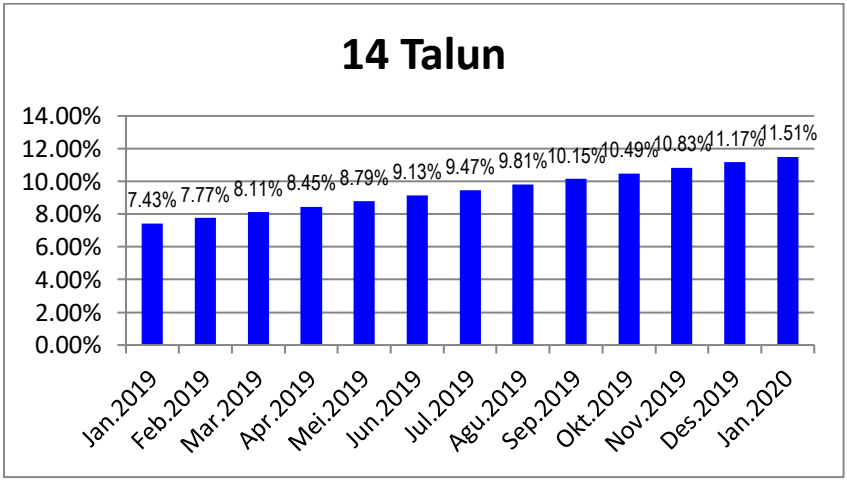

Gambar 4A14b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Talun selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.15. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Gandusari

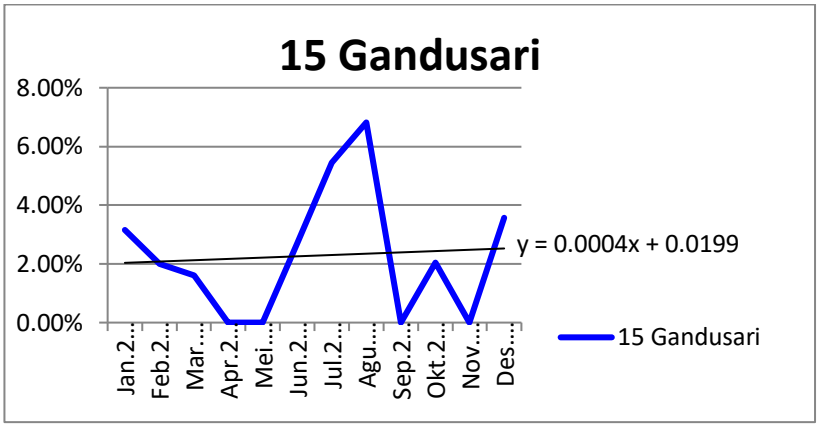

Gambar 4A15a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada tahun 2018

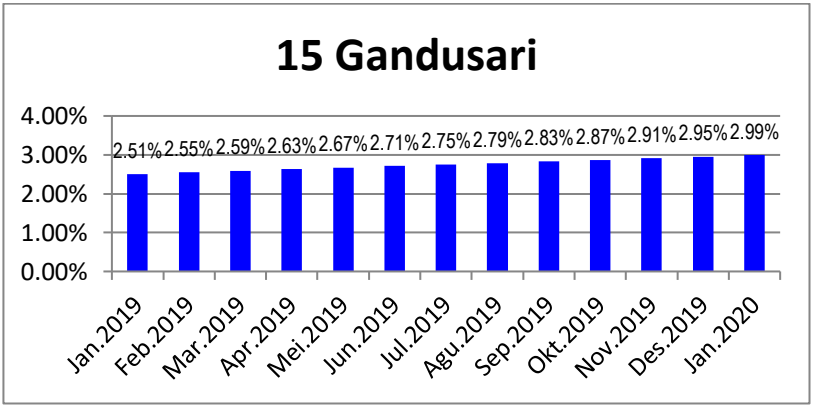

Gambar 4A15b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Gandusari selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.16. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Binangun

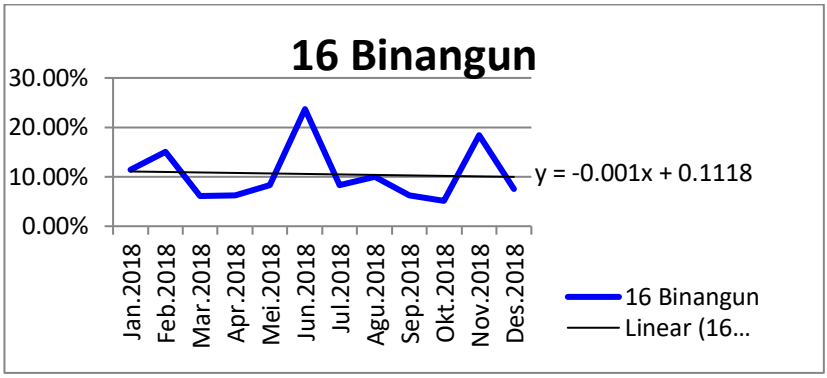

Gambar 4A16a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada tahun 2018

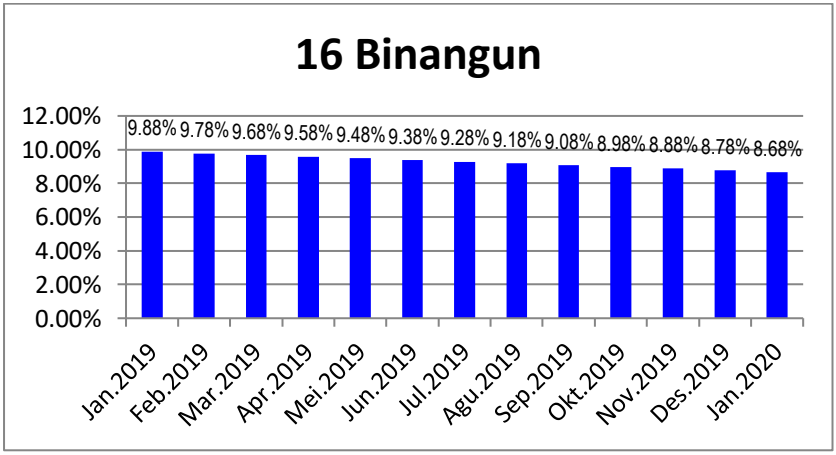

Gambar 4A16b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit penurunan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Binangun selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.17. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wlingi

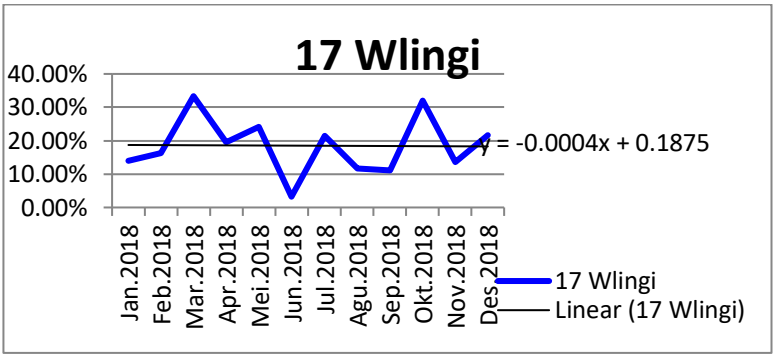

Gambar 4A17a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada tahun 2018

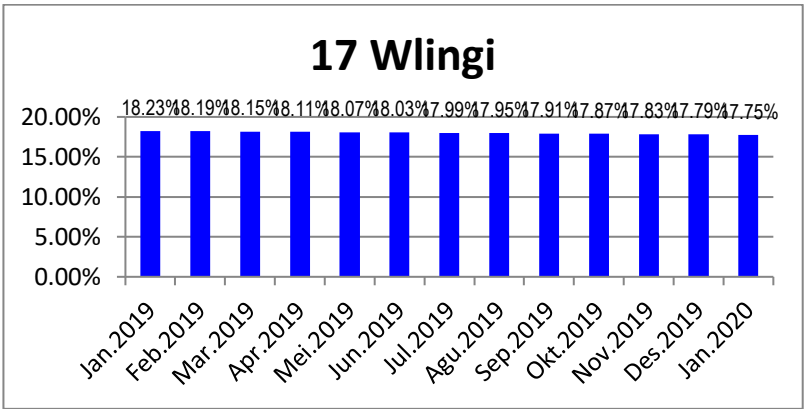

Gambar 4A17b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit penurunan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Wlingi selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.18. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Doko

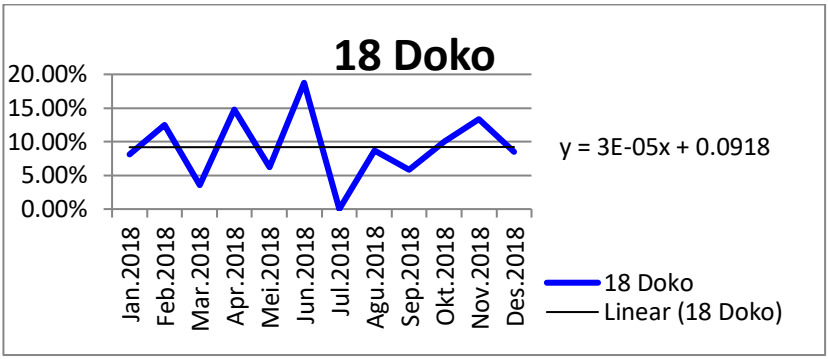

Gambar 4A18a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada tahun 2018

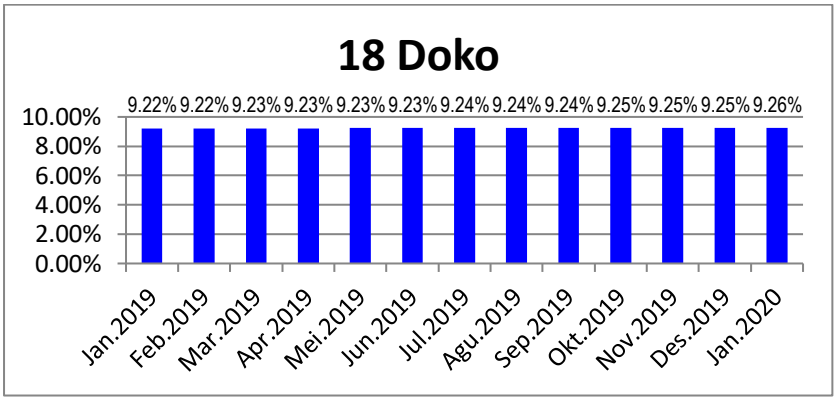

Gambar 4A18b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Doko selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.19. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kesamben

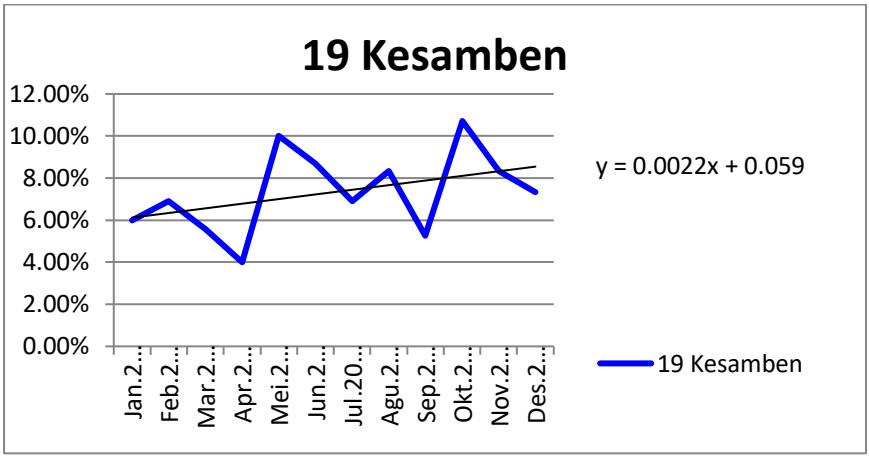

Gambar 4A19a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tahun 2018

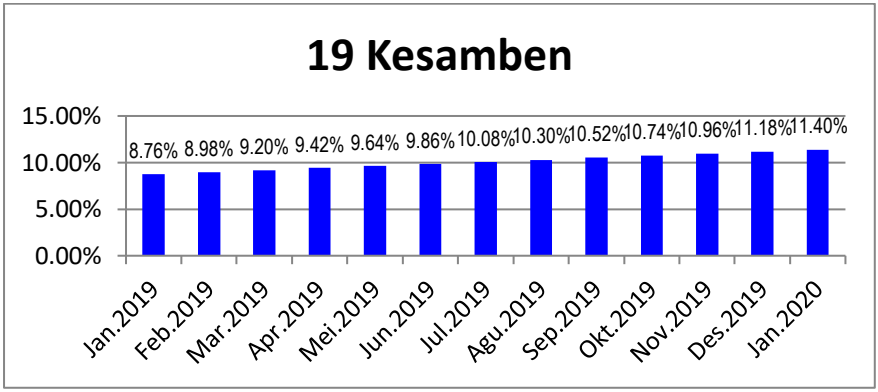

Gambar 4A19b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Kesamben selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.20. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wates

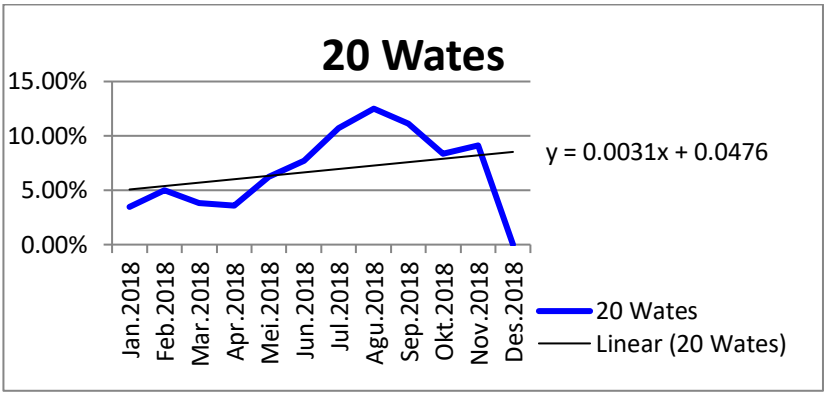

Gambar 4A20a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada tahun 2018

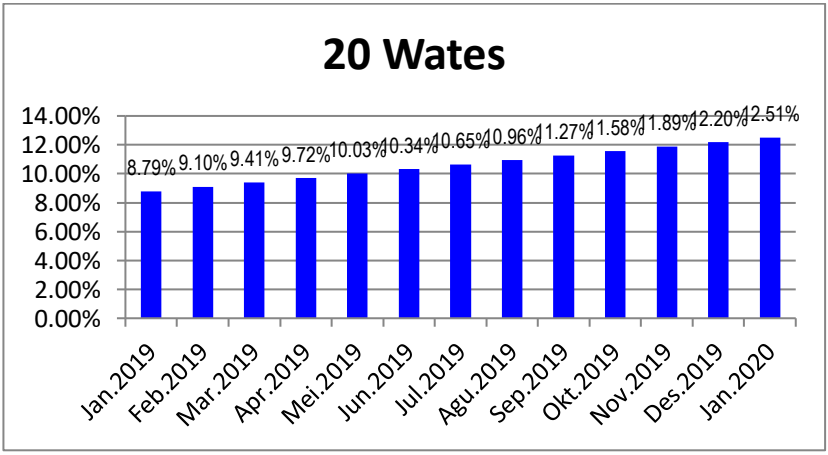

Gambar 4A20b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Wates selama tahun 2019 hingga awal 2020.

A.21. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Selorejo

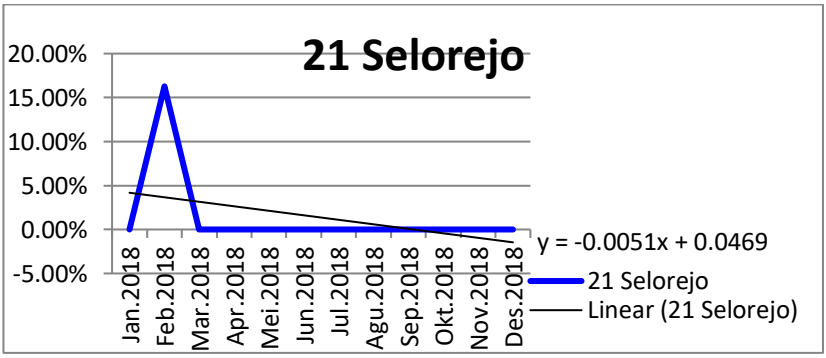

Gambar 4A21a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada tahun 2018

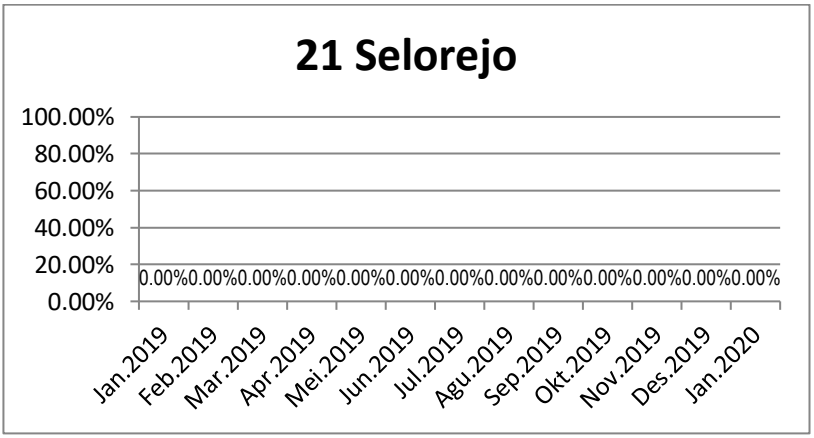

Gambar 4A21b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Selorejo selama tahun 2019 hingga awal 2020, hingga mencapai angka 0.

A.22. Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Selopuro

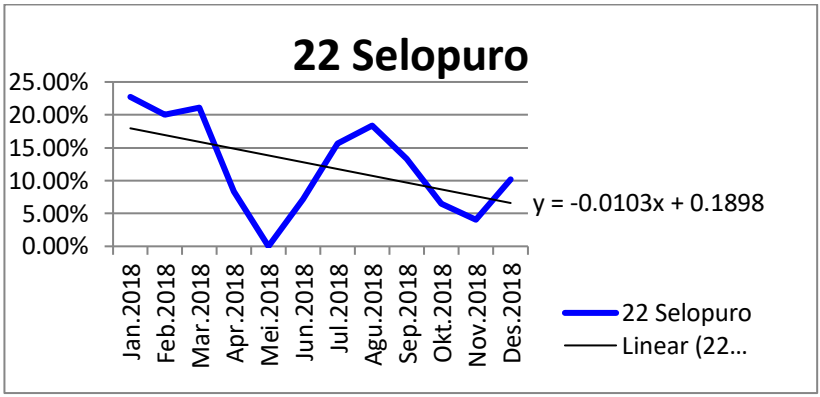

Gambar 4A22a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada tahun 2018

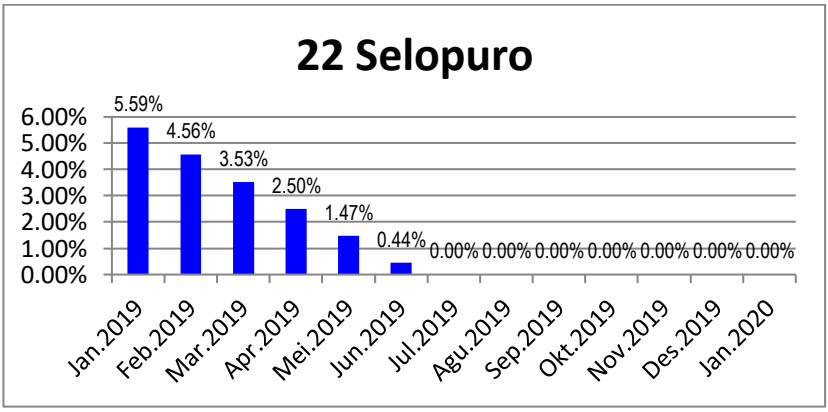

Gambar 4A22b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan tajam kejadian pernikahan dini di Kecamatan Selopuro selama tahun 2019 hingga awal 2020, hingga mencapai angka 0.

A.23. Kejadian Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar

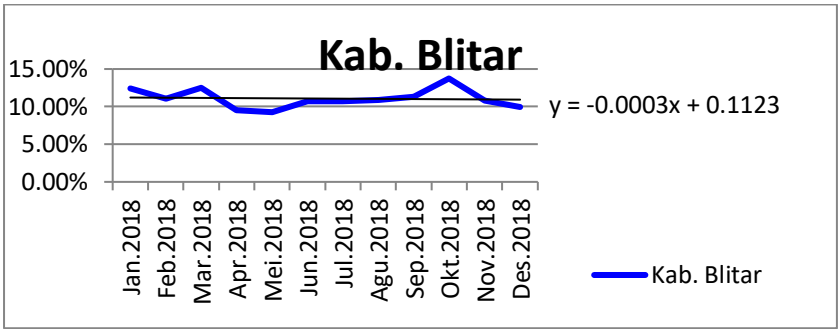

Gambar 4A23a. Kecenderungan Kejadian Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar pada tahun 2018

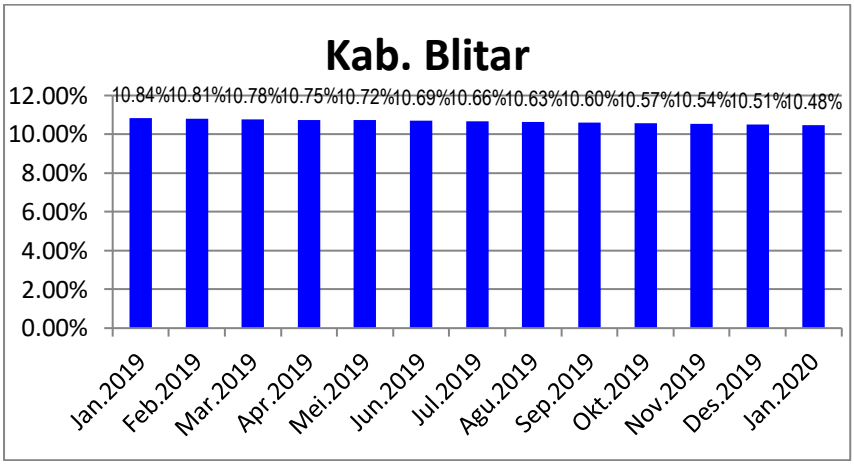

Gambar 4A23b. Proyeksi Kejadian Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi sedikit penurunan kejadian pernikahan dini di Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

F. Peserta KB Baru

B.1. Peserta KB Baru di Kecamatan Wonodadi

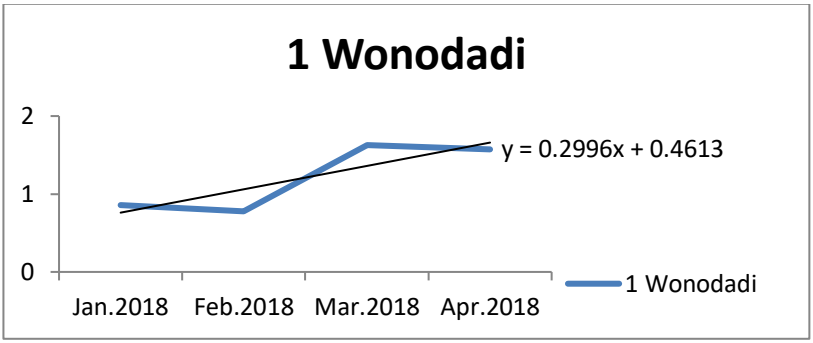

Gambar 4B1a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

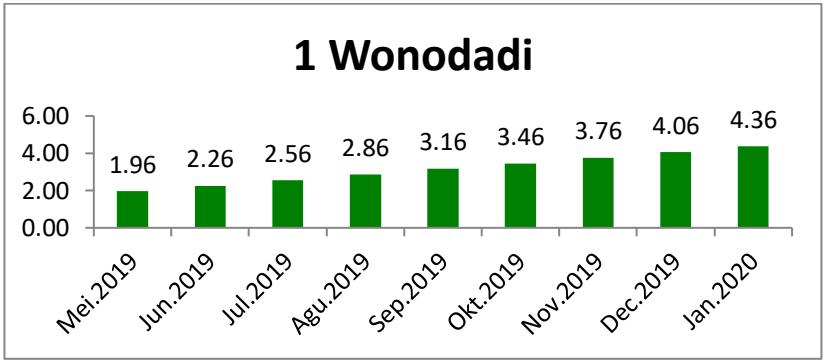

Gambar 4A1b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB baru di Kecamatan Wonodadi selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.2. Peserta KB Baru di Kecamatan Udanawu

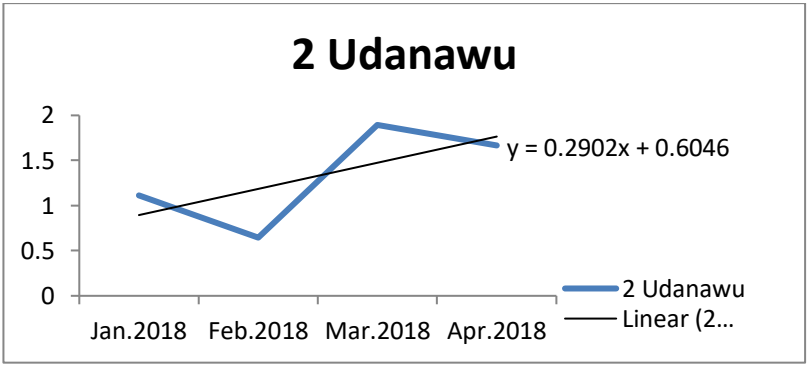

Gambar 4B2a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

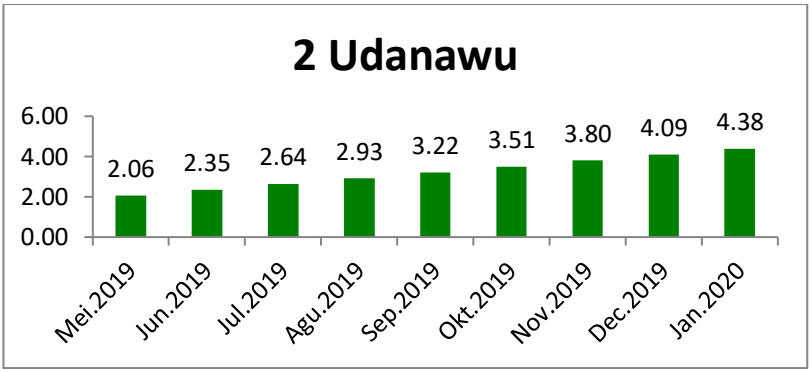

Gambar 4B2b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB baru yang cukup tajam di Kecamatan Udanawu selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.3. Peserta KB Baru di Kecamatan Srengat

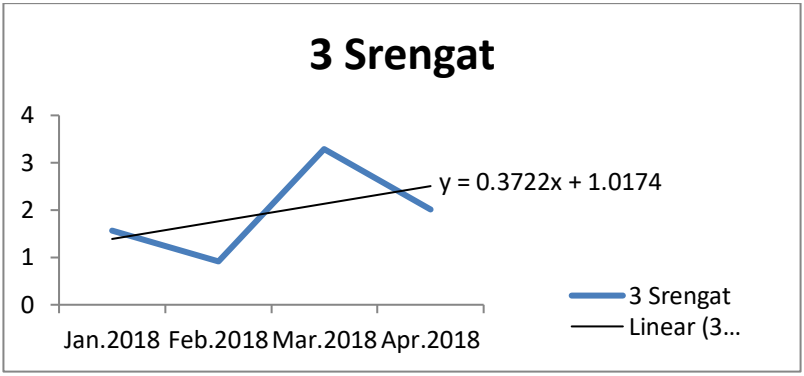

Gambar 4B3a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

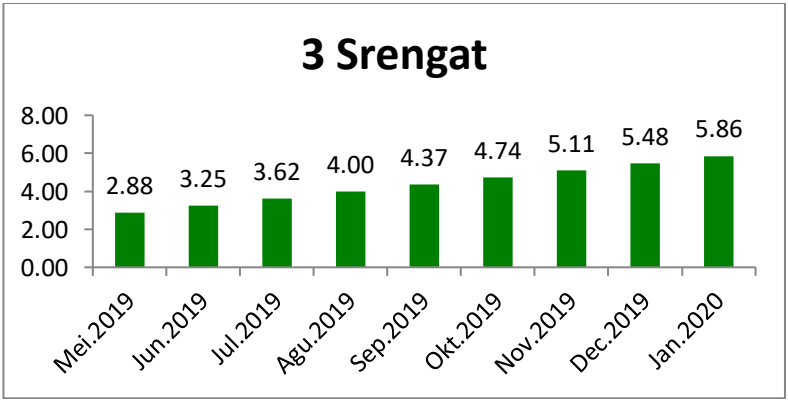

Gambar 4B3b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB baru di Kecamatan Udanawu selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.4. Peserta KB Baru di Kecamatan Kademangan

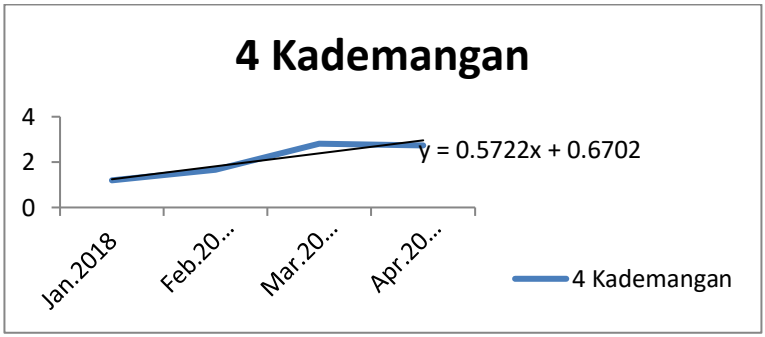

Gambar 4B4a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

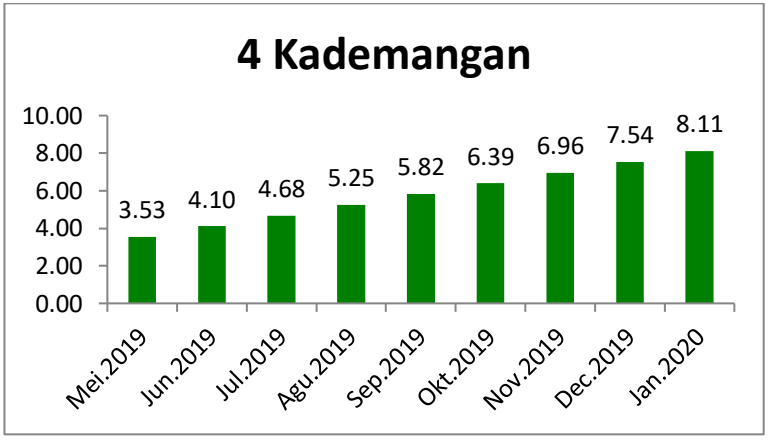

Gambar 4B4b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan secara tajam peserta KB baru di Kecamatan Kademangan selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.5. Peserta KB Baru di Kecamatan Bakung

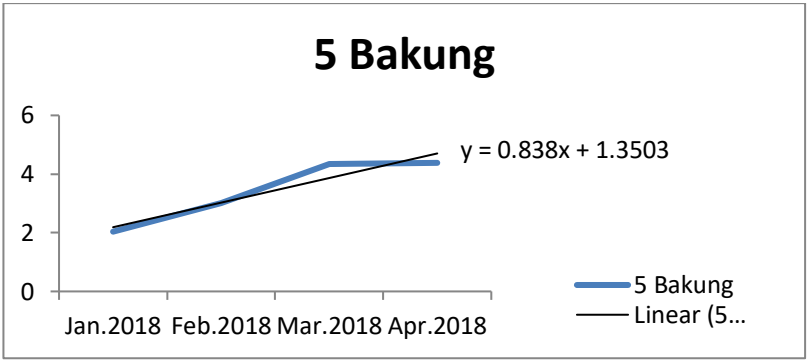

Gambar 4B5a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

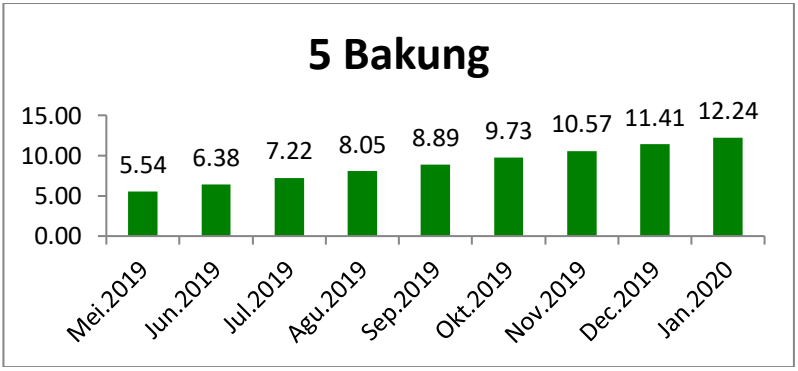

Gambar 4B5b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan secara tajam peserta KB baru di Kecamatan Bakung selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.6. Peserta KB Baru di Kecamatan Ponggok

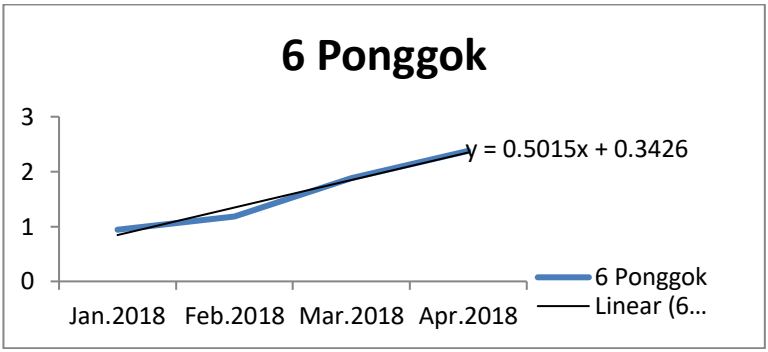

Gambar 4B6a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

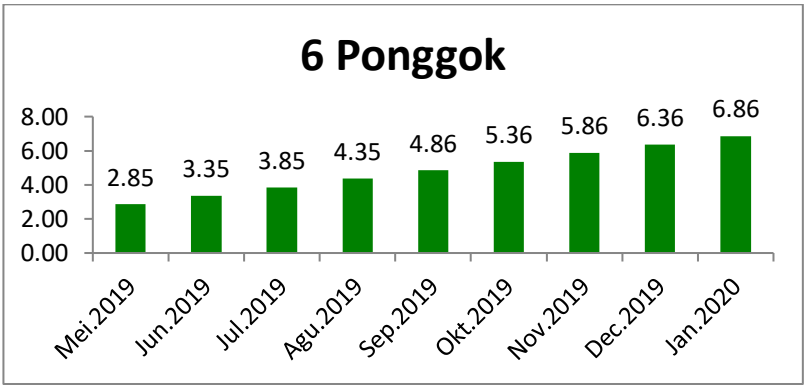

Gambar 4B6b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan secara tajam peserta KB baru di Kecamatan Ponggok selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.7. Peserta KB Baru di Kecamatan Sanan Kulon

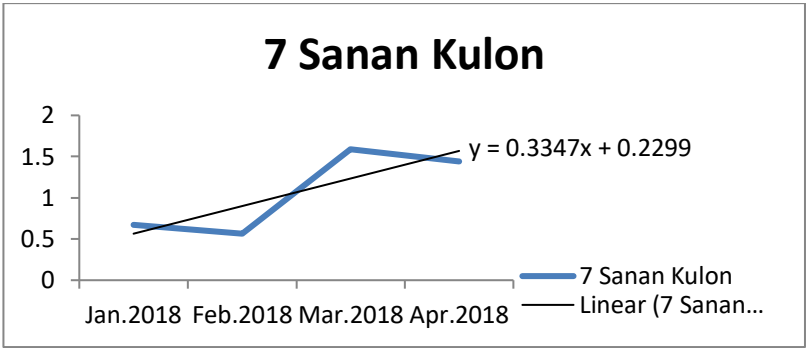

Gambar 4B7a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

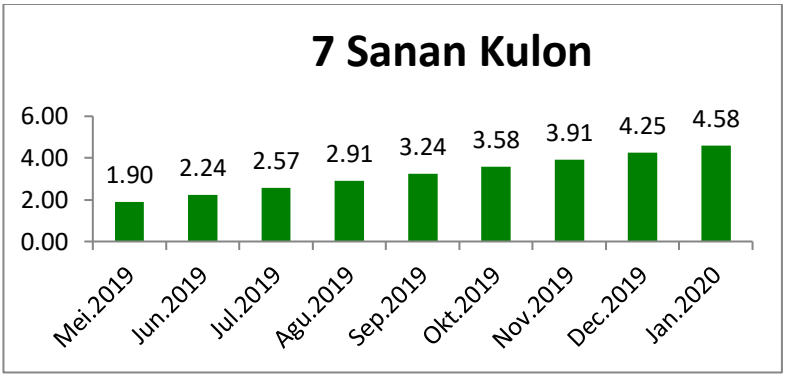

Gambar 4B7b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan secara tajam peserta KB baru di Kecamatan Sanan Kulon selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.8. Peserta KB Baru di Kecamatan Wonotirto

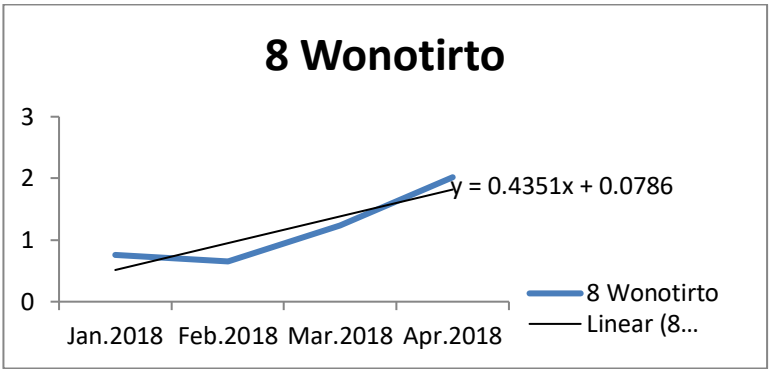

Gambar 4B8a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

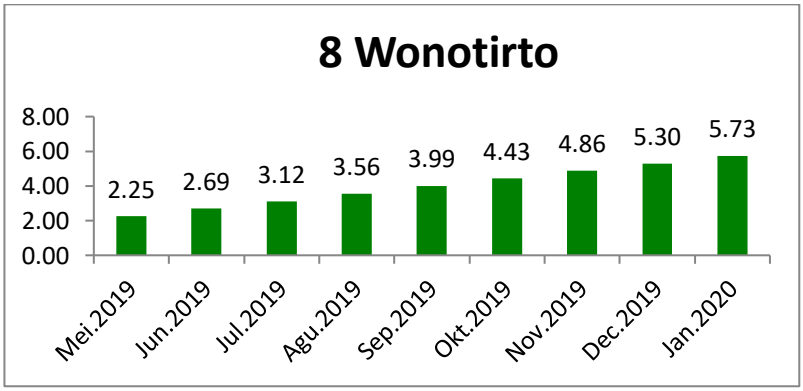

Gambar 4B8b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan secara tajam peserta KB baru di Kecamatan Wonotirto selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.9. Peserta KB Baru di Kecamatan Nglegok

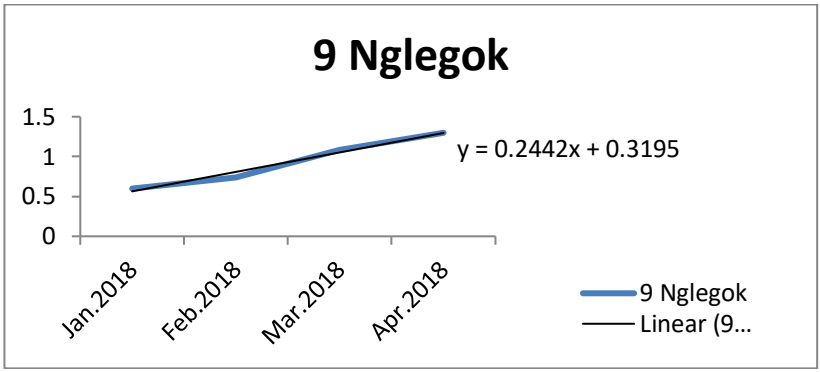

Gambar 4B9a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

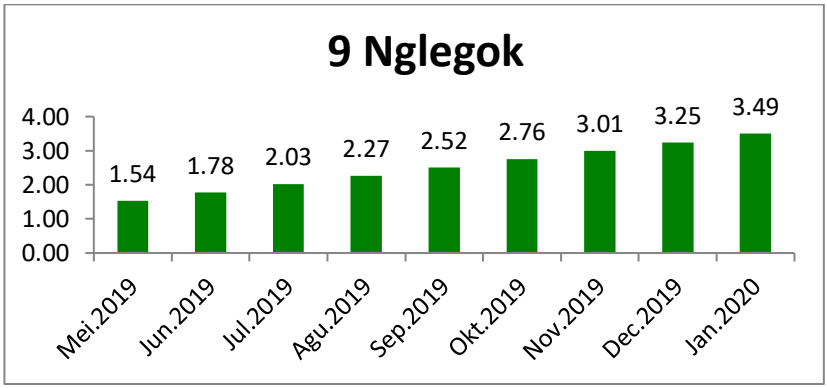

Gambar 4B9b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan secara tajam peserta KB baru di Kecamatan Nglegok selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.10. Peserta KB Baru di Kecamatan Kanigoro

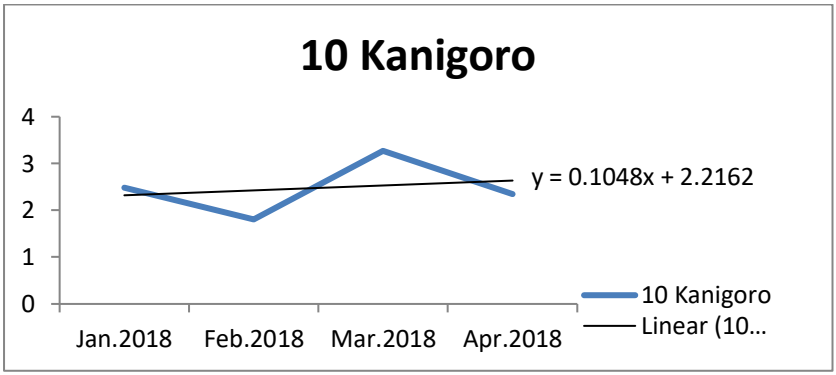

Gambar 4B10a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

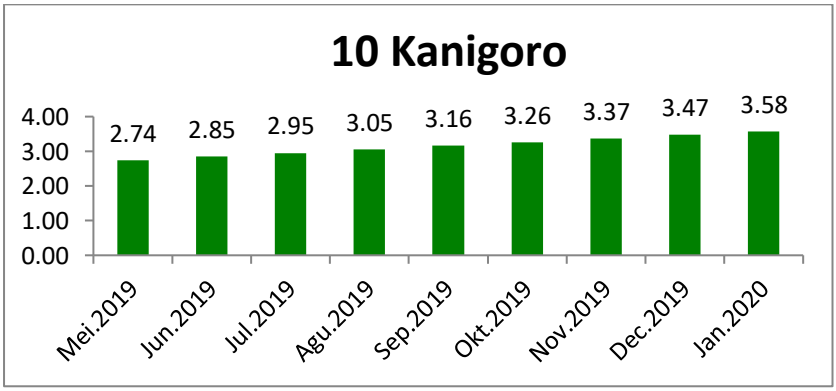

Gambar 4B10b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB baru di Kecamatan Kanigoro selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.11. Peserta KB Baru di Kecamatan Garum

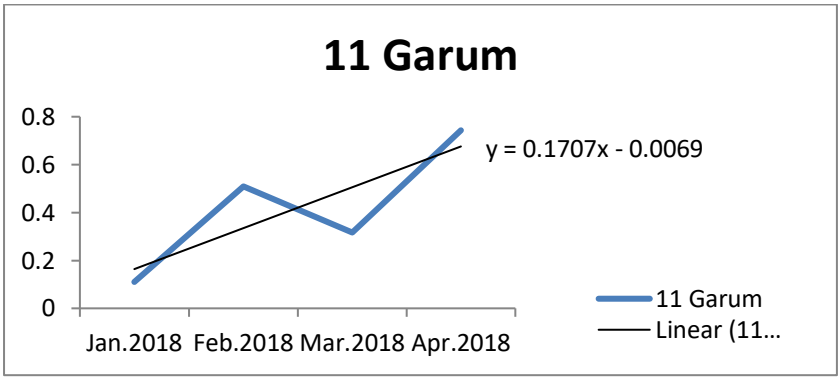

Gambar 4B11a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

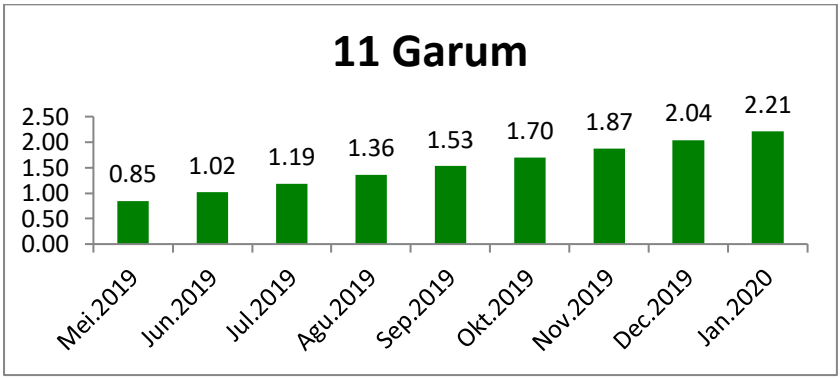

Gambar 4B11b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Garum selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.12. Peserta KB Baru di Kecamatan Sutojayan

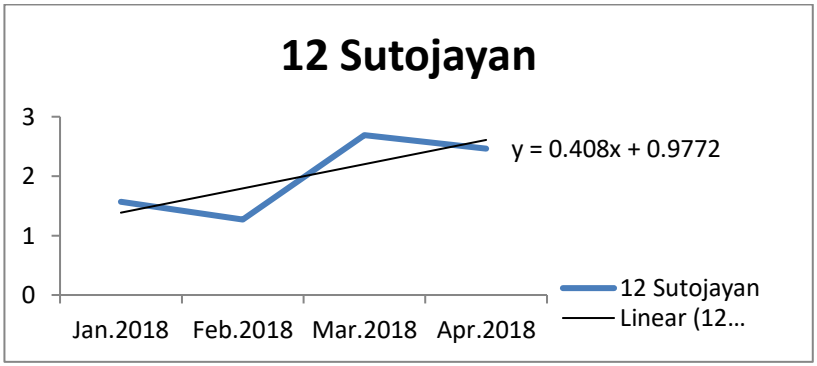

Gambar 4B12a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

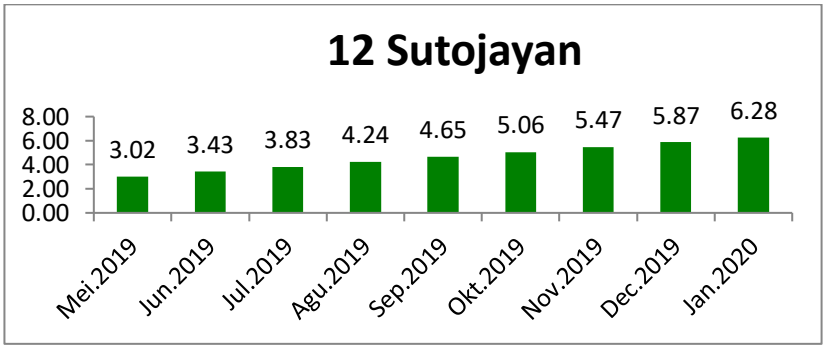

Gambar 4B12b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Sutojayan selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.13. Peserta KB Baru di Kecamatan Panggungrejo

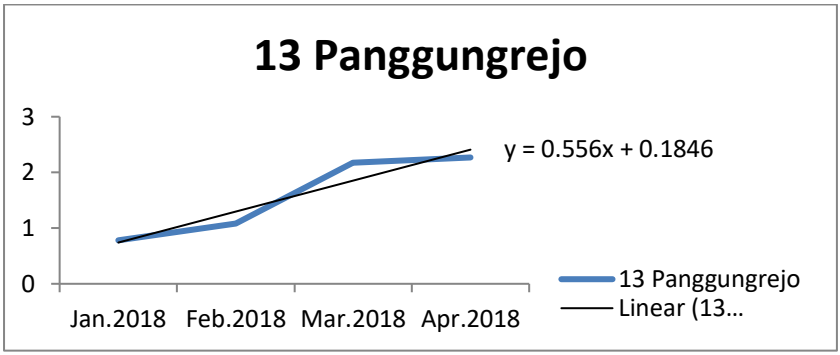

Gambar 4B13a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

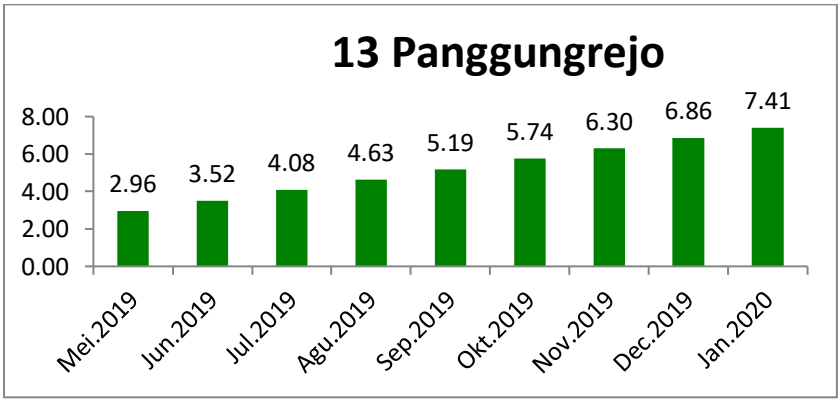

Gambar 4B13b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Panggungrejo selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.14. Peserta KB Baru di Kecamatan Talun

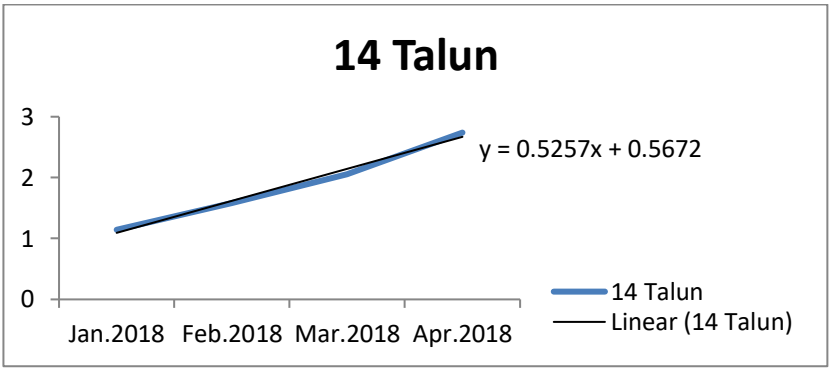

Gambar 4B14a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

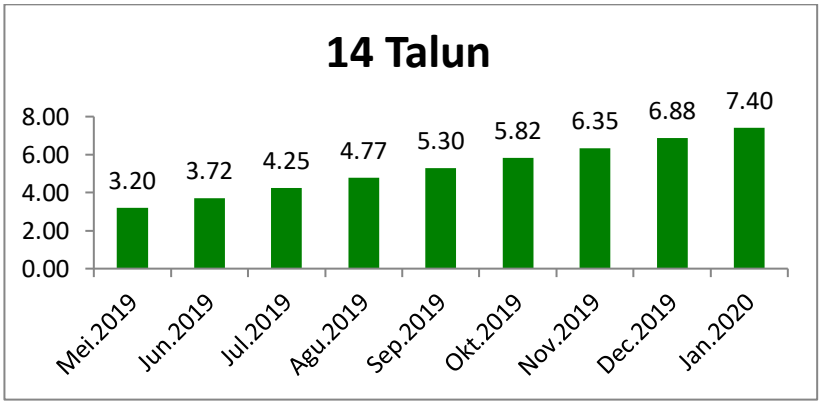

Gambar 4B14b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Talun selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.15. Peserta KB Baru di Kecamatan Gandusari

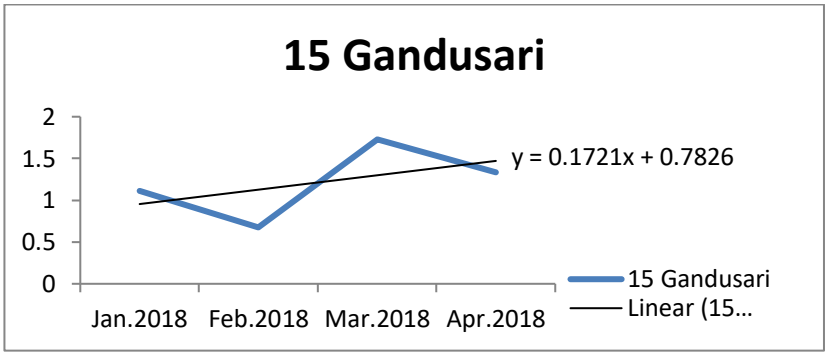

Gambar 4B15a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

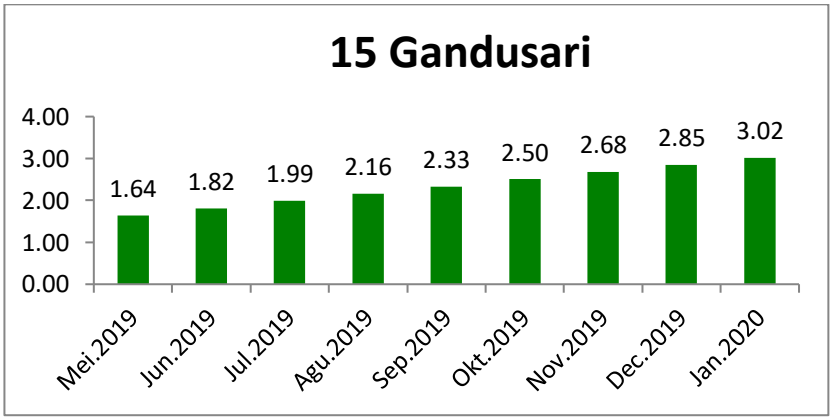

Gambar 4B15b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB baru di Kecamatan Gandusari selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.16. Peserta KB Baru di Kecamatan Binangun

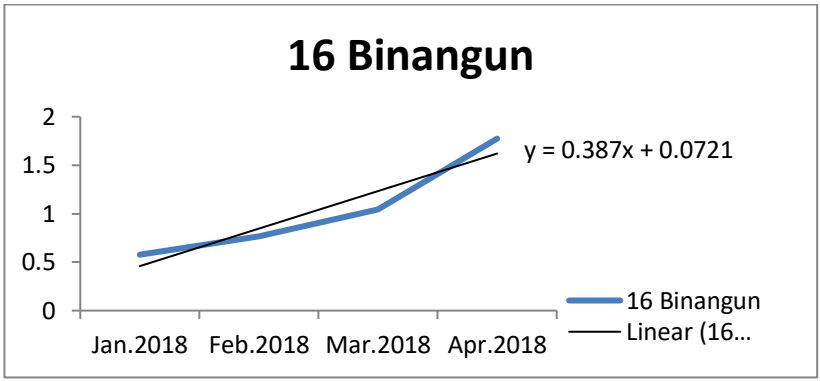

Gambar 4B16a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

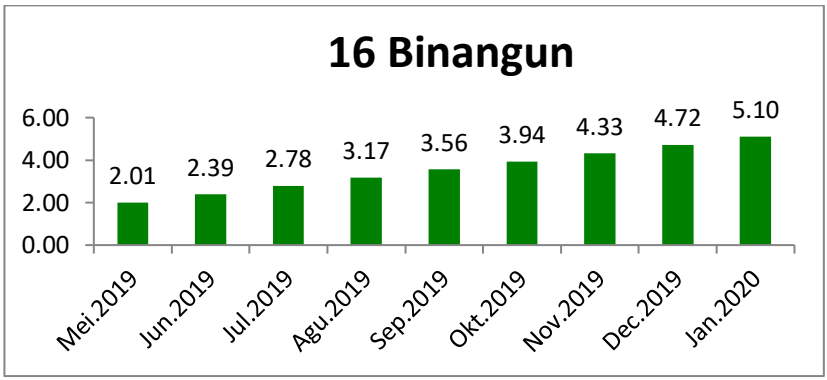

Gambar 4B16b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Binangun selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.17. Peserta KB Baru di Kecamatan Wlingi

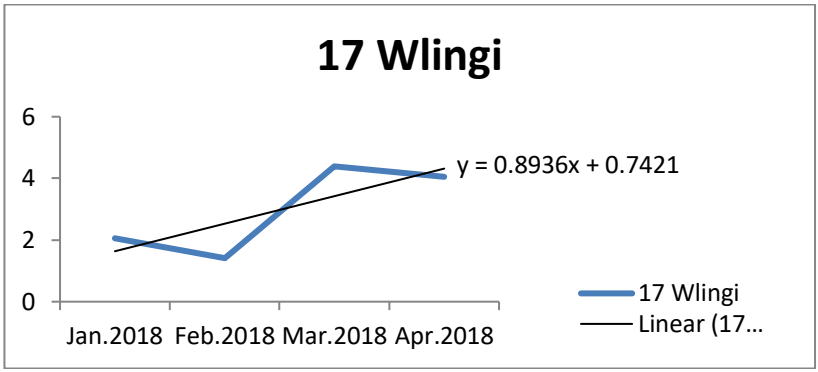

Gambar 4B17a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

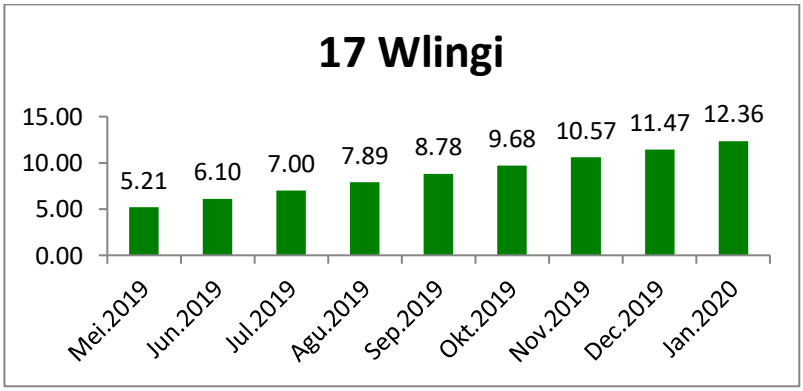

Gambar 4B17b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Wlingi selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.18. Peserta KB Baru di Kecamatan Doko

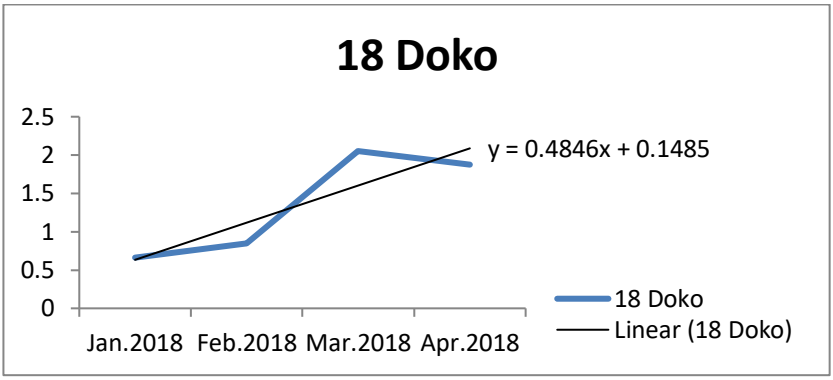

Gambar 4B18a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

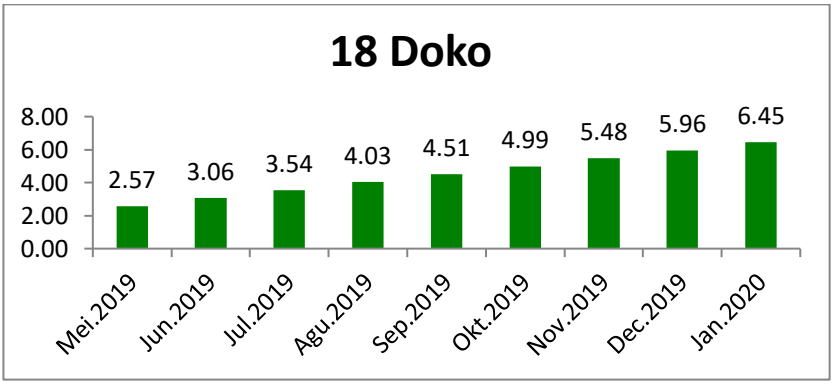

Gambar 4B18b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Doko selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.19. Peserta KB Baru di Kecamatan Kesamben

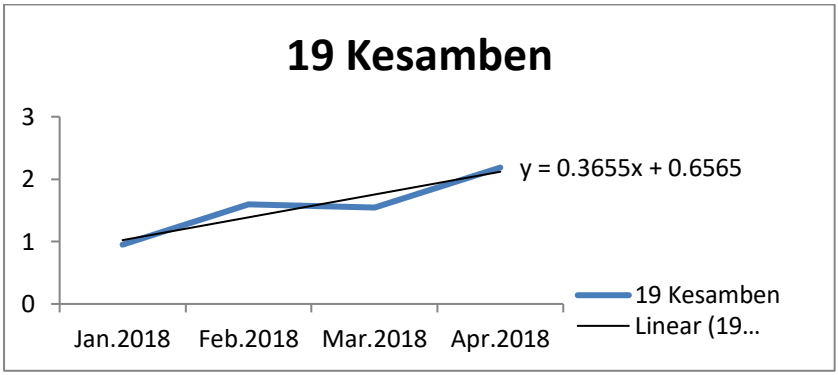

Gambar 4B19a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

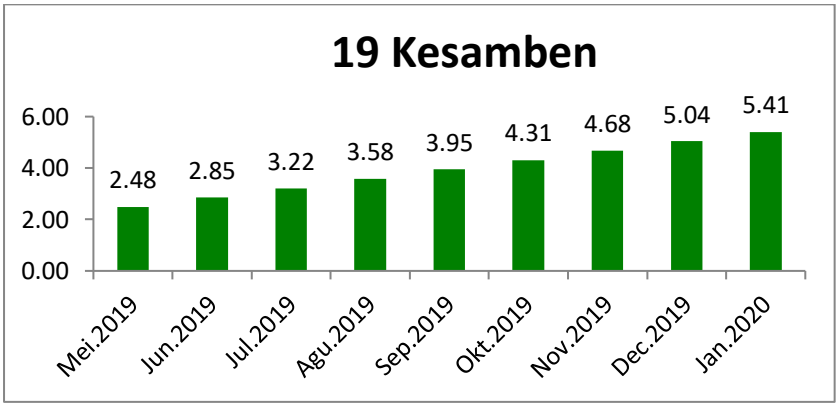

Gambar 4B19b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Kesamben selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.20. Peserta KB Baru di Kecamatan Wates

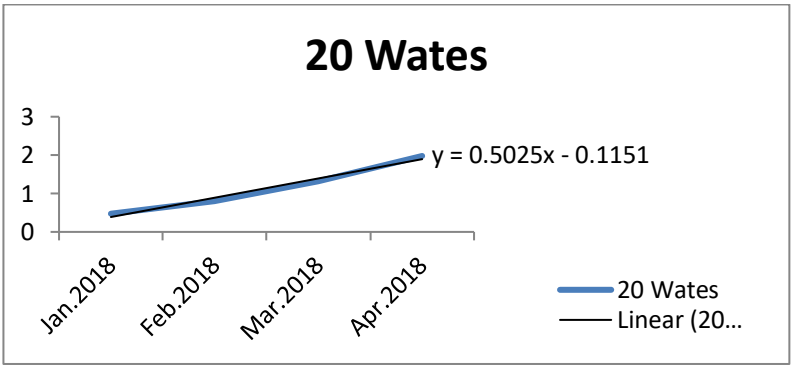

Gambar 4B20a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

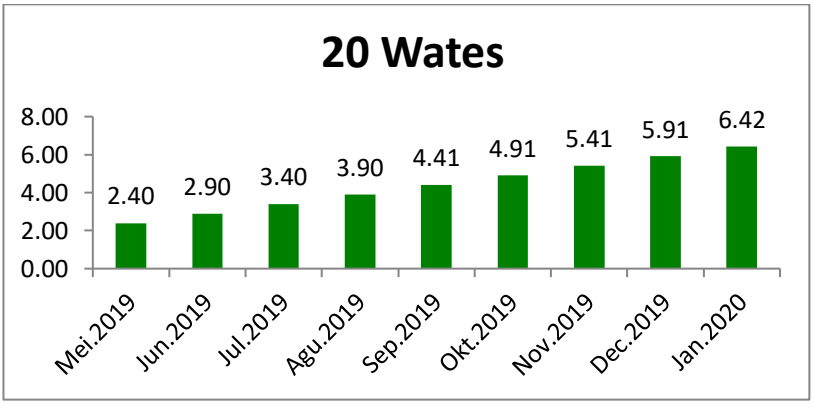

Gambar 4B20b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Wates selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.21. Peserta KB Baru di Kecamatan Selorejo

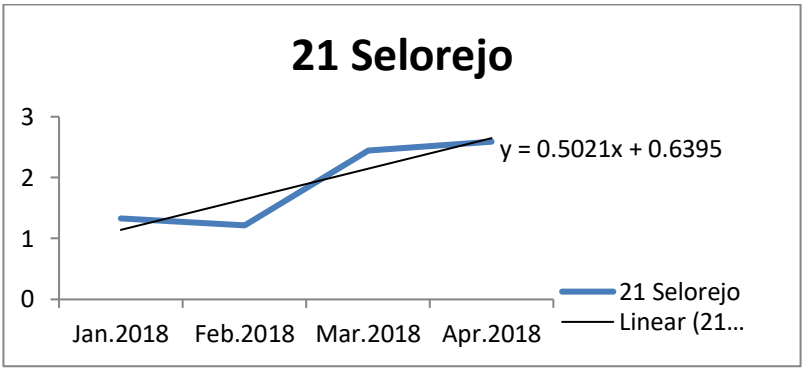

Gambar 4B21a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

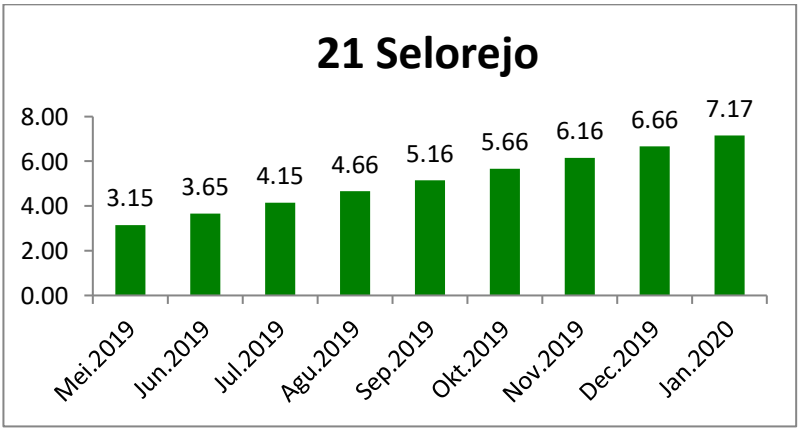

Gambar 4B21b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Selorejo selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.22. Peserta KB Baru di Kecamatan Selopuro

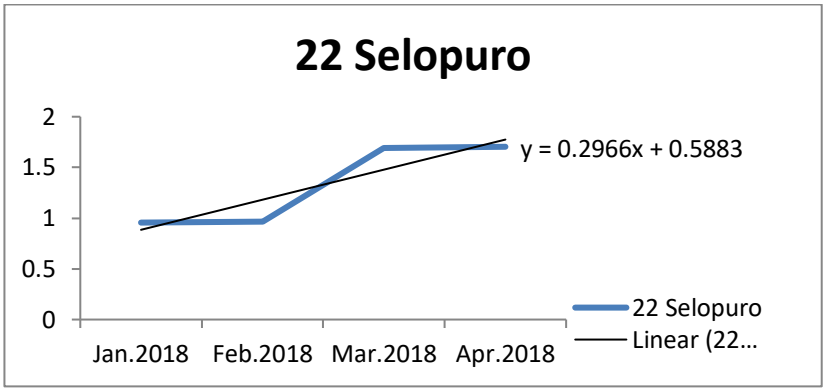

Gambar 4B22a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

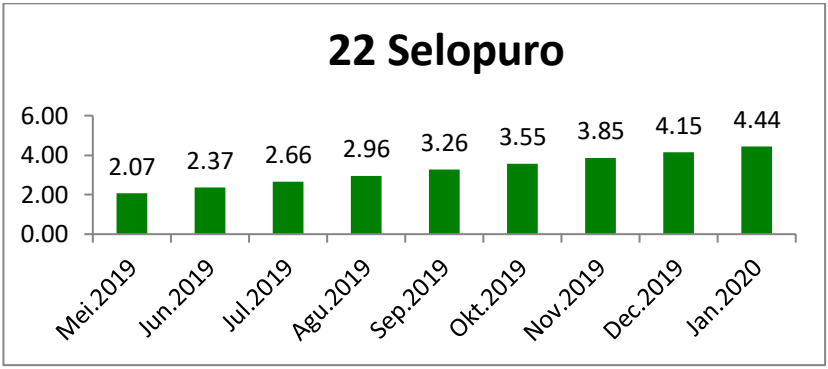

Gambar 4B22b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kecamatan Selopuro selama tahun 2019 hingga awal 2020.

B.23. Peserta KB Baru di Kabupaten Blitar

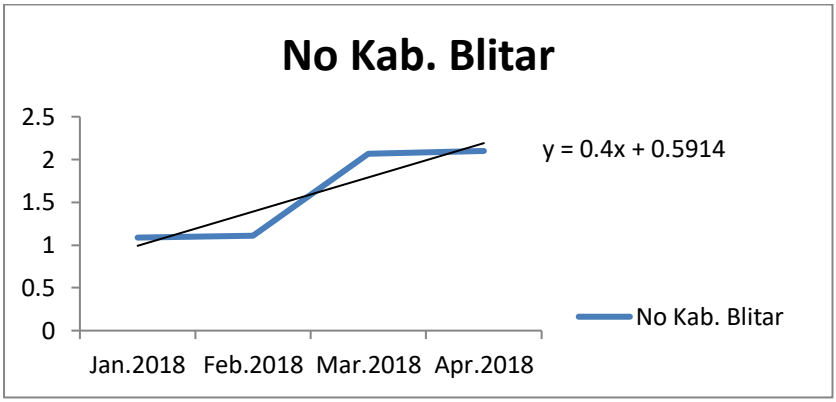

Gambar 4B23a. Kecenderungan Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

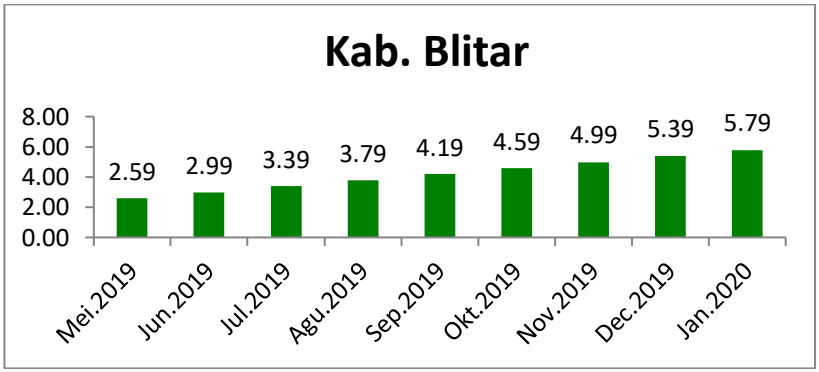

Gambar 4B23b. Proyeksi Peserta KB Baru (Dalam Persen) di Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan tajam peserta KB baru di Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

G. Peserta KB Aktif

C.1. Peserta KB Aktif di Kecamatan Wonodadi

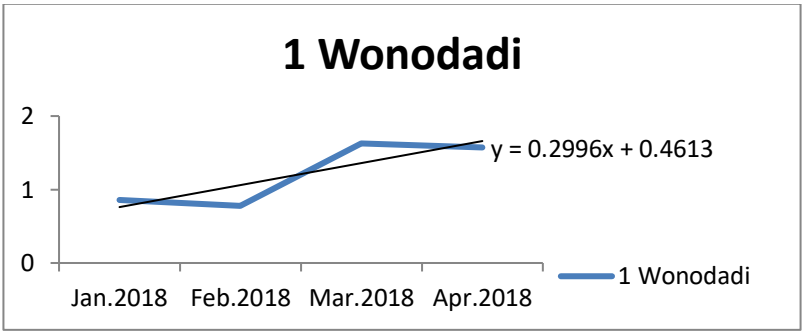

Gambar 4B1a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

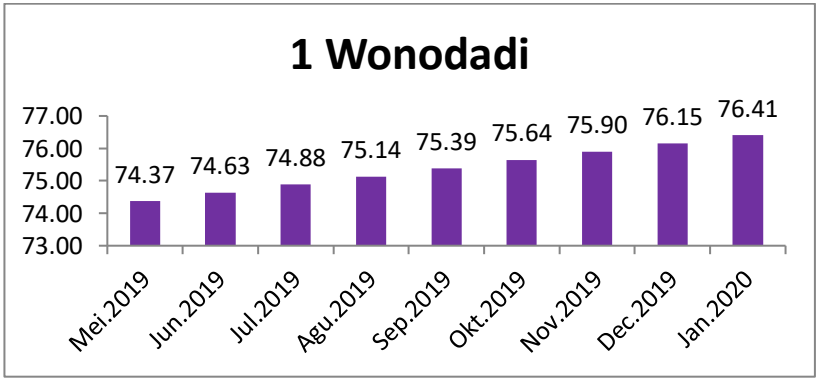

Gambar 4A1b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Wonodadi selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.2. Peserta KB Aktif di Kecamatan Udanawu

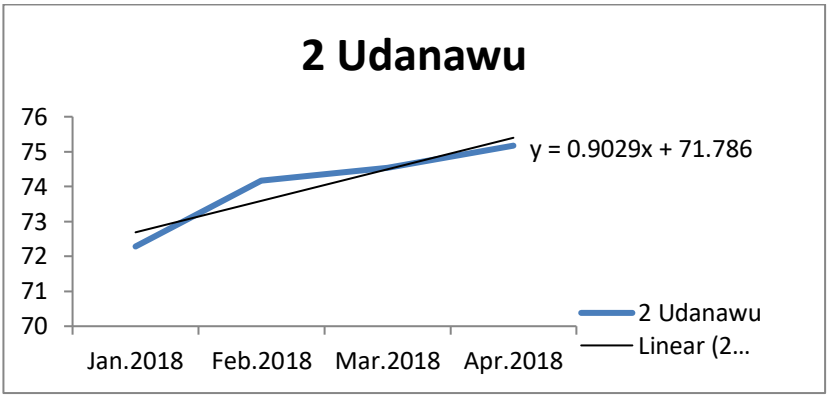

Gambar 4C2a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

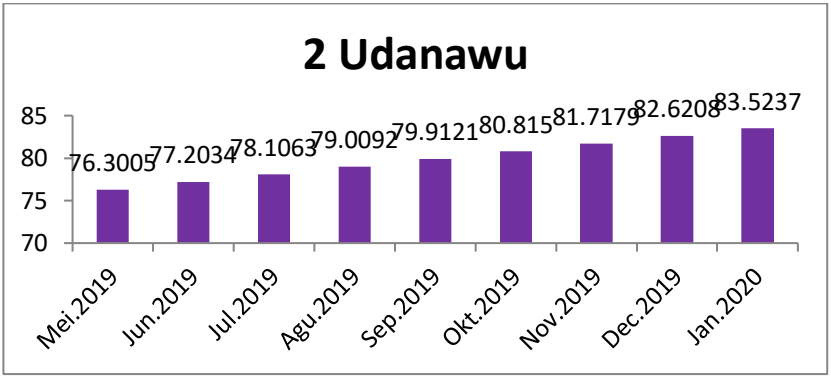

Gambar 4C2b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Udanawu selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.3. Peserta KB Aktif di Kecamatan Srengat

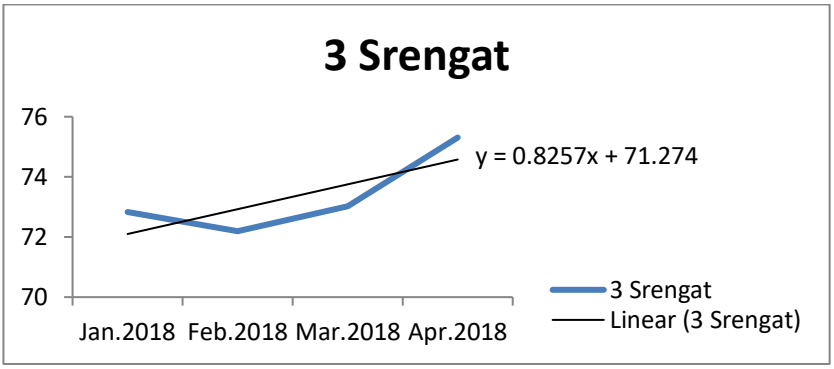

Gambar 4C3a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

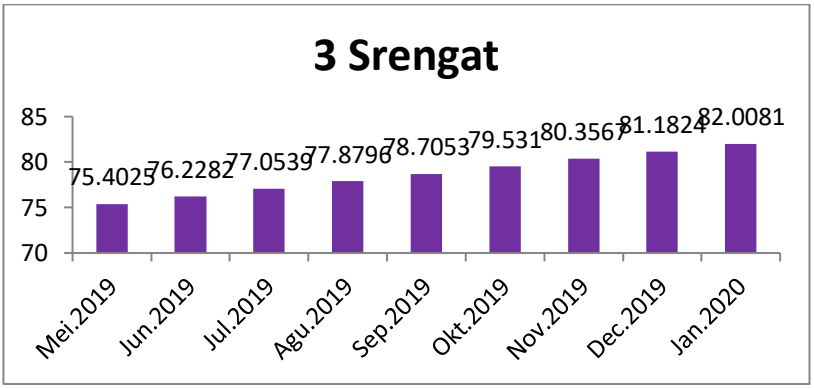

Gambar 4C3b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Srengat selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.4. Peserta KB Aktif di Kecamatan Kademangan

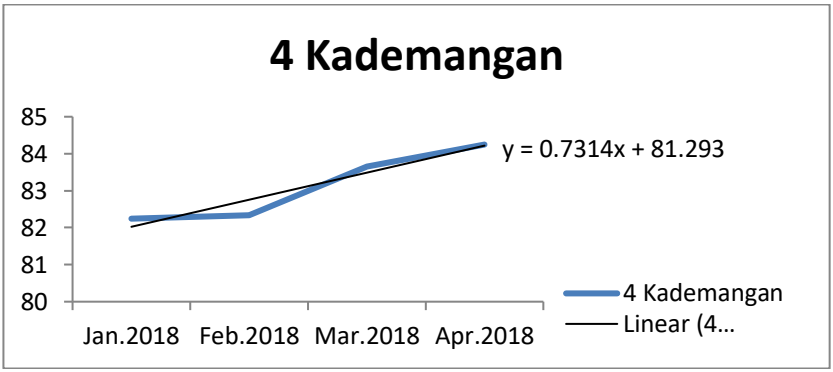

Gambar 4C4a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

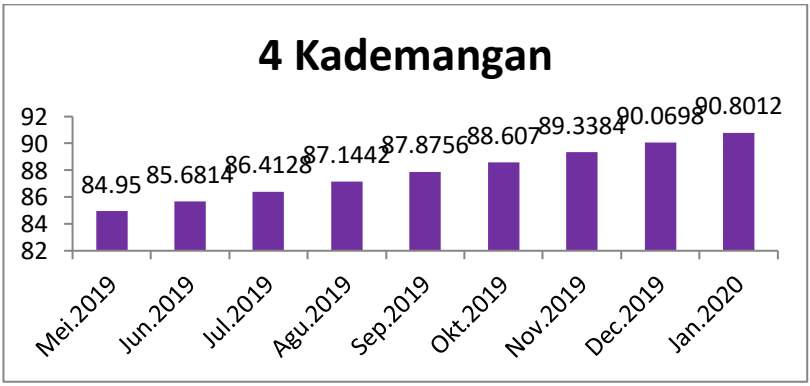

Gambar 4C4b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Kademangan selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.5. Peserta KB Aktif di Kecamatan Bakung

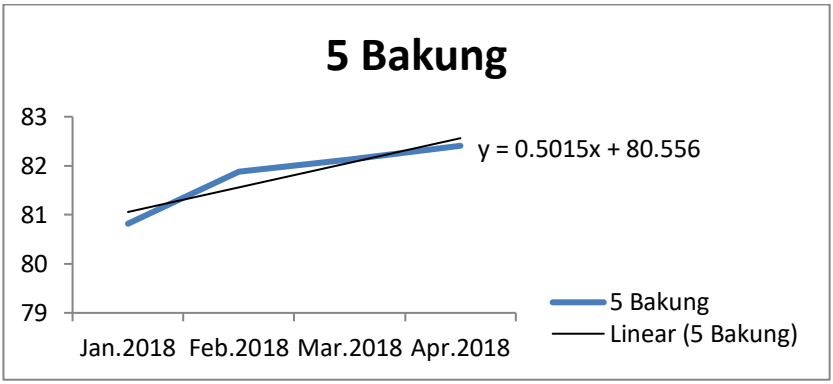

Gambar 4C5a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

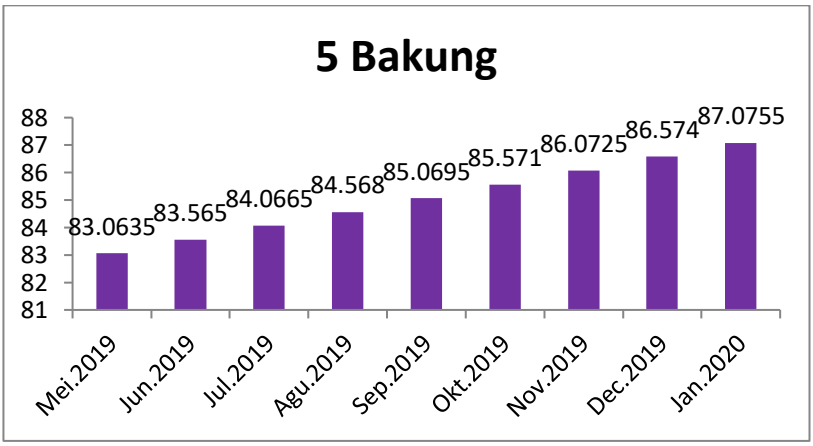

Gambar 4C5b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Bakung selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.6. Peserta KB Aktif di Kecamatan Ponggok

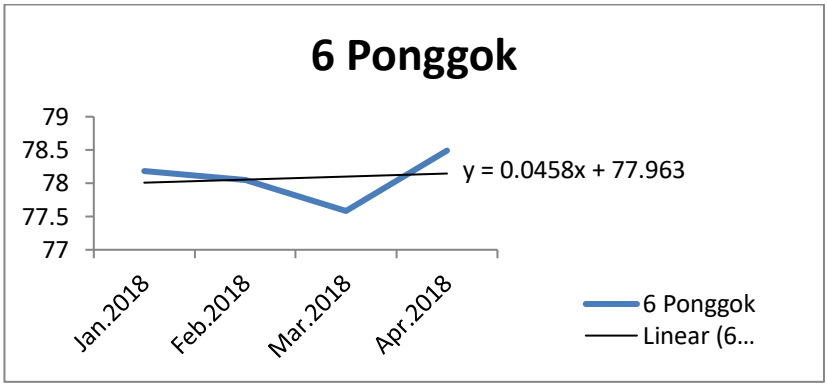

Gambar 4C6a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

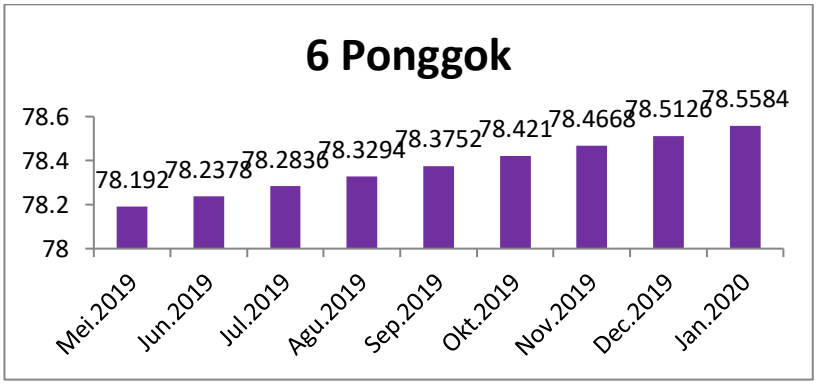

Gambar 4C6b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Ponggok selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.7. Peserta KB Aktif di Kecamatan Sanan Kulon

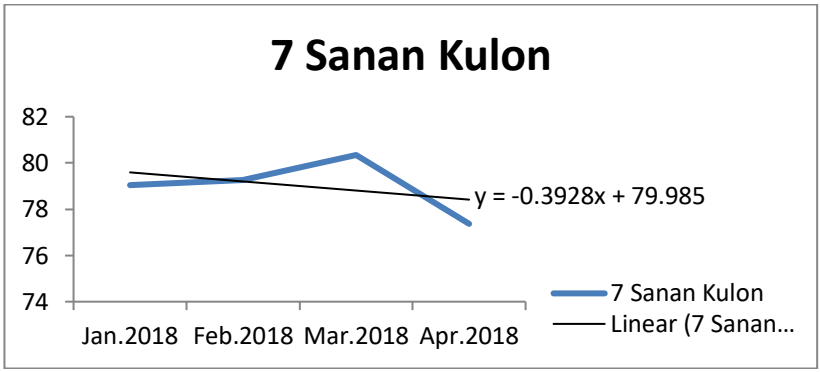

Gambar 4C7a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

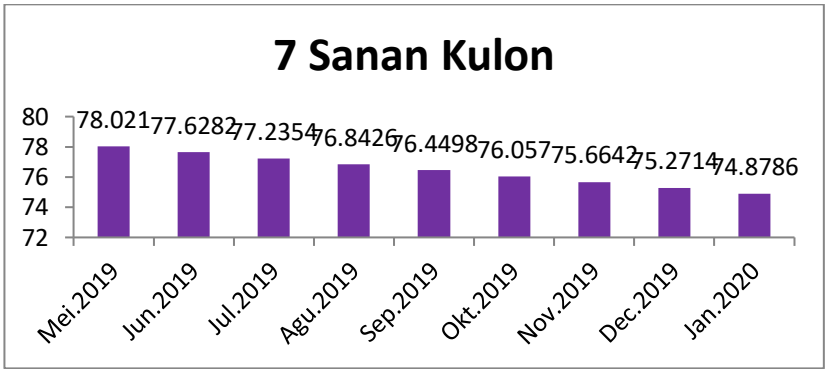

Gambar 4C7b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan peserta KB aktif di Kecamatan Sanan Kulon selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.8. Peserta KB Aktif di Kecamatan Wonotirto

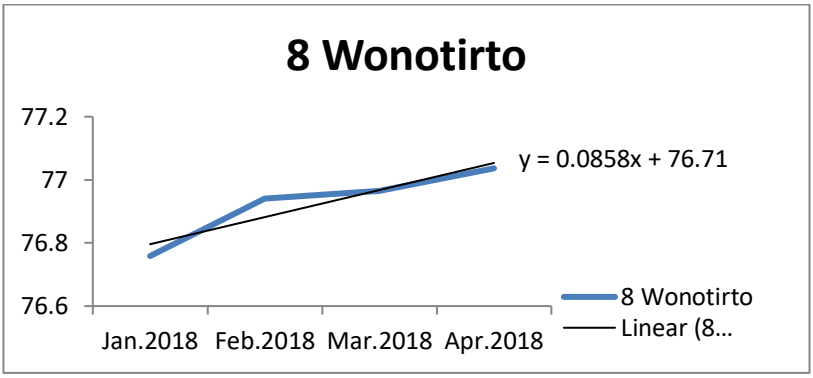

Gambar 4C8a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

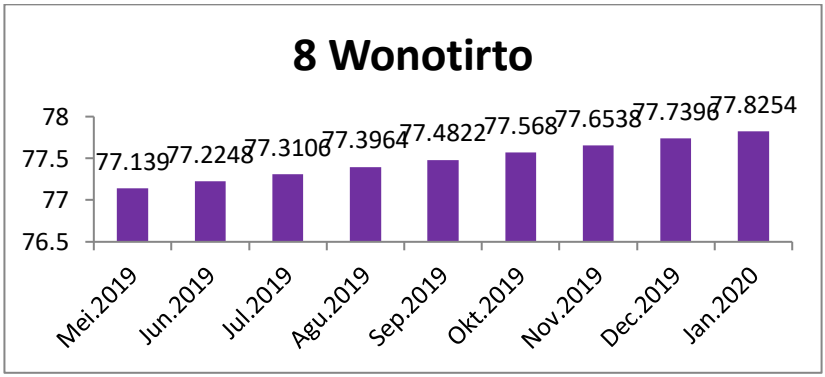

Gambar 4C8b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Wonotirto selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.9. Peserta KB Aktif di Kecamatan Nglegok

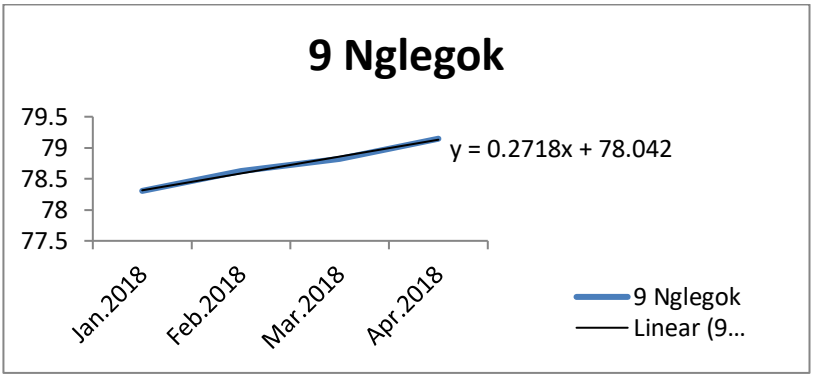

Gambar 4C9a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

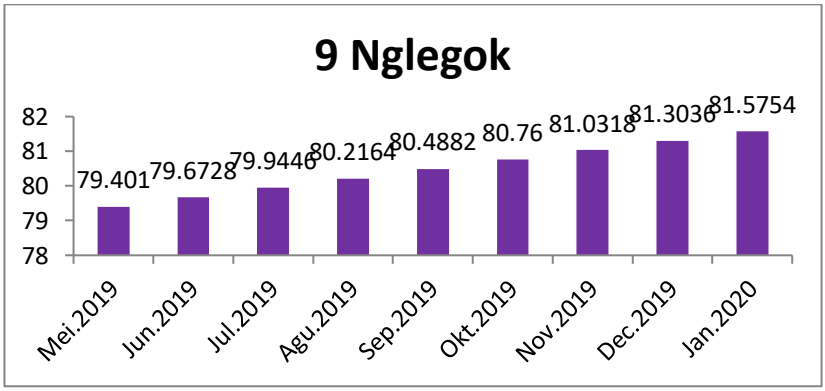

Gambar 4C9b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Nglegok selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.10. Peserta KB Aktif di Kecamatan Kanigoro

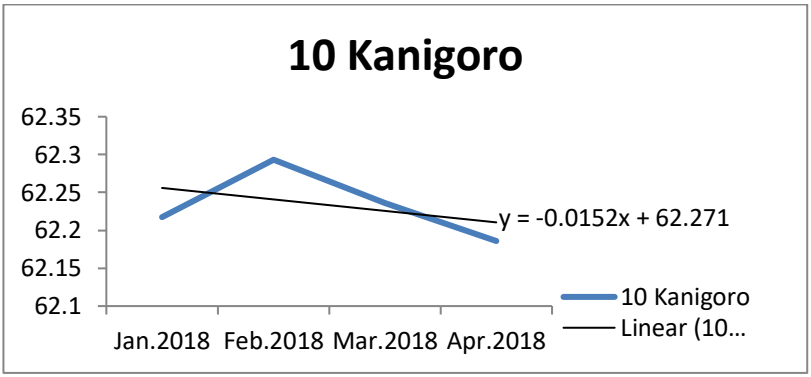

Gambar 4C10a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

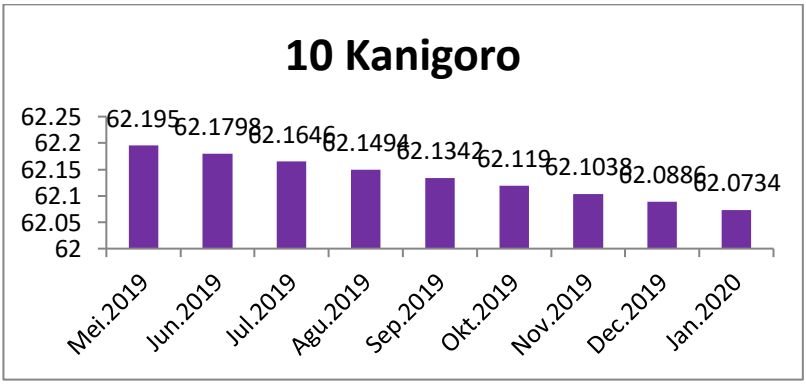

Gambar 4C10b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan peserta KB aktif di Kecamatan Kanigoro selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.11. Peserta KB Aktif di Kecamatan Garum

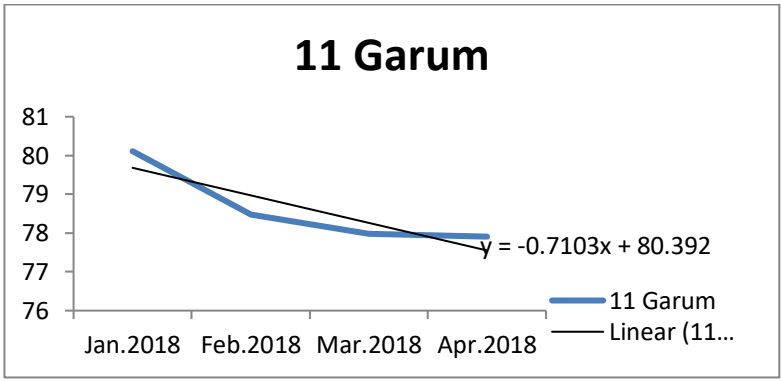

Gambar 4C11a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

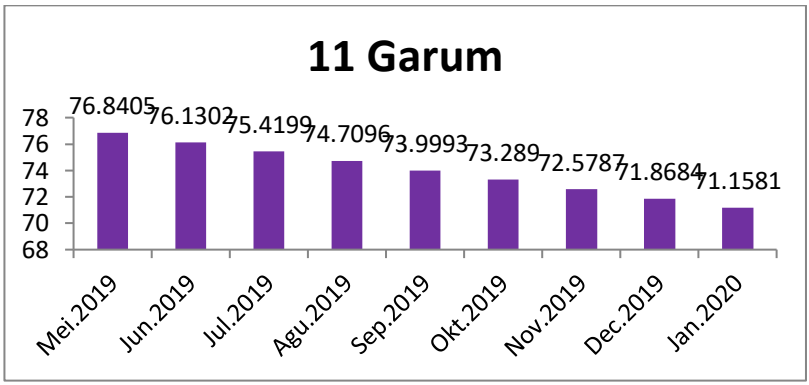

Gambar 4C11b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan peserta KB aktif di Kecamatan Garum selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.12. Peserta KB Aktif di Kecamatan Sutojayan

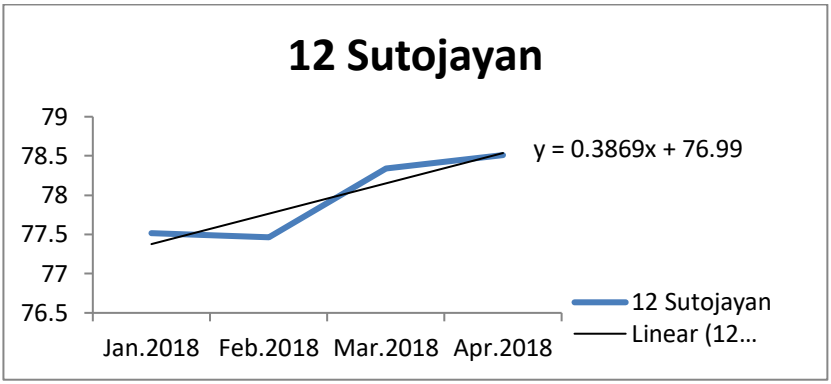

Gambar 4C12a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

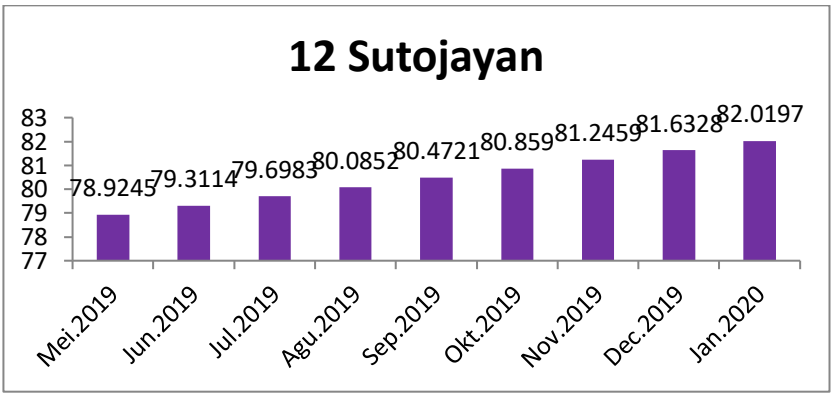

Gambar 4C12b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Sutojayan selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.13. Peserta KB Aktif di Kecamatan Panggungrejo

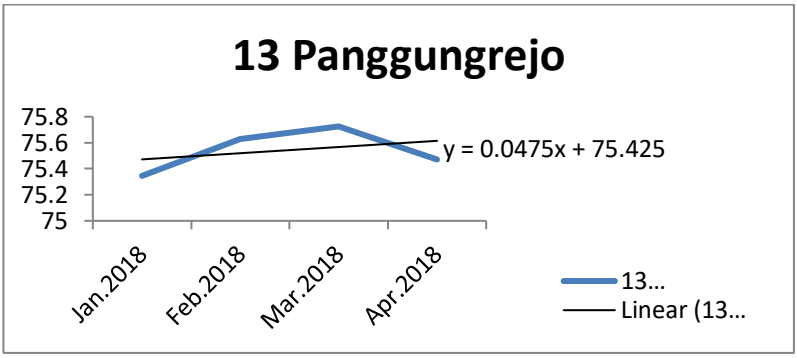

Gambar 4C13a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

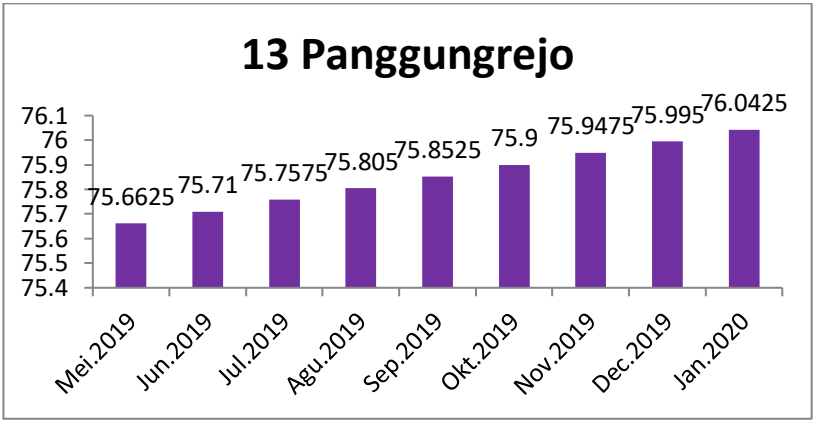

Gambar 4C13b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Panggungrejo selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.14. Peserta KB Aktif di Kecamatan Talun

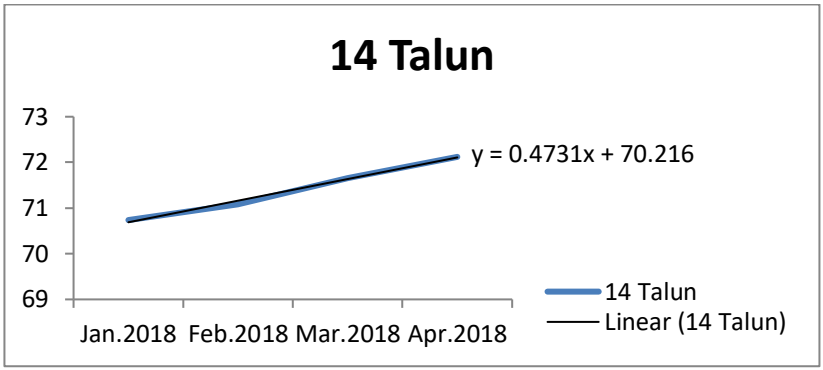

Gambar 4C14a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

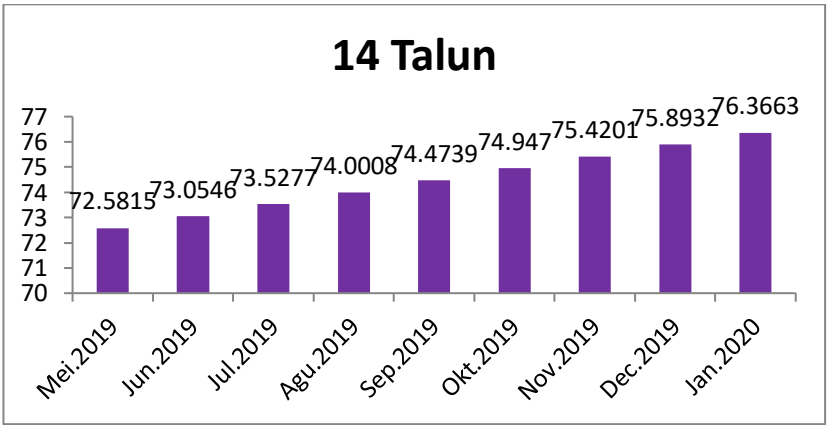

Gambar 4C14b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Talun selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.15. Peserta KB Aktif di Kecamatan Gandusari

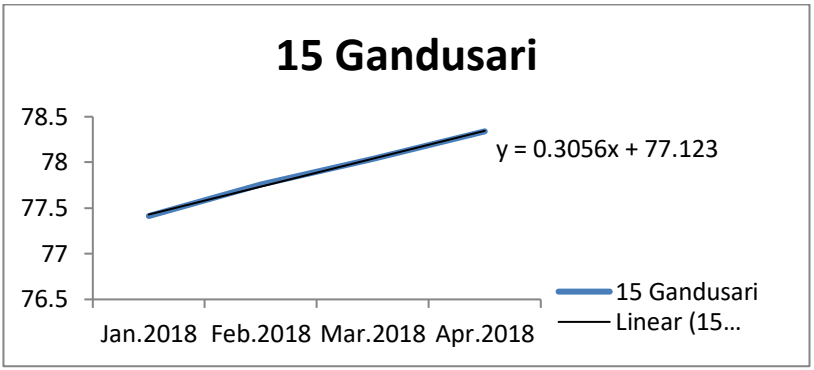

Gambar 4C15a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

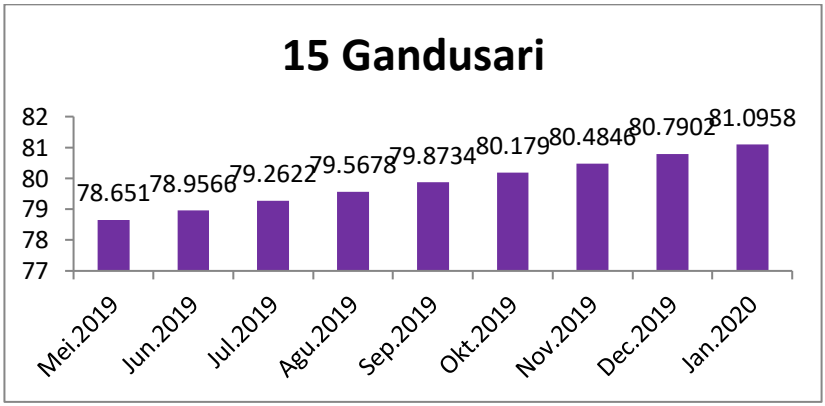

Gambar 4C15b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Gandusari selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.16. Peserta KB Aktif di Kecamatan Binangun

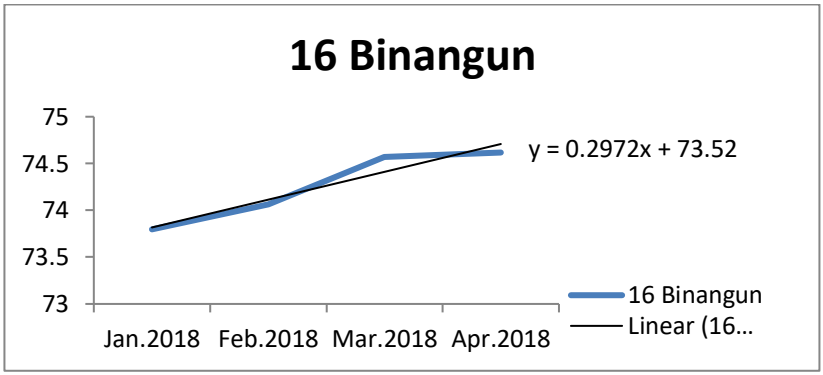

Gambar 4C16a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

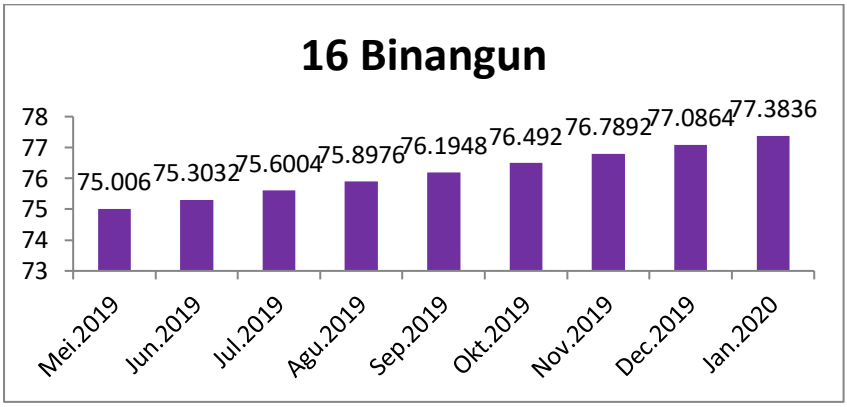

Gambar 4C16b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Binangun selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.17. Peserta KB Aktif di Kecamatan Wlingi

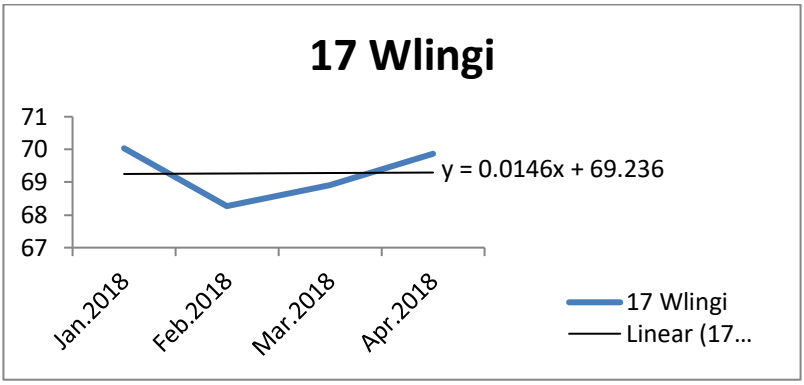

Gambar 4C17a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

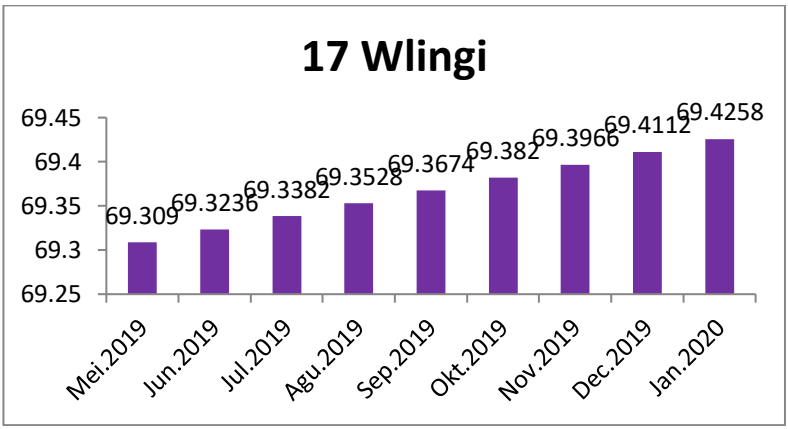

Gambar 4C17b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Wlingi selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.18. Peserta KB Aktif di Kecamatan Doko

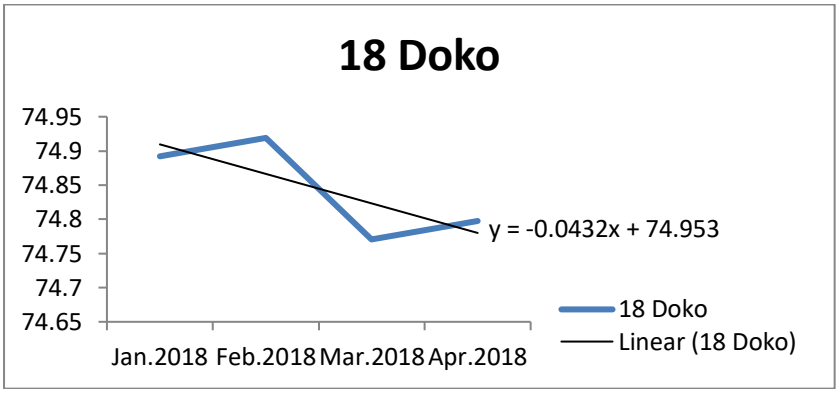

Gambar 4C18a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

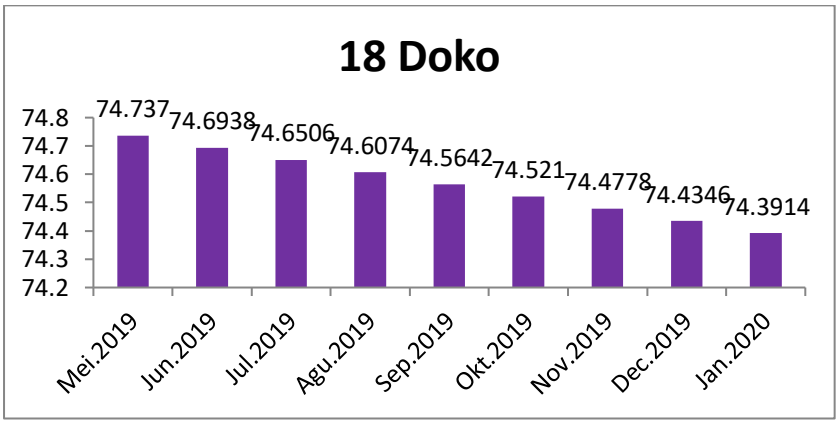

Gambar 4C18b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan peserta KB aktif di Kecamatan Doko selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.19. Peserta KB Aktif di Kecamatan Kesamben

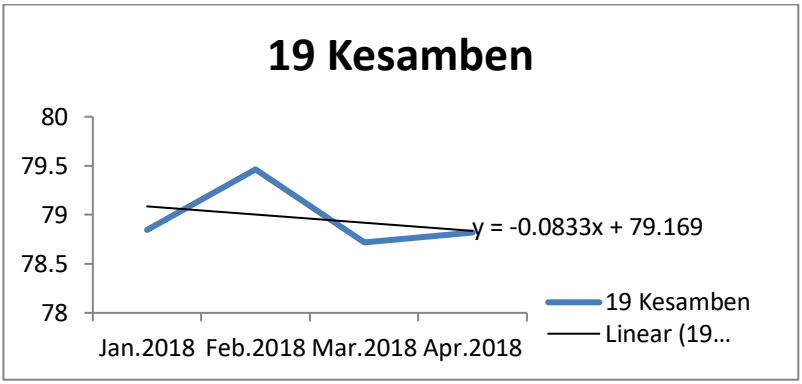

Gambar 4C19a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

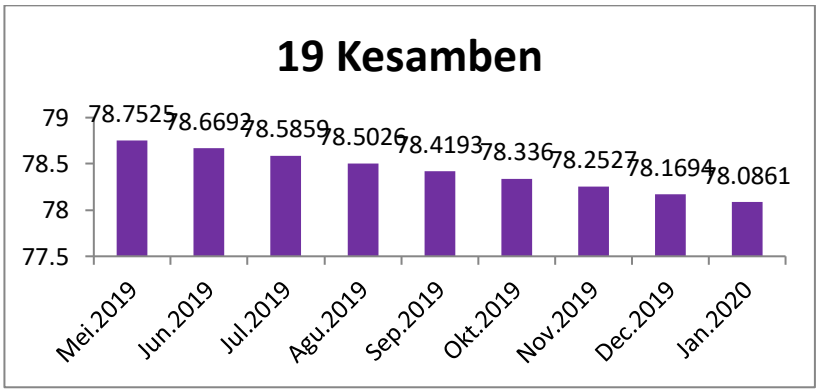

Gambar 4C19b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan peserta KB aktif di Kecamatan Kesamben selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.20. Peserta KB Aktif di Kecamatan Wates

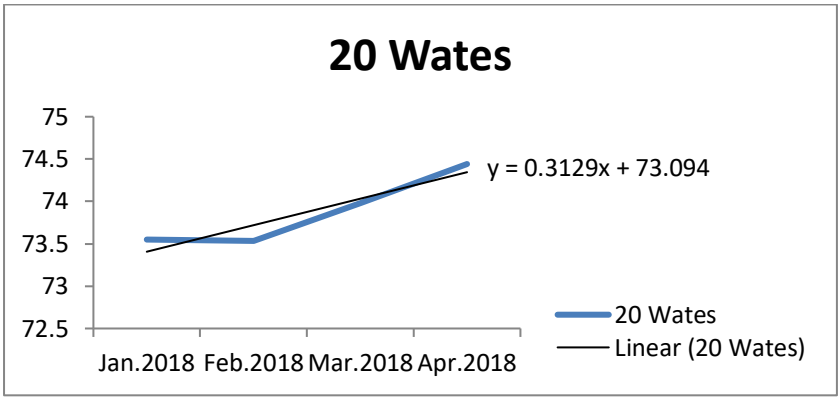

Gambar 4C20a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

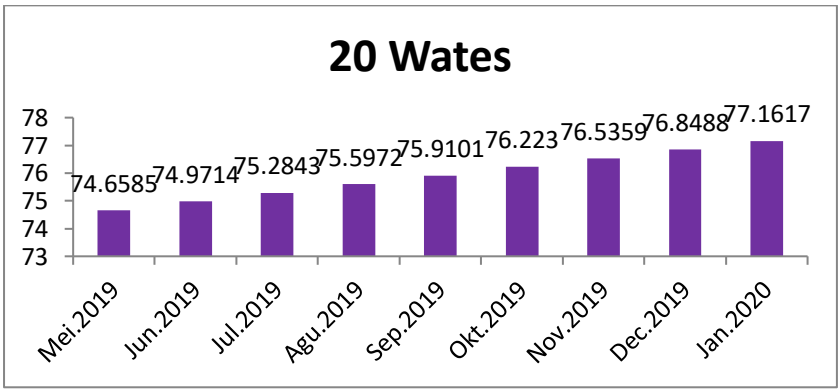

Gambar 4C20b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Wates selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.21. Peserta KB Aktif di Kecamatan Selorejo

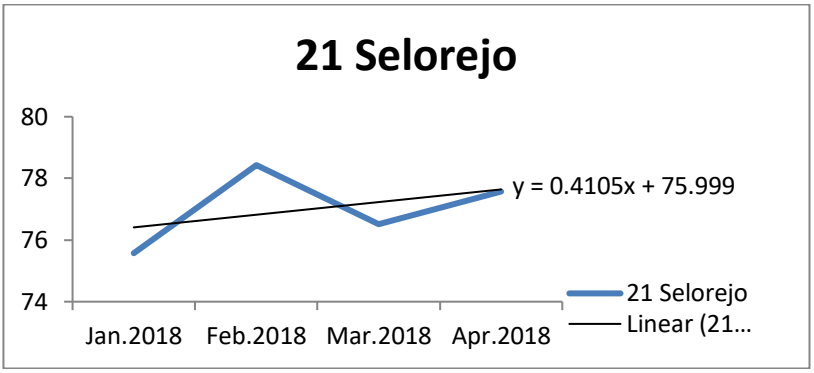

Gambar 4C21a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

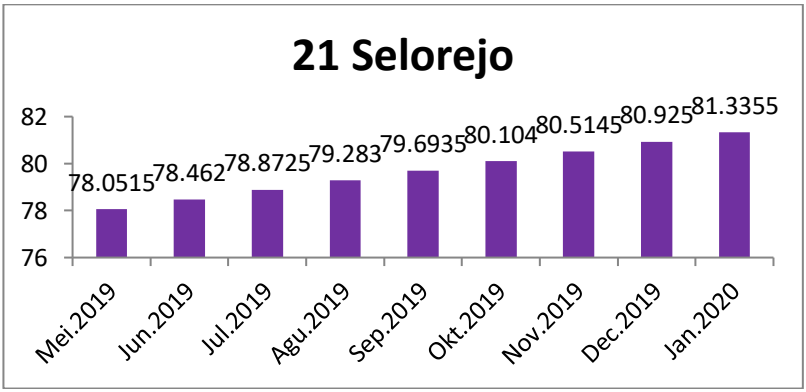

Gambar 4C21b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Selorejo selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.22. Peserta KB Aktif di Kecamatan Selopuro

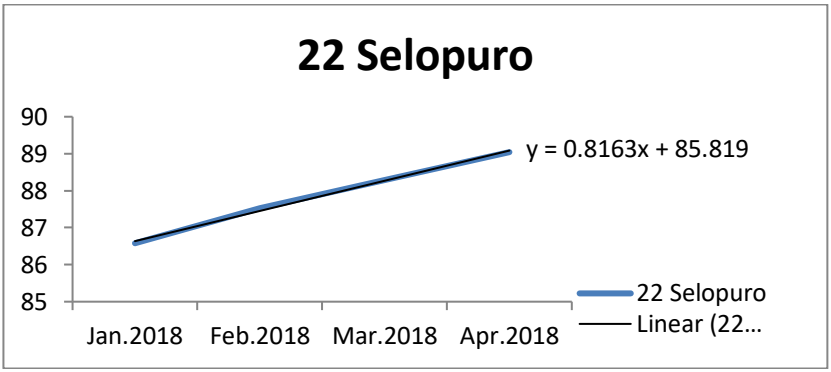

Gambar 4C22a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

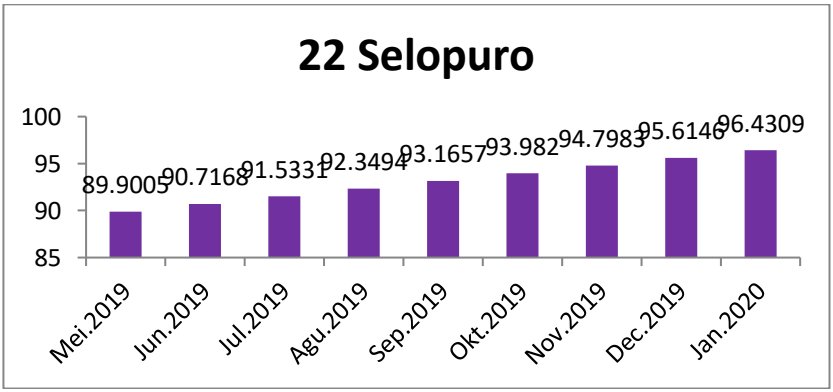

Gambar 4C22b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kecamatan Selopuro selama tahun 2019 hingga awal 2020.

C.23. Peserta KB Aktif di Kabupaten Blitar

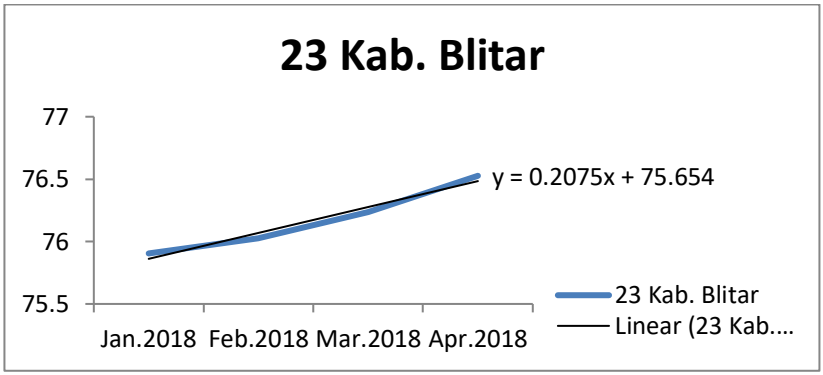

Gambar 4C23a. Kecenderungan Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

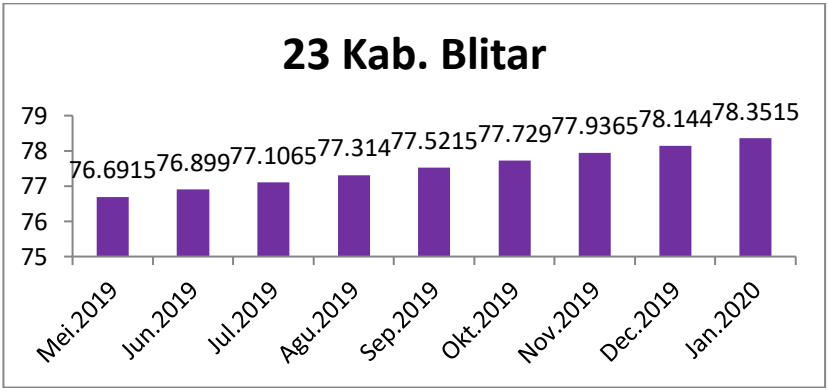

Gambar 4C23b. Proyeksi Peserta KB Aktif (Dalam Persen) di Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan peserta KB aktif di Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

H. Kejadian *Unmet Need*

D.1. Kejadian *Unmet Need* di Kabupaten Blitar

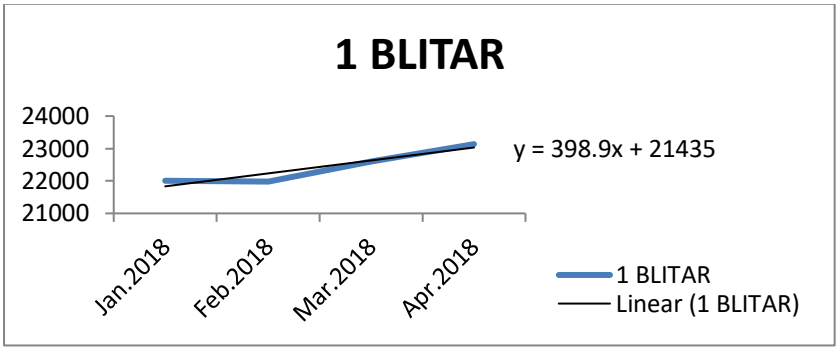

Gambar 4D1a. Kecenderungan Kejadian *Unmet Need* (Dalam Persen) di Kabupaten Blitar pada Awal Tahun 2019

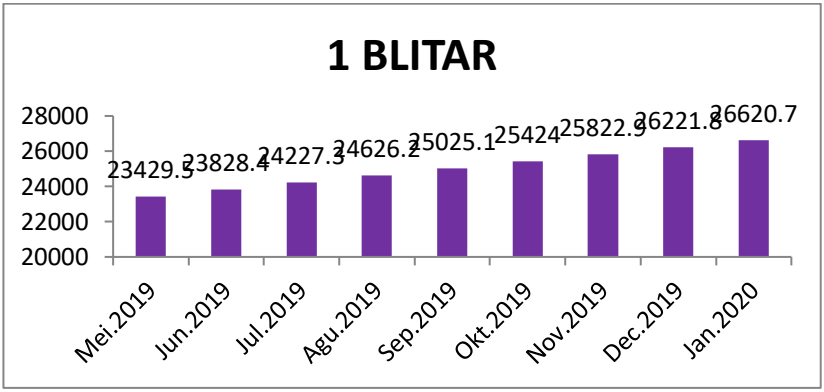

Gambar 4D1b. Proyeksi Kejadian *Unmet Need* (Dalam Persen) di Kabupaten Blitar pada Bulan Mei 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan kejadian *Unmet Need* di Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

I. Kejadian *Drop Out* Kepesertaan KB

E.1. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wonodadi

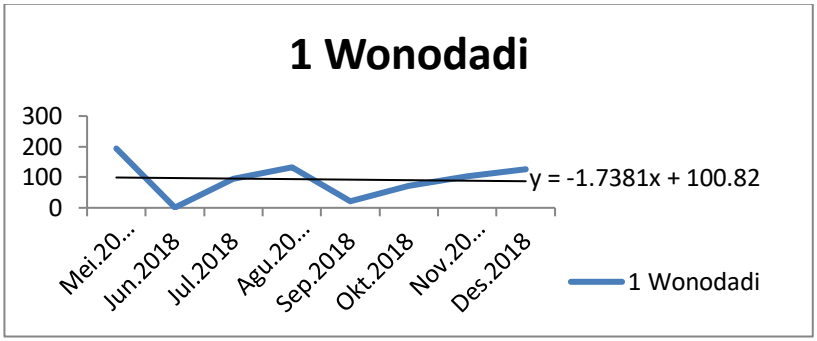

Gambar 4E1a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

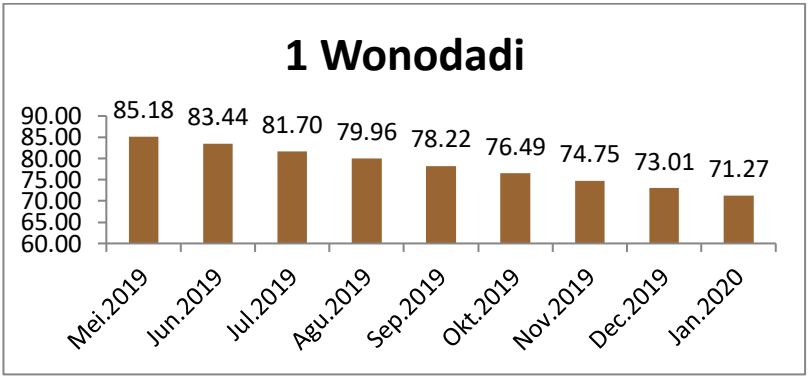

Gambar 4E1b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.2. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Udanawu

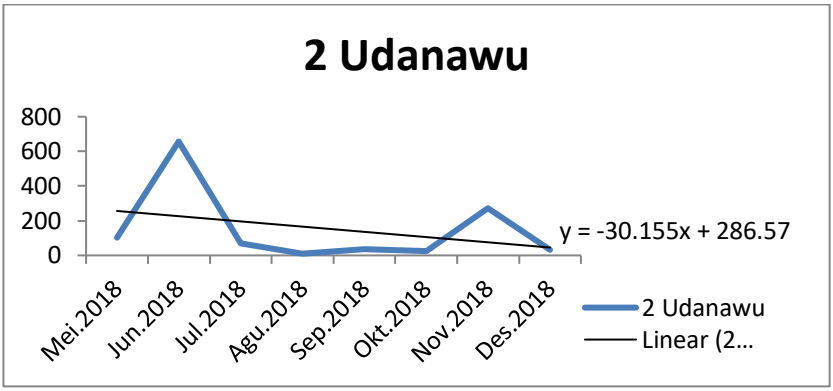

Gambar 4E2a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

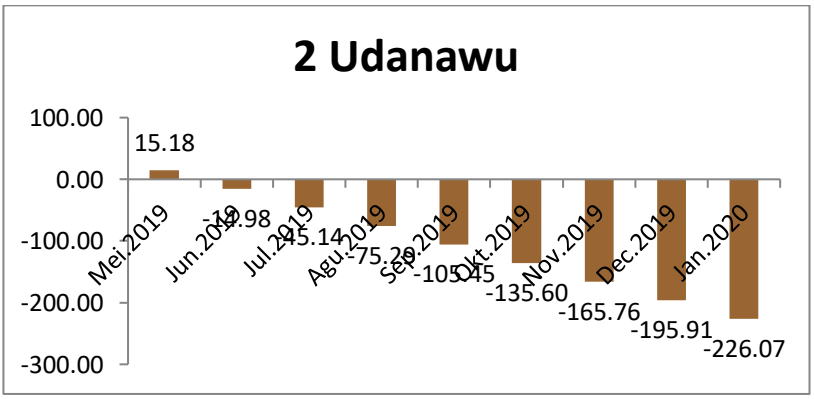

Gambar 4E2b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.3. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Srengat

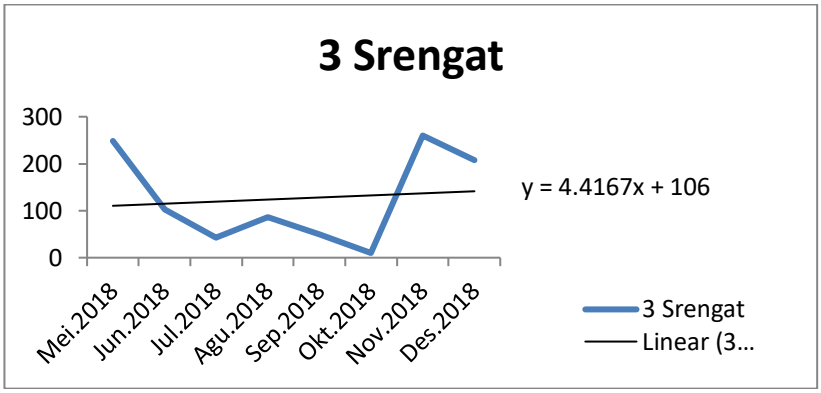

Gambar 4E3a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

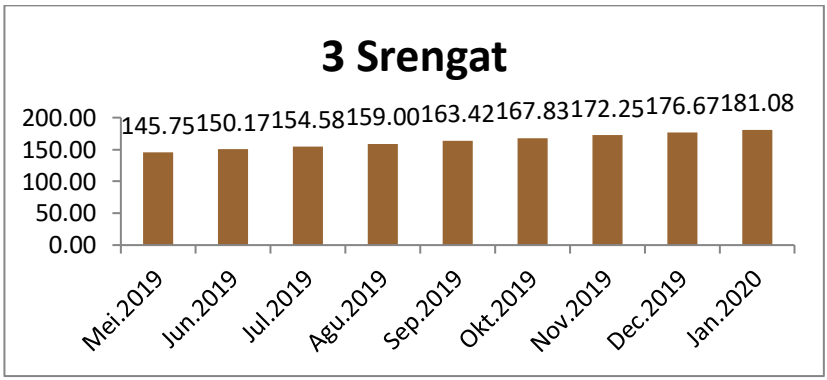

Gambar 4E3b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.4. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Kademangan

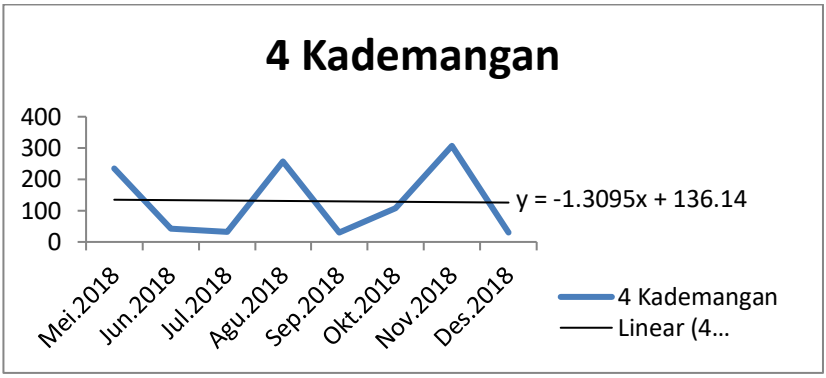

Gambar 4E4a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

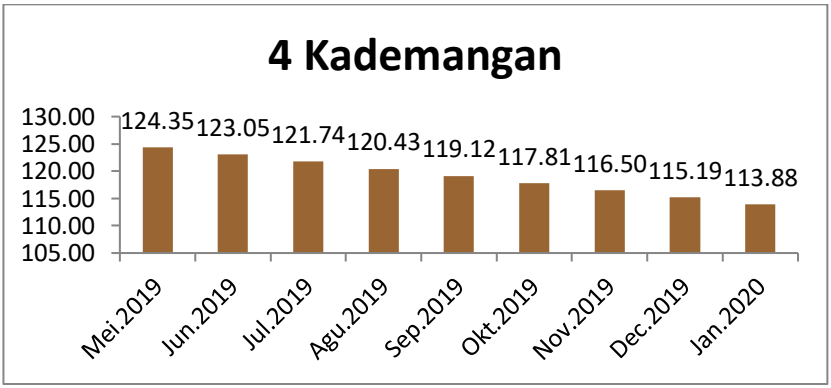

Gambar 4E4b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.5. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Bakung

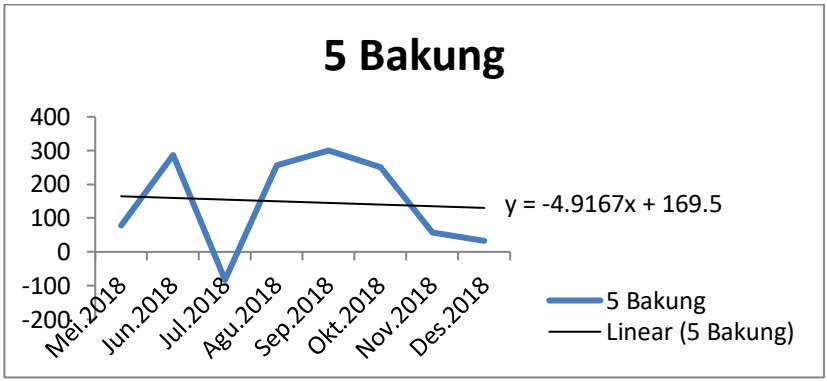

Gambar 4E5a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

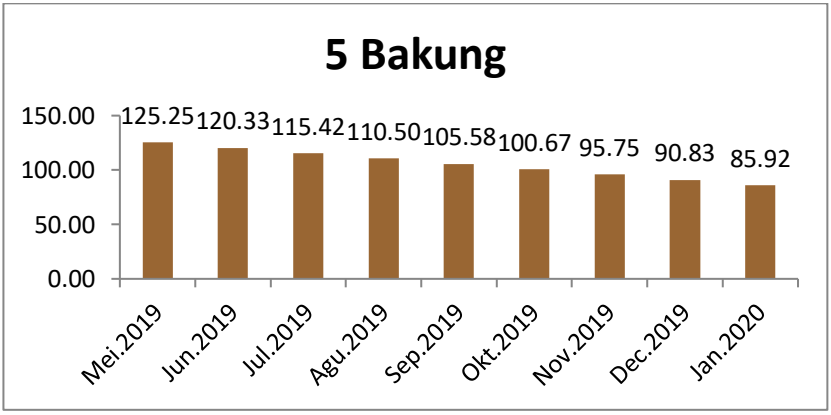

Gambar 4E5b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.6. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Ponggok

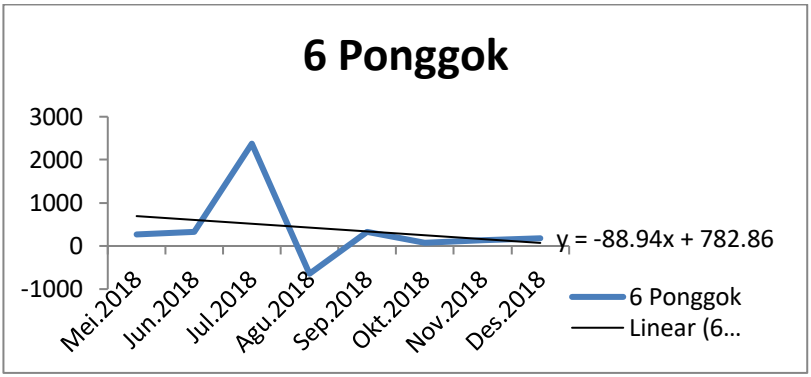

Gambar 4E6a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

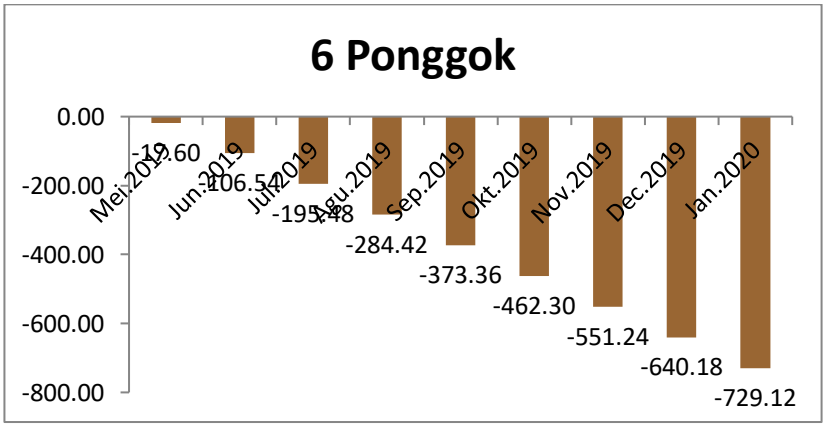

Gambar 4E6b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.7. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Sanan Kulon

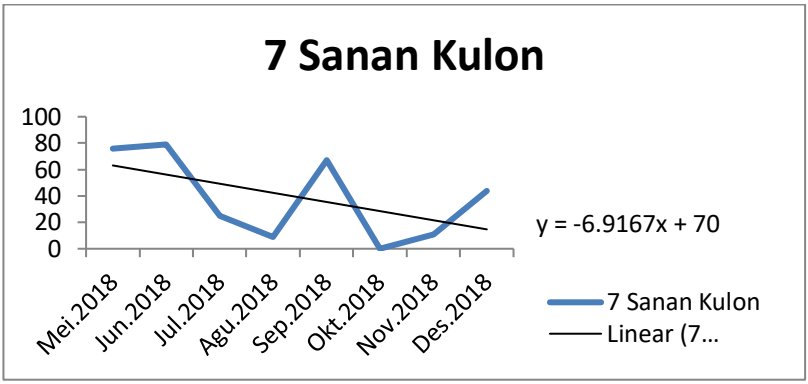

Gambar 4E7a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

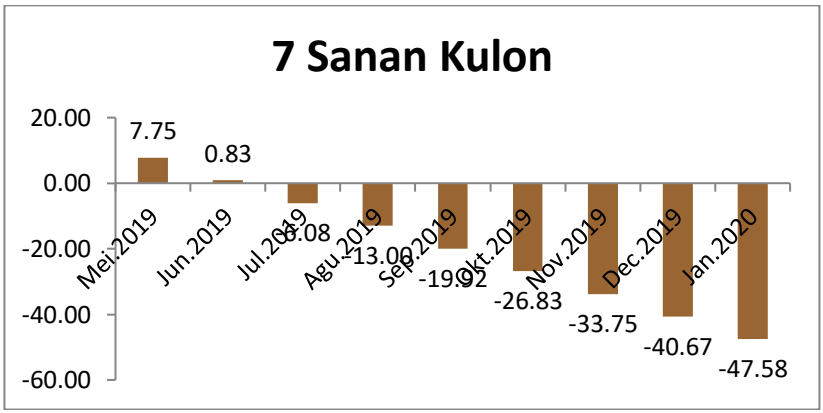

Gambar 4E7b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.8. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wonotirto

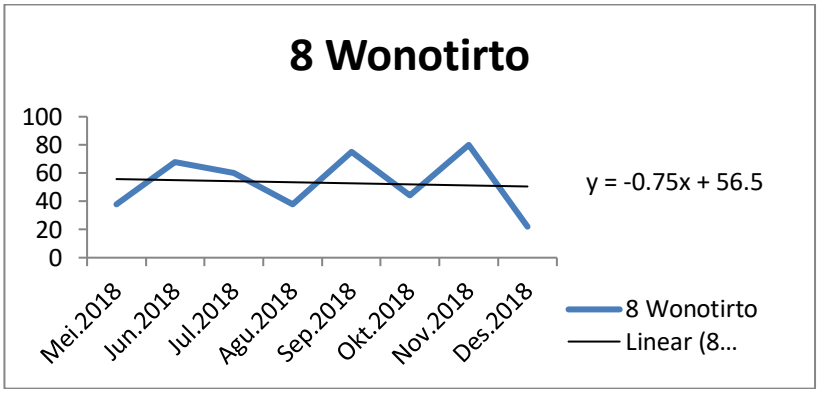

Gambar 4E8a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

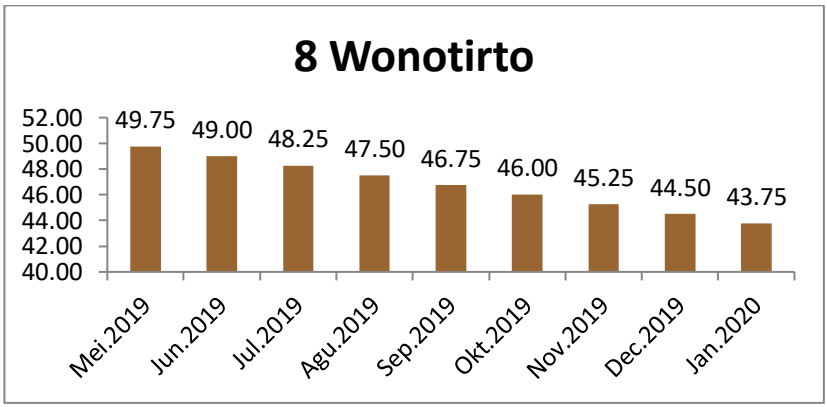

Gambar 4E8b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.9. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Nglegok

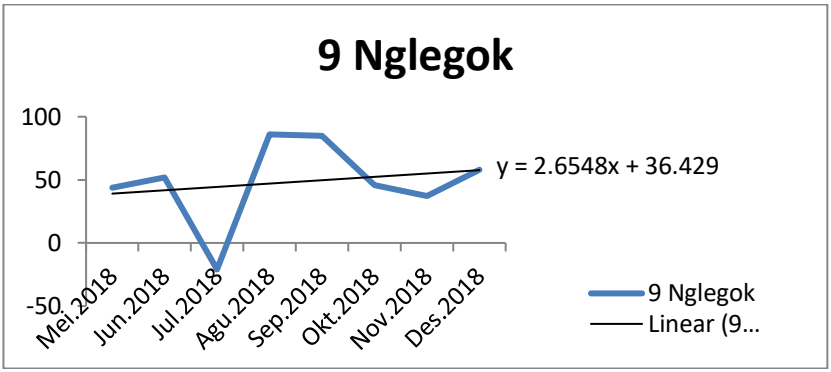

Gambar 4E9a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

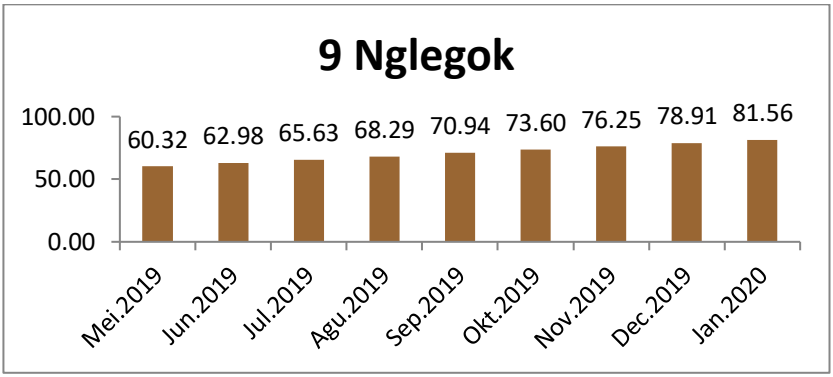

Gambar 4E9b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.10. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Kanigoro

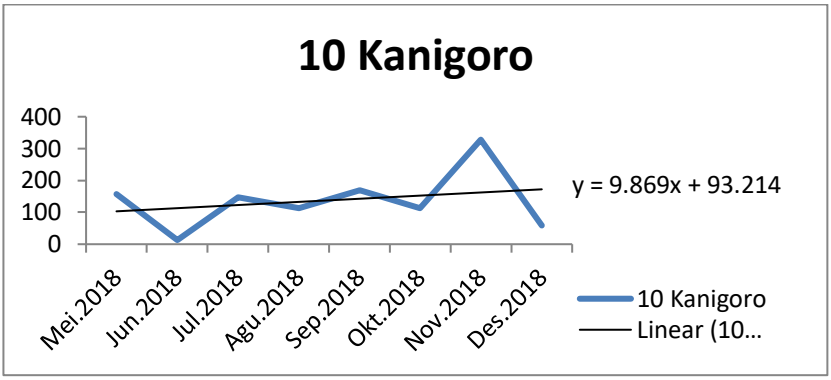

Gambar 4E10a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

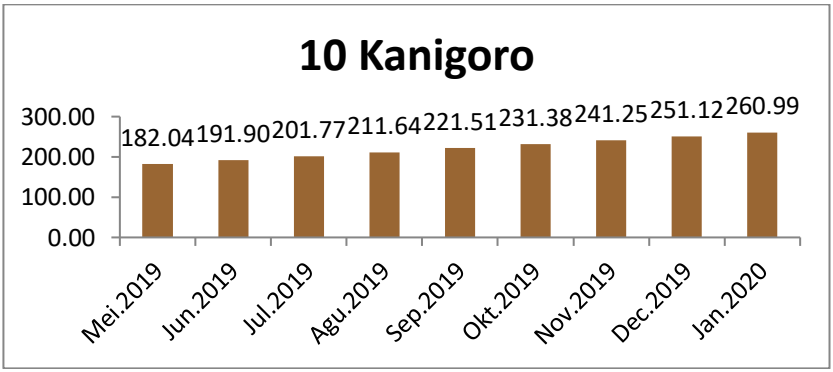

Gambar 4E10b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.11. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Garum

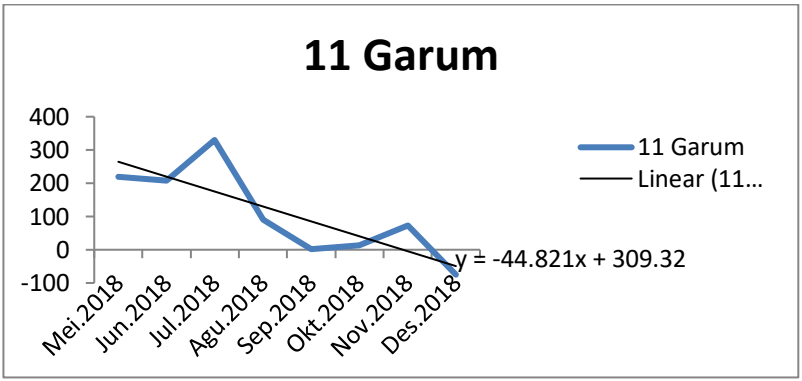

Gambar 4E11a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

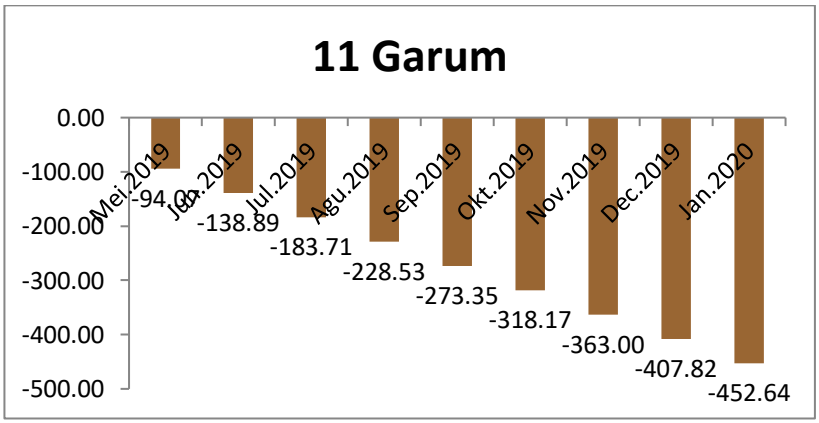

Gambar 4E11b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.12. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Sutojayan

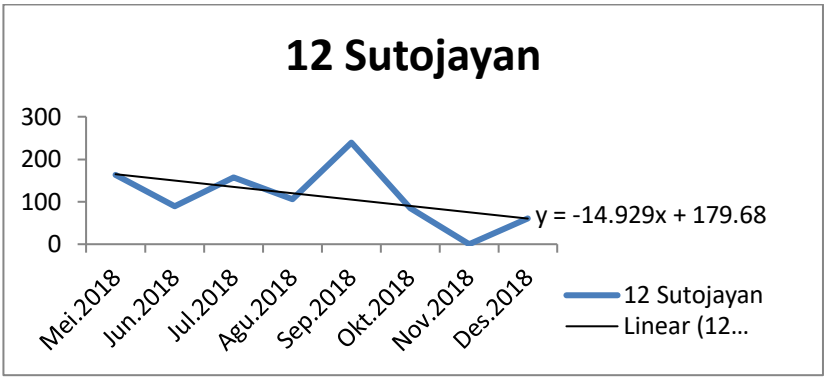

Gambar 4E12a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

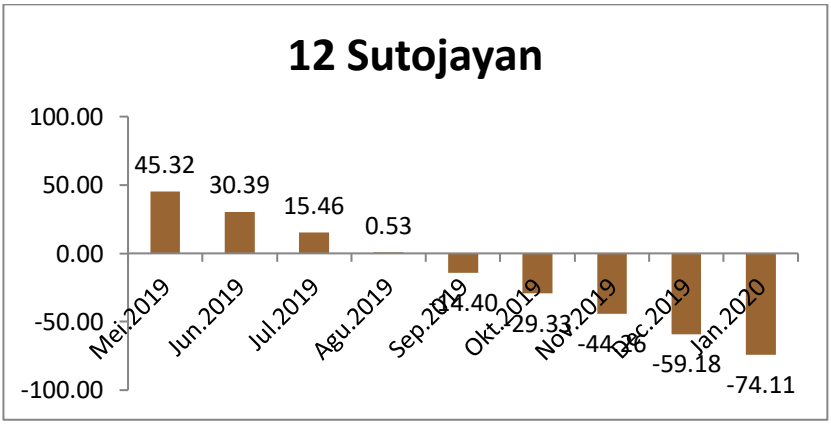

Gambar 4E12b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.13. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Panggungrejo

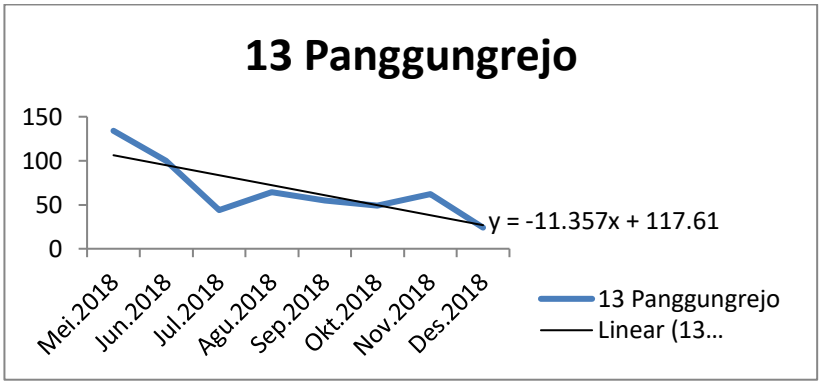

Gambar 4E13a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

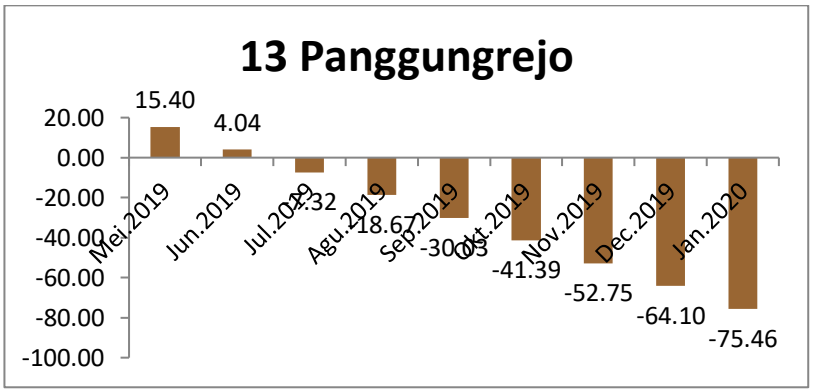

Gambar 4E13b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.14. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Talun

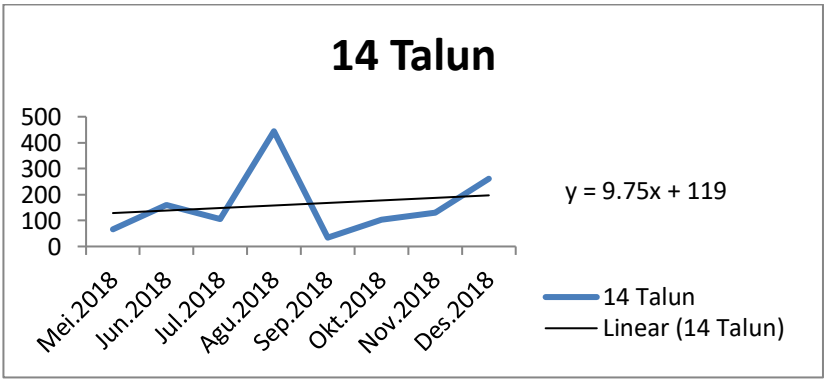

Gambar 4E14a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

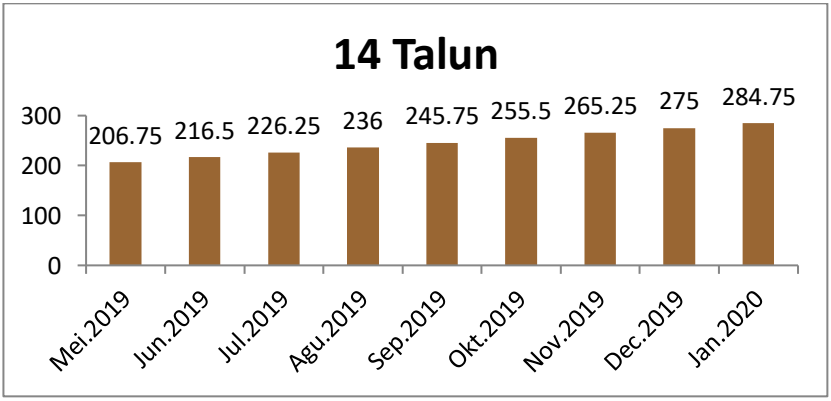

Gambar 4E14b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.15. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Gandusari

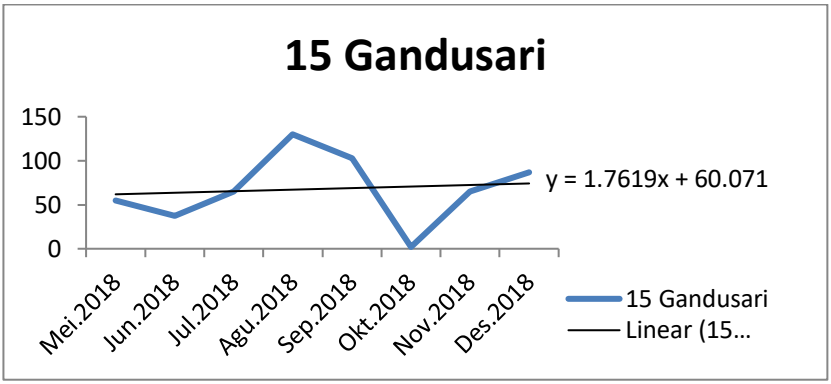

Gambar 4E15a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

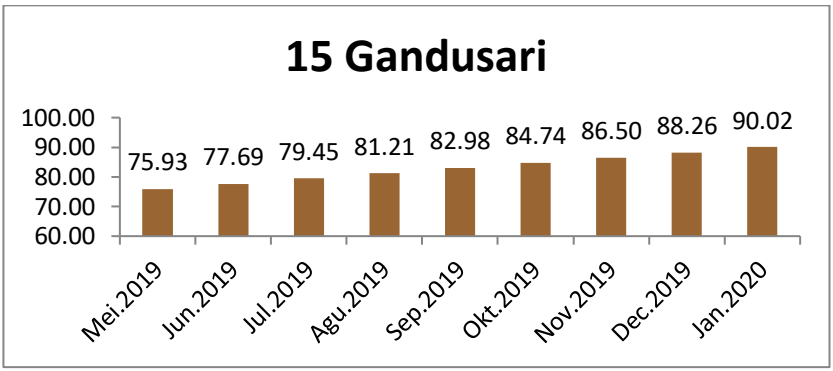

Gambar 4E15b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.16. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Binangun

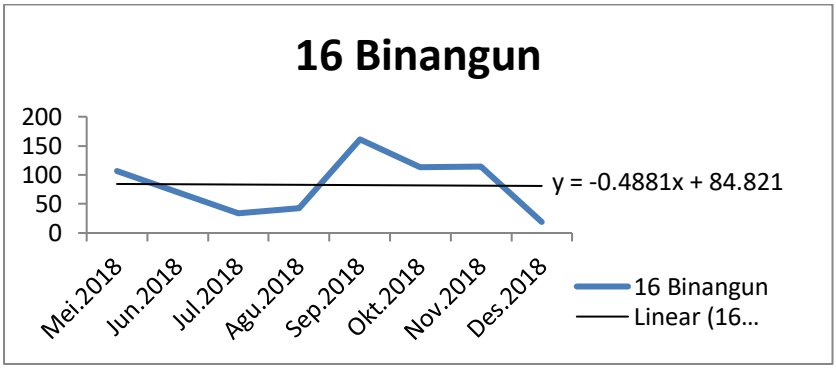

Gambar 4E16a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

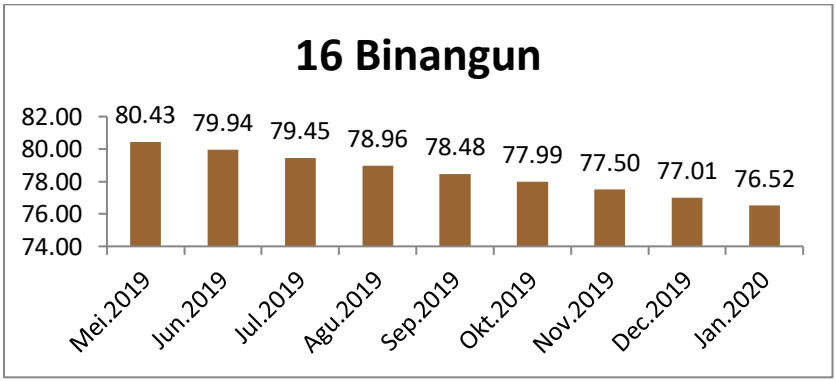

Gambar 4E16b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.17. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wlingi

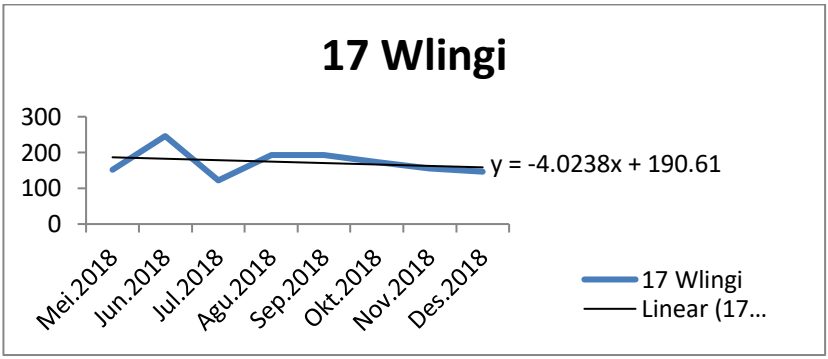

Gambar 4E17a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

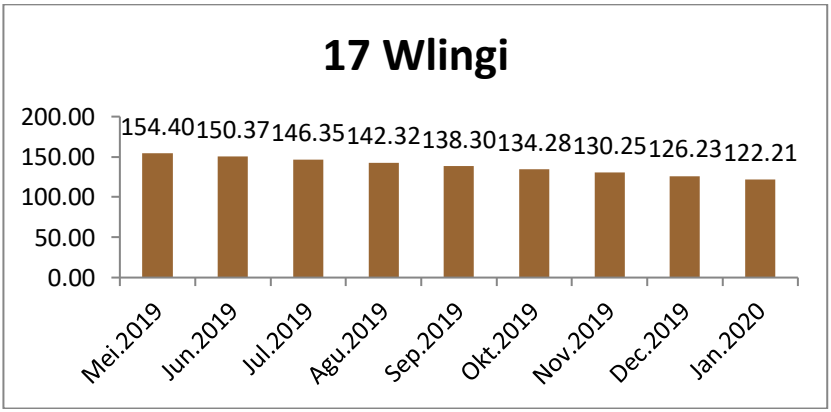

Gambar 4E17b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.18. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Doko

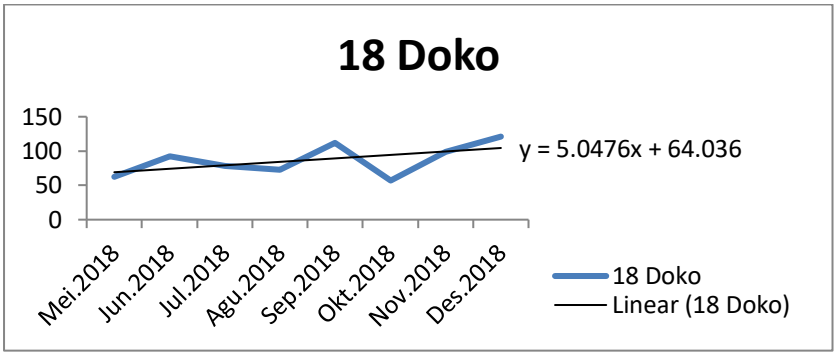

Gambar 4E18a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

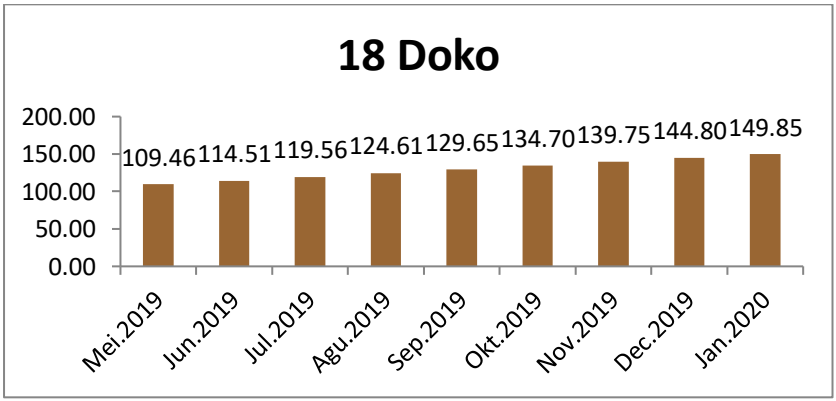

Gambar 4E18b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Doko Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.19. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Kesamben

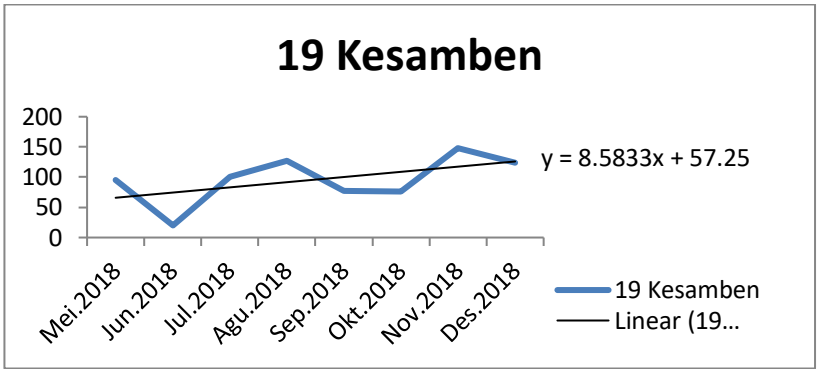

Gambar 4E19a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

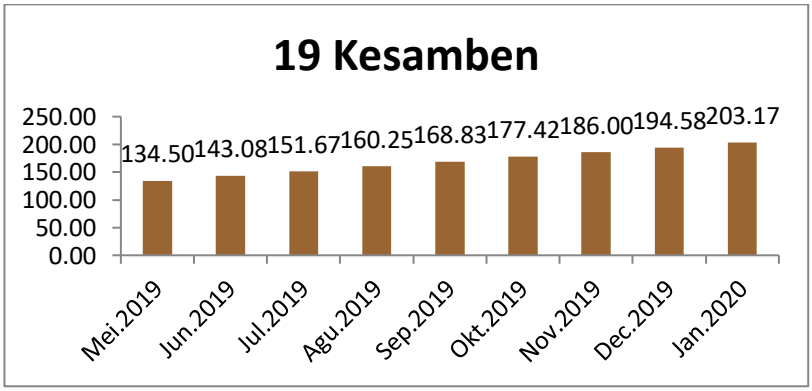

Gambar 4E19b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.20. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wates

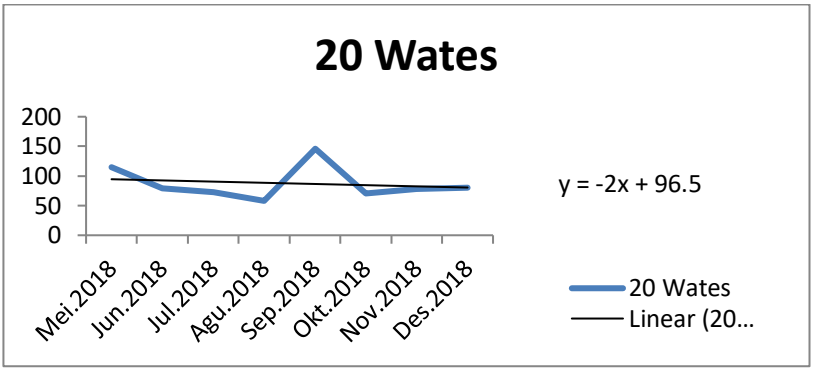

Gambar 4E20a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

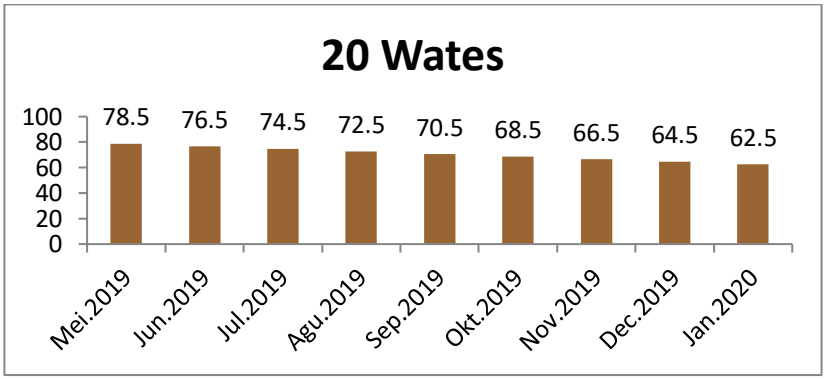

Gambar 4E20b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.21. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Selorejo

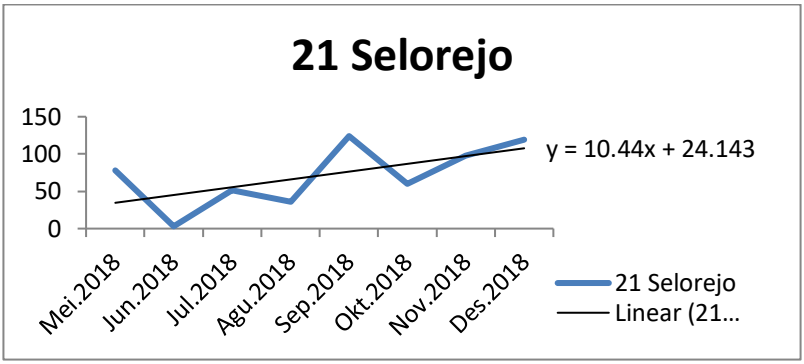

Gambar 4E21a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

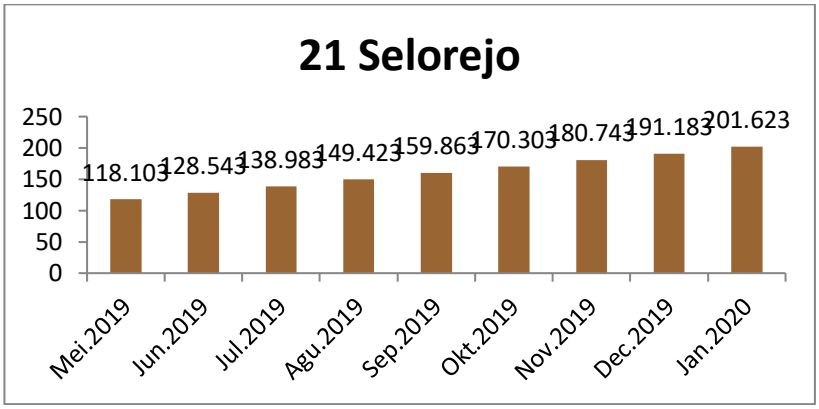

Gambar 4E21b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi peningkatan *drop out* di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.22. Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Selopuro

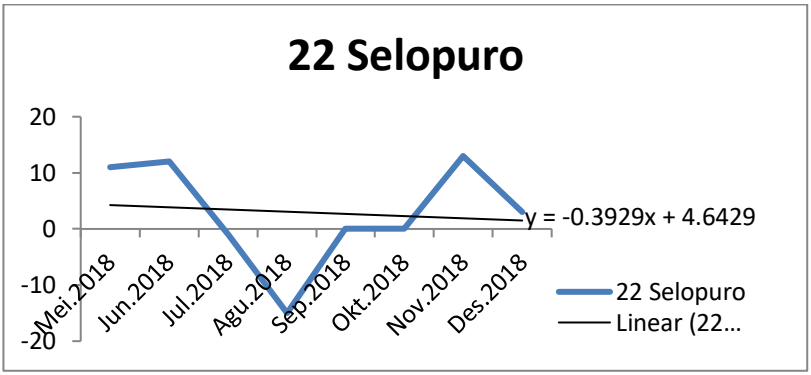

Gambar 4E22a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

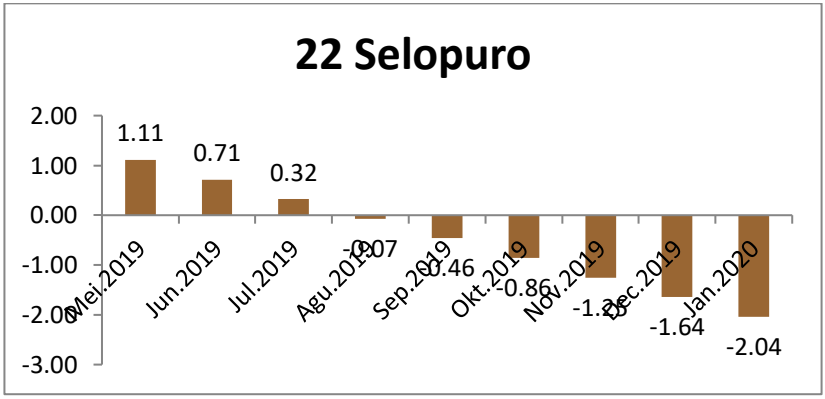

Gambar 4E22b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

E.23. Kejadian *Drop Out* di Kabupaten Blitar

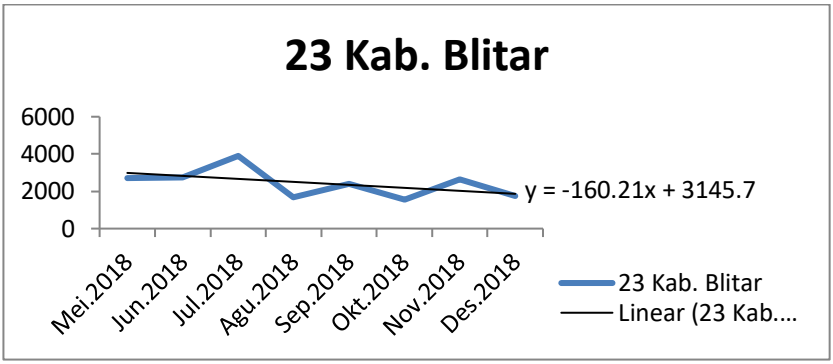

Gambar 4E23a. Kecenderungan Kejadian *Dropout* di Kabupaten Blitar pada Tahun 2018

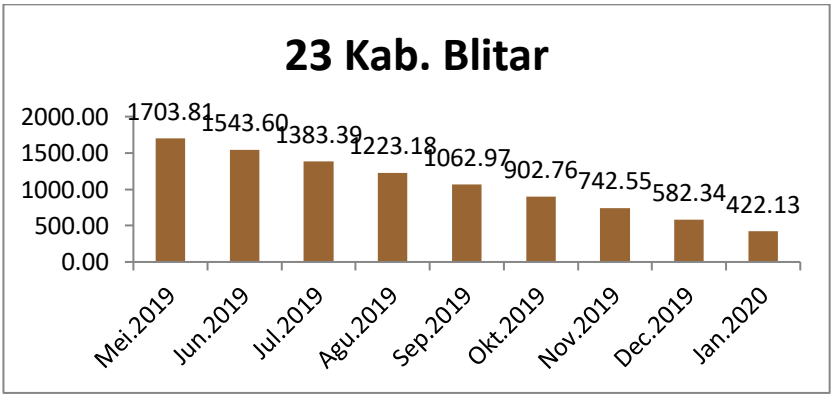

Gambar 4E23b. Proyeksi Kejadian *Drop Out* di Kabupaten Blitar pada Bulan Januari 2019 sampai dengan Januari 2020

Berdasarkan gambar di atas diprediksikan bahwa terjadi penurunan *drop out* di Kabupaten Blitar selama tahun 2019 hingga awal 2020.

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data KKBPK dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan dini di Kabupaten Blitar diprediksikan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga awal 2020.
2. Peserta KB baru di Kabupaten Blitar diprediksikan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga awal 2020.
3. Peserta KB aktif di Kabupaten Blitar diprediksikan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga awal 2020.
4. Kejadian *Unmet need* di Kabupaten Blitar diprediksikan mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga awal 2020.
5. Kejadian *drop out* kepesertaan KB di Kabupaten Blitar diprediksikan mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga awal 2020.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya diajukan beberapa rekomendasi kepada Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Perlu dilaksanakan penelitian tentang determinan-determinan kejadian pernikahan dini agar segera ditemukan langkah strategis untuk menurunkan kejadian pernikahan dini di Kabupaten Blitar.
2. Perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang determinan-determinan dari *unmet need*, agar segera ditemukan langkah strategis untuk memecahkan masalah *unmet need* di Kabupaten Blitar.

I. DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, S. S., & Nurhayati, S. (2016). Determinan Fertilitas di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *11*(1), 1–14.

BPS, BKKBN, Kemenkes RI, & I. I. (2012). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta.

Bradley, S. E. K., Croft, T. N., Fishel, J. D., & Westoff, C. F. (2012). Revising Unmet Need for Family Planning. *DHS Analytical Studies*, (25).

Jayani, D. H. (2019). Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia. Retrieved June 3, 2019, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia

Pranadji, T. (2007). Gagasan Pembangunan Berbasis Kualitas Penduduk dan Tata Nilai Sosio-Budaya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *25*(2), 136–150.

Razif, H. M., & Tantoro, S. (2012). AKI akb rasif&tantoro.PDF. Pekanbaru: Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Riau.

Sari, U. M. (2015). UU No 23 Tahun 2014 dan KKBPK. Retrieved December 7, 2018, from https://uniek-m-sari.blogspot.com/2015/02/uu-no-23-tahun-2014-dan-kkbpk.html?showComment=1544164752473#c3729304768392710155

Siregar, A. (2016). *Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Sehat*. Jakarta: BKKBN.

Sudarmi. (2015). *Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)*.

Sulaiman, M. R. (2018). Angka Harapan Hidup Indonesia Terus Naik, Apa Artinya?

Wijayanti, H. (2017). Masalah Kependudukan di Indonesia. *Portal-Ilmu*. Retrieved from https://portal-ilmu.com/3-masalah-kependudukan-di-indonesia/

Wikipedia. (2019). Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk. Retrieved June 4, 2019, from https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk

Witono. (2018). Program KKBPK dan Kualitas Hidup. *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*.